



Data dan Informasi Tahun 2017

**DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2017



DATA DAN INFORMASI

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2017

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jakarta, Desember 2017

DATA DAN INFORMASI

**DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2017**

Penyusun & Penyunting:

Subbagian Data dan Informasi

Bagian Program dan Evaluasi

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Desain sampul & layout:

Tenang Carles Rinaldi Silitonga, S.Komp.

Diterbitkan oleh:

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gedung Manggala Wanabakti

Blok I Lantai 7, Cq. Bagian Program dan Evaluasi

Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270

Telp/Fax: (021) 5730289/ (021) 5734632

Email: datainformasi.planologi@gmail.com

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017 ini disusun sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyusunan buku ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang tepat, akurat, dan terkini, khususnya dibidang planologi kehutanan dan tata lingkungan kepada masyarakat.

Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017 merupakan gambaran capaian kinerja setiap unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang meliputi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I sampai dengan XXII.

Kami menyadari penyusunan buku ini belum sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakannya.

Jakarta, Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL,



Sigit Hardwinarto
NIP. 19610202 198603 1 003

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. TUJUAN, ARAHAN KEBIJAKAN SERTA TUGAS DAN FUNGSI	1
A. Tujuan dan Arahan Kebijakan	1
B. Tugas dan Fungsi	2
BAB II. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	5
A. Program.....	5
B. Kegiatan	5
BAB III. KEMAJUAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	7
A. Kemajuan Kegiatan Prioritas Tahun 2016	7
B. Kemajuan Kegiatan Prioritas Tahun 2017	8

DAFTAR TABEL

HALAMAN

I. PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

Tabel I.1	Progres Persetujuan Substansi Kehutanan dalam Usulan Revisi RTRWP	10
Tabel I.2	Kebijakan dan Strategi RKTN 2011 – 2030	16
Tabel I.3	Hasil Analisis Kawasan Berdasarkan Fungsi (Juta Hektar) dalam Dokumen RKTN 2011 – 2030	19
Tabel I.4	Luas Arahan Pemanfaatan pada Tahun 2030 (Juta Hektar)	20

II. PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

Tabel II.1	Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	24
Tabel II.2	Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan	25
Tabel II.3	Perkembangan Pengesahan Berita Acara Tata Batas	26
Tabel II.4	Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan	27
Tabel II.5	Perkembangan Tata Batas IUPHHK-HA	28
Tabel II.6	Perkembangan Tata Batas IUPHHK-HT	29
Tabel II.7	Perubahan Fungsi	30
Tabel II.8	Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi (Tahap SK Pelepasan Kawasan Hutan)	51
Tabel II.9	Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan/Pertanian (Tahap SK Pelepasan Kawasan Hutan)	52
Tabel II.10	Perkembangan Tukar Menukar Kawasan Hutan	53
Tabel II.11	Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan/Pertanian (Tahap SK Pelepasan Kawasan Hutan) Per Komoditi	54

III. PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

Tabel III.1	Daftar 100 KPH Penetapan Fasilitasi	56
Tabel III.2	Kelembagaan 100 KPH Penetapan Fasilitasi	59
Tabel III.3	Perkembangan Penetapan Wilayah KPH Model	62
Tabel III.4	Perkembangan Kelembagaan KPH Model	65
Tabel III.5	Kelembagaan 114 KPH Penetapan Fasilitasi	69
Tabel III.6	Daftar 114 KPH Penetapan Fasilitasi	72

IV. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Tabel IV.1	Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Survey/Eksplorasi Tambang dan Non Tambang	78
Tabel IV.2	Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Tambang dan Non Tambang	79
Tabel IV.3	Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Survey/Eksplorasi Komoditas Tambang	80
Tabel IV.4	Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Survey Eksplorasi/Sub Kegiatan Non Tambang Tahun 2017	81

Tabel IV.5	Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Komoditas Tambang	82
Tabel IV.6	Perkembangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Komoditas/Sub Kegiatan Non Tambang.....	83
Tabel IV.7	Perkembangan Lahan Kompensasi	84
Tabel IV.8	Rekapitulasi Laporan Perkembangan Penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	85

V. INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

Tabel V.1	Perkembangan Pemeriksaan Hasil Penafsiran Citra Satelit pada Unit IUPHHK-HA	86
Tabel V.2	Perkembangan Pemeriksaan Hasil Penafsiran Citra Satelit pada Unit IUPHHK-HTI	87
Tabel V.3	Peta Tematik Non Kehutanan Tahun 2017.....	88
Tabel V.4	Perkembangan Pendokumentasian Peta Dasar Tahun 2017	89

VI. PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

Tabel VI.1	Daftar Penerbitan Surat Keputusan dan Rekomendasi dari Kegiatan AMDAL dan UKL-UPL pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Bulan Januari-November 2017	92
------------	---	----

VII. PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

Tabel VII.1	Status Perkembangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Januari 2017 – SKR)	105
Tabel VII.2	Status Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) 2017.....	106
Tabel VII.3	Status Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP) 2017	107
Tabel VII.4	Status Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2017	108
Tabel VII.5	Status Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017.....	109
Tabel VII.6	Progres Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional.....	110
Tabel VII.7	Progres Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi.....	111
Tabel VII.8	Progres Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota.....	113
Tabel VII.9	Daftar Klinik Asistensi- Koordinasi Penyusunan Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Tahun 2017	116
Tabel VII.10	Valuasi Ekonomi Beberapa Ekosistem di Indonesia.....	118
Tabel VII.11	Proporsi Indikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan	137

VIII. DUKUNGAN MANAJEMEN

Tabel VIII.1	Kegiatan Pokok dan Indikator Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019	145
Tabel VIII.2	Alokasi dan Serapan Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016-2017	146
Tabel VIII.3	Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2017.....	147
Tabel VIII.4	Proyek Bantuan Luar Negeri Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2012-2017	151

Tabel VIII.5	Rekapitulasi Sebaran PNS dan CPNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.....	153
Tabel VIII.6	Rekapitulasi Sebaran PNS dan CPNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)	154
Tabel VIII.7	Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan	155
Tabel VIII.8	Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	156
Tabel VIII.9	Sarana dan Prasarana	158

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 1. Alur Proses Perubahan Kawasan Hutan dalam Revisi RTRWP	9
Gambar 2. Luas Kawasan Hutan Indonesia	21
Gambar 3. Skema Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.....	21
Gambar 4. Alur Proses Pelepasan Kawasan Hutan	22
Gambar 5. Tahapan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)	23
Gambar 6. Penggunaan Kawasan Hutan (Skema Pengguna Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Non Kehutanan).....	76
Gambar 7. Penggunaan Kawasan Hutan (Izin Pijam Pakai Kawasan Hutan)	77
Gambar 8. Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal Serta Izin Lingkungan (PP 27/2012)	90
Gambar 9. Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL Serta Izin Lingkungan (PP27/2012)...	91

BAB I

TUJUAN, ARAHAN KEBIJAKAN SERTA TUGAS DAN FUNGSI

A. Tujuan dan Arahan Kebijakan

Sesuai Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2015-2019 adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019 adalah: (1). Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2). Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*; (3). Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya. Sedangkan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyanga kehidupan untuk mendukung pembangunan keberlanjutan.

Pada prinsipnya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan dalam upaya pencapaian dari seluruh sasaran strategis tersebut, namun sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya, peran dan fokus utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah memastikan kawasan hutan yang mantap yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan

daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung daya tampung, services pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Adapun fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah menyelenggarakan:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kehutanan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta kajian dampak lingkungan;
5. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan di daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan;

7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai 6 (enam) Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
3. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
4. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
5. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor;
6. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

Selain satker Eselon II di pusat, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki 22 satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Adapun kedudukan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) tersebut adalah sebagai berikut:

1. BPKH Wilayah I Medan berkedudukan di Medan dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sumut dan Sumbar.
2. BPKH Wilayah II Palembang berkedudukan di Palembang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sumsel.
3. BPKH Wilayah III Pontianak berkedudukan di Pontianak dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat.
4. BPKH Wilayah IV Samarinda berkedudukan di Samarinda dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

5. BPKH Wilayah V Banjarbaru berkedudukan di Banjarbaru dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Selatan.
6. BPKH Wilayah VI Manado berkedudukan di Manado dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
7. BPKH Wilayah VII Makassar berkedudukan di Makassar dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
8. BPKH Wilayah VIII Denpasar berkedudukan di Denpasar dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Bali dan NTB.
9. BPKH Wilayah IX Ambon berkedudukan di Kota Ambon dengan wilayah kerja Provinsi Maluku.
10. BPKH Wilayah X Jayapura berkedudukan di Jayapura dengan wilayah kerja Provinsi Papua.
11. BPKH Wilayah XI Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta dengan wilayah kerja meliputi Wilayah Pulau Jawa dan Madura.
12. BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang berkedudukan di Tanjung Pinang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kepulauan Riau.
13. BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang berkedudukan di Pangkal Pinang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Jambi dan Bangka Belitung.
14. BPKH Wilayah XIV Kupang berkedudukan di Kupang dengan wilayah kerja Provinsi NTT.
15. BPKH Wilayah XV Gorontalo berkedudukan di Gorontalo dengan wilayah kerja Provinsi Gorontalo.
16. BPKH Wilayah XVI Palu berkedudukan di Palu dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tengah.
17. BPKH Wilayah XVII Manokwari berkedudukan di Manokwari dengan wilayah kerja Provinsi Papua Barat.
18. BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh berkedudukan di Banda Aceh dengan wilayah kerja Provinsi Aceh.
19. BPKH Wilayah XIX Pekanbaru berkedudukan di Pekanbaru dengan wilayah kerja Provinsi Riau.
20. BPKH Wilayah XX Bandar Lampung berkedudukan di Bandar Lampung dengan wilayah kerja Provinsi Lampung dan Bengkulu.
21. BPKH Wilayah XXI Palangkaraya berkedudukan di Palangkaraya dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah.
22. BPKH Wilayah XXII Kendari berkedudukan di Kendari dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 yang menyatakan bahwa satu eselon I bertanggung jawab terhadap 1 (satu) program. Program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah “**Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**“.

Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, maka tujuan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya rentang papulasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangsih bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, peran utama kementerian tahun 2015-2019 adalah: (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah jenis dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya.

B. Kegiatan

Program kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang akan dilaksanakan pada periode 2015-2019 harus selaras dengan yang diamanatkan oleh UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu: 1) Inventarisasi Hutan; 2) Pengukuhan Kawasan Hutan; 3) Penatagunaan Kawasan Hutan; 4) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; 5) Penyusunan Rencana Kehutanan; dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: 1) Inventarisasi lingkungan hidup, 2) penetapan wilayah ekoregion, 3) penyusunan RPPLH, 4) pencegahan pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen KLHS, Amdal, UKL-UPL serta izin lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan dijabarkan lebih lanjut kedalam 7 (tujuh) kegiatan dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dengan sasaran: terselesaikannya penetapan kawasan Hutan sebesar minimal 80% dari kawasan hutan, tersedianya arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya, teridentifikasinya kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA),

tersedianya dan tersosialisasikannya informasi batas kawasan hutan untuk publik, terselesaikannya seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk untuk/pada lokasi permukiman transmigrasi.

2. Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dengan sasaran terbarukannya data dan informasi SDH nasional dan seluruh KPH;
3. Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, dengan sasaran:
Terlakunya permohonan penggunaan kawasan hutan dalam rangka energi; Pembentukan 409 unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 provinsi; Tersedianya data dan informasi spasial dokumentasi pemanfaatan ruang kawasan hutan penggunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
4. Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, dengan sasaran:
Terlaksananya review kelayakan dan terjaminnya kualitas analisis lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir; Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas; Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan rencana pembangunan daerah (tertatanya pelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan); Tersusunnya Neraca SDA LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (tersedia dan terbarukannya data dan infomasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup);
5. Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, dengan sasaran terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan;
6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78.00 (A) di Tahun 2019;
7. Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan dengan sasaran Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Pemantapan Kawasan Hutan.

BAB III

KEMAJUAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PLANLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

A. Kemajuan Kegiatan Prioritas Tahun 2016 S/D Desember 2016

No	Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2015-2019	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016
1.	Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan			
	a. Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal Kawasan 80%	80%	10%(75%)	85,17% (113,56%)
	b. Kawasan Hutan melalui Tata Batas kawasan Hutan 40.000 km	40.000 Km	8.000 Km (target APBN-P 6.124 km)	5.448,19 Km (89,44%)
2.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
	a. Data dan Informasi potensi sumber daya hutan 600 KPH	600 KPH	100 KPH	100 KPH (368 KPH) (Bulan Desember)
3.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
	a.Pembentukan 409 Unit KPH b. Penata ruang Wilayah 34 Prov	409 Unit 34 Prov (updt)	100 unit KPH 34 Prov	100 KPH 34 Prov (100%)
4.	Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor			
	a. Pengendalian kualitas KLHS berbasis DD.DT sebanyak 100 KLHS pertahun b. Review kelayakan KLHS sebanyak minimal 100 per tahun	100 KLHS/tahun 100 KLHS/tahun	100 KLHS (target APBN-P 30 KLHS) 100 KLHS (target APBN- P 13 KLHS)	30 KLHS sesuai ketersediaan dana TA 2016 13 KLHS
5.	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan			
	a.Penilaian 50 Dokumen AMDAL dan pemeriksaan UKL-ULP serta penerbitan izin lingkungan selesai	100 %	100%	100 %

Sedangkan kemajuan kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan secara lengkap terperinci pada tabel terlampir.

B. Kemajuan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 S/D November 2017

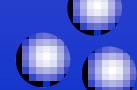
No	Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2015-2019	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017
1.	Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan			
	a. Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal Kawasan 80% b. Kawasan Hutan melalui Tata Batas kawasan Hutan 40.000 km	80% 40.000 Km	85% 4.000 Km	87,09% (102,39%) 2.538,81 Km (63,47%)
2.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
	a. Data dan Informasi potensi sumber daya hutan 600 KPH	600 KPH	100 KPH	358 KPH 100% (Bulan Desember)
3.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
	a. Pembentukan 409 Unit KPH b. Penata ruang Wilayah 34 Prov	409 Unit 34 Prov	100 unit KPH 34 Prov	100 Unit KPH 33 Prov (100%)
4.	Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor			
	a. Pengendalian kualitas KLHS berbasis DD.DT sebanyak 100 KLHS pertahun b. Review kelayakan KLHS sebanyak minimal 100 per tahun	100 KLHS 100 KLHS	10 KLHS 15 KLHS	10 KLHS sesuai ketersediaan dana TA 2017 25 KLHS (Sumber data paparan capaian kinerja 2015-2017)
5.	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan			
	a. Penilaian 50 Dokumen AMDAL dan pemeriksaan UKL-ULP serta penerbitan izin lingkungan selesai	100 %	100%	100 % (sumber data paparan capaian kinerja 2015-2017)

Sedangkan kemajuan kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan secara lengkap terperinci pada tabel terlampir.

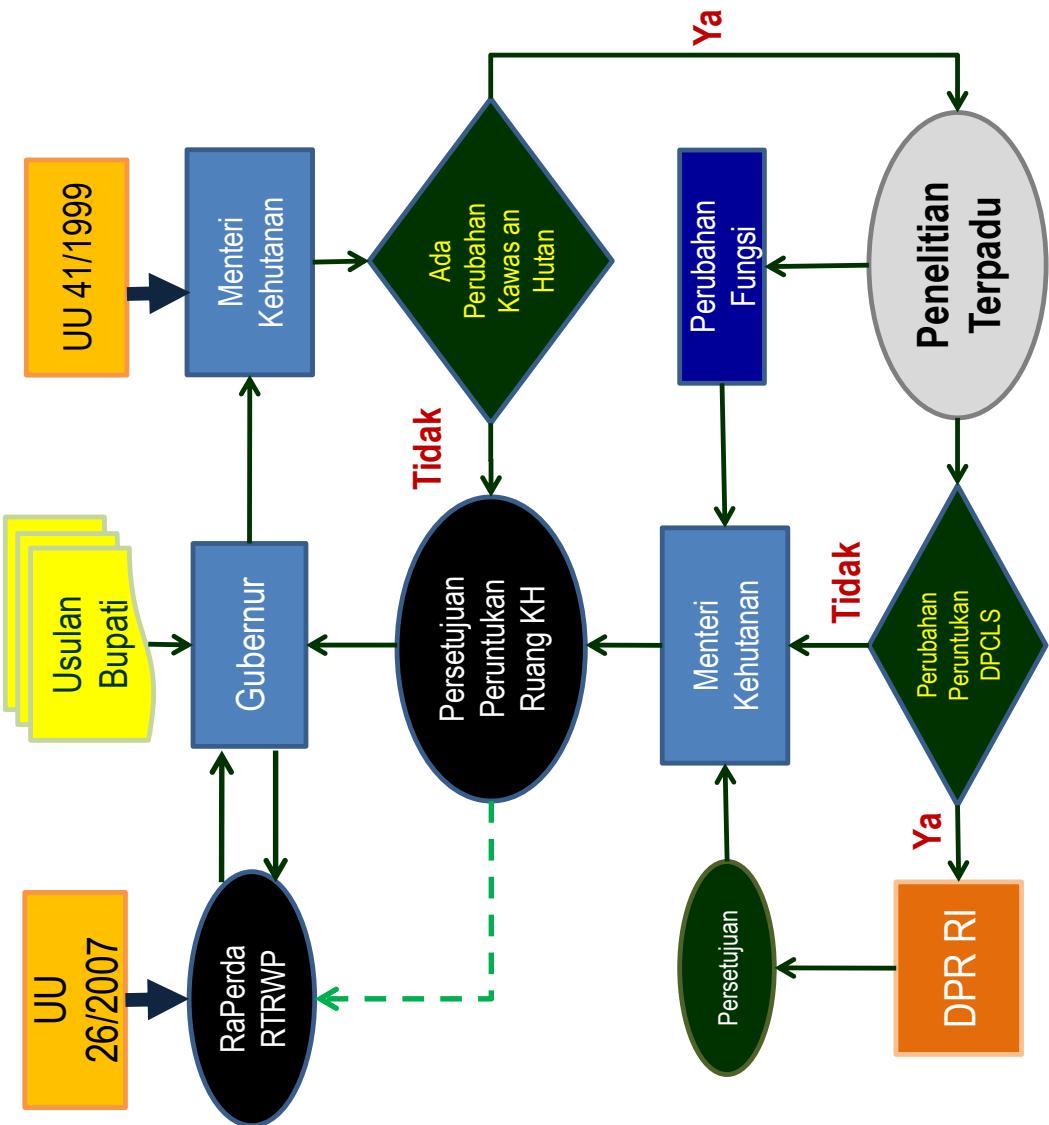
PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2017





GAMBAR 1. ALUR PROSES PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DALAM REVISI RTRWP



TABEL I.1. PROGRES PERSETUJUAN SUBSTANSI KEHUTANAN DALAM USULAN REVISI RTRWP

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
1	Aceh	Peruntukan Fungsi Penunjukan : 131.717 Ha : 179.536 Ha : 31.275 Ha	Peruntukan Fungsi Penunjukan : 80.256 Ha : 130.542 Ha : 26.461 Ha SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 Persub : S.33/Menhut-VII/2014, 16 Januari 2014. Persetujuan DPR RI terkait DPCLS sesuai Surat Wakil Ketua DPR Nomor PW/09557/DPR RI/X/2014 tgl 25 September 2014 (DPCLS sudah di include-kan seluas 37.640 ha)	1. Telah diterbitkan Keputusan SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Aceh. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
2	Sumatera Utara	Peruntukan Fungsi Penunjukan : 1.269.284 Ha : 296.263 Ha : 35.429 Ha	Peruntukan Fungsi Penunjukan : 642.716 Ha : 207.362 Ha : 17.894 Ha Persub : S.407/Menhut-VII/2014, 18 September 2014	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara menindaklanjuti keputusan MA no 47p/HUM/2011 tanggal 23 Desember 2013 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
3	Sumatera Barat	Peruntukan Fungsi Penunjukan : 211.386 Ha : 216.189 Ha : 13.544 Ha	Peruntukan Fungsi Penunjukan : 126.286 Ha : 147.213 Ha : 9.906 Ha SK.304/Menhut-II/2011; 9 Juni 2011 dan SK.141/Menhut-II/2012; 15 Maret 2012 (DPR setuju untuk areal DPCLS) Persub : S.628/Menhut-VII/2009; 12 Agustus 2009	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang perubahan Keputusan Menhutbun No. 422/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
4	Riau	Peruntukan Fungsi Penunjukan : 3.530.696 Ha : 1.087.707 Ha : 46.914 Ha	Peruntukan Fungsi Penunjukan : 1.703.374 Ha : 717.543 Ha : 1.152 Ha SK.673/Menhut-II/2014, 8 Agustus 2014, menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI terdapat tambahan perubahan peruntukan seluas 65.125 ha → SK.314/Menlhk/Sejien/PLA.2/2016 jo SK.393/Menlhk/Sejien/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 Persub S.438/Menlhk-PKTL/Ren/PLA.0/4/2016 tanggal 25 April 2016	1. Telah diterbitkan Keputusan SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Riau. 2. Rekomendasi Ombudsman RI No. 0002/REK/0361.2015/ 3. Menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK.314/Menlhk/Sejien/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 jo SK.393/Menlhk/Sejien/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 4. Persub S.438/Menlhk-PKTL/Ren/PLA.0/4/2016 tanggal 25 April 2016

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
5	Kepulauan Riau	Peruntukan Fungsi Penunjukan	Peruntukan : 532.954 Ha Fungsi : 58.723 Ha Penunjukan : 2.370 Ha	<p>Peruntukan : 399.078 Ha Fungsi : 146.962 Ha Penunjukan : 2.370 Ha</p> <p>SK.76/Menlhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015.</p> <p>5. Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.220/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2016 tanggal 20 April 2016.</p> <p>6. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
6	Jambi	Peruntukan Fungsi Penunjukan	Peruntukan : 107.047 Ha Fungsi : 72.245 Ha Penunjukan : 10.908 Ha	<p>Peruntukan : 14.048 Ha Fungsi : 20.529 Ha</p> <p>SK.727/Menlh-Il/2012; 10 Desember 2012</p> <p>Persub : S.11/Menlh-VII/2013; 8 Januari 2013</p> <p>Persetujuan DPR RI terkait DPCLS sesuai Surat Wakil Ketua DPR Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tgl 24 September 2014 (DPCLS sudah di include-kan seluas 336 ha)</p> <p>1. Telah diterbitkan Keputusan SK.863/Menlh-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Jambi.</p> <p>2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
7	Bengkulu	Peruntukan Fungsi Penunjukan	Peruntukan : 102.835 Ha Fungsi : 29.458 Ha Penunjukan : 101 Ha	<p>Peruntukan : 2.192 Ha Fungsi : 31.013 Ha Penunjukan : 101 Ha</p> <p>SK.643/Menlh-II/2011; 10 November 2011</p> <p>Persub : S.58/Menlh-VII/2012; 30 Januari 2012</p> <p>1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Keputusan Menhutun No.421/KPTS-II/1999 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu.</p> <p>2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
8	Kepulauan Bangka Belitung	Peruntukan Fungsi Penunjukan	Peruntukan : 133.590 Ha Fungsi : 9.361Ha Penunjukan : 3.218Ha	<p>Peruntukan : 19.131 Ha Fungsi : 10.878 Ha Penunjukan : 3.210 Ha</p> <p>SK.798/Menlh-II/2012; 27 Desember 2012</p> <p>Persub : S.110/Menlh-VII/2013; 8 Januari 2013</p> <p>1. Akan diterbitkan Keputusan Menhut mengenai Perubahan atas Keputusan No. SK.357/Menhet-II/2004 tanggal 11 Oktober 2004.</p> <p>2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
9	Sumatera Selatan	Peruntukan Fungsi	Peruntukan : 410.550 Ha Fungsi : 82.825Ha	<p>Peruntukan : 230.204 Ha Fungsi : 44.299 Ha</p> <p>1. Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/X/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan</p>

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
10	Lampung	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.519/Men hut-VII/2009; 6 Juli 2009	<p>Hutan yang DPCLS</p> <p>2. Telah diberitikan Keputusan SK.454/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 mengenai Kawasan Hutan Prov. Sumsel.</p> <p>3. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
11	DKI Jakarta	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.97/Men hut-VII/2011; 3 Maret 2011	<p>Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi.</p> <p>2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
12	Jawa Barat	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.276/Men hut-VII/2010; 10 Juni 2010	<p>Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi.</p> <p>2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
13	Banten	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.277/Men hut-VII/2010; 10 Juni 2011	<p>Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi.</p> <p>2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
14	Jawa Tengah	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.933/Men hut-VII/2009; 11 Desember 2009	<p>Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi.</p> <p>2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
15	DI. Yogyakarta	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.932/Men hut-VII/2009; 11 Desember 2009	<p>Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi.</p> <p>2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
16	Jawa Timur	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.581/Men hut-VII/2010; 11 November 2010	<p>1. Telah dikeluarkan Keputusan Men hut No. SK. 395/Men hut-II/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Perubahan Keputusan Men hut No. 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.</p> <p>2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
17	Bali	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.728/Men hut-VII/2009; 14 September 2009	<p>1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi.</p> <p>2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
18	Nusa Tenggara Barat	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.727/Men hut-VII/2009; 14 September 2009	<p>1. Telah dikeluarkan Keputusan Men hut No. SK. 598/Men hut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.</p> <p>2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
19	Nusa Tenggara Timur	Peruntukan Fungsi Penunjukan	Peruntukan : 213.195 Ha Fungsi : 21.461 Ha Penunjukan : 24.518 Ha Persub : S.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016; 11 Mei 2016 Persub : S.582/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/6/2016 tgl 13 Juni 2016	<p>1. Pemerintah NTT telah mengajukan usulan perubahan Kawasan hutan sesuai Surat Gubernur NTT :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Gubernur Nomor BU.522/14/DISHUT/2013 tanggal 11 Oktober 2013. • Surat Gubernur No. BU.522/19/DISHUT/2013 tanggal 20 November 2013 • Surat Gubernur No. BU.522/13/DISHUT/2014 tanggal 5 Juni 2014 • Surat Gubernur No. BU.522/03/DISHUT/2015 tanggal 15 April 2015. • Telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK. 357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016; 11 Mei 2016 • Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.237/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tanggal 11 Mei 2016.
20	Kalimantan Barat	Peruntukan Fungsi Penunjukan	Peruntukan : 2.355.730 Ha Fungsi : 727.727 Ha Penunjukan : 236.133 Ha SK.936/Men hut-II/2013, 20 Desember 2013. Persub No : S.26/Men hut-VII/2014; 10 Januari 2014.	<p>1. Telah diterbitkan Keputusan Men hut No. SK.733/Men hut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>2. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan keputusan areal yang DPCLS seluas 69.294 Ha.</p>
21	Kalimantan Tengah	Peruntukan Fungsi Penunjukan	Peruntukan : 2.922.312 Ha Fungsi : 3.900.656 Ha Penunjukan : 944.715 Ha SK.292/Men hut-II/2011; 31 Mei 2011. Persub No : S.431/Men hut-VII/2012; 28 September 2012.	<p>1. Telah diterbitkan Keputusan Men hut No. SK.529/Men hut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang perubahan atas Keputusan Men tan No. 759/KPTS/LM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.</p> <p>2. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
22	Kalimantan Timur	Peruntukan Fungsi Penunjukan	Peruntukan : 2.534.518 Ha Fungsi : 625.326 Ha Penunjukan : 172.830 Ha	<p>1. Telah diterbitkan Keputusan Men hut No. SK.718/Men hut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.</p>

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
23	Kalimantan Selatan	Peruntukan Fungsi Penunjukan	SK.554/Men hut-II/2013; 2 Agustus 2013. Persub No : S.519/Men hut-VII/2013; 5 September 2013.	2. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
24	Gorontalo	Peruntukan Fungsi Penunjukan	Peruntukan : 270.293 Ha Fungsi : 47.851 Ha Penunjukan : 280.319 Ha SK.432/Men hut-II/2009; 22 Juli 2009. Persub No : S.518/Men hut-VII/2009; 6 Juli 2009.	1. Telah diterbitkan Keputusan Men hut No. SK.435/Men hut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
25	Sulawesi Utara	Peruntukan Fungsi Penunjukan	Peruntukan : 35.832 Ha Fungsi : 95.395 Ha Penunjukan : 5.951 Ha SK.324/Men hut-II/2010; 25 Mei 2010. Persub No : S.238/Men hut-VII/2010; 14 Mei 2010	1. Telah diterbitkan Keputusan Men hut No. SK.325/Men hut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Gorontalo. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
26	Sulawesi Tengah	Peruntukan Fungsi Penunjukan	Peruntukan : 48.591 Ha Fungsi : 7.250 Ha Penunjukan : 2.589 Ha SK.434/Men hut-II/2013; 17 Juni 2013. Persub No : S.521/Men hut-VII/2013; 5 September 2013.	1. Telah diterbitkan Keputusan Men hut No. SK.734/Men hut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
27	Sulawesi Selatan	Peruntukan Fungsi Penunjukan	Peruntukan : 982.823 Ha Fungsi : 321.446 Ha Penunjukan : 1.204 Ha SK.635/Men hut-II/2013; 24 September 2013 Sebagaimana telah diperbaharui melalui SK.708/Men hut-II/2014; 22 Agustus 2014. Persub No. S.884/Men hut-VII/2014; 1 September 2014.	1. Telah diterbitkan Keputusan Men hut No. SK.869/Men hut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
28	Sulawesi Tenggara	Peruntukan Fungsi	Peruntukan : 255.289 Ha Fungsi : 101.563 Ha Penunjukan : 42.378 Ha SK.465/Men hut-II/2011; 9 Agustus 2011. Persub No : S. 61/Men hut-VII/2013; 30 Januari	1. Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP melalui surat Gubernur Nomor 522/2064/DISHUT tanggal 31 Maret 2015. 2. Telah dibentuk SK Tim Terpadu Nomor SK.20/MENLHK/PKTL/PLA.01/2017 tanggal 16 Januari 2017 1. Akan diterbitkan Keputusan Men hut mengenai Perubahan atas Keputusan Men hut No. 454/kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara.

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
29	Sulawesi Barat	Peruntukan Fungsi Fungsi : 168.860 Ha Penunjukan : 294.630 Ha	2013.	<p>2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan keputusan areal yang DPCLS seluas 49.195 Ha.</p>
30	Maluku	Peruntukan Fungsi Fungsi : 1.525.376 Ha Penunjukan : 296.545 Ha Penunjukan : 7.691 Ha	Peruntukan : 73.556 Ha Fungsi : 251.600 Ha SK.726/Men hut-II/2012; 10 Desember 2012 Persub No : S. 62/Men hut-VII/2013; 30 Januari 2013	<p>1. Telah diterbitkan Keputusan Men hut No. SK.862/Men hut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat.</p> <p>2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
31	Maluku Utara	Peruntukan Fungsi Fungsi : 950.736 Ha Penunjukan : 384.773 Ha Penunjukan : 24.719 Ha	Peruntukan : 364.115 Ha Fungsi : 20.668 Ha Penunjukan : 3.313 Ha SK.871/Men hut-II/2013; 6 Desember 2013. Persub No. S.27/Men hut-VII/2014; 10 Januari 2014.	<p>1. Telah diterbitkan Keputusan Men hut No. SK.854/Men hut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku.</p> <p>2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
32	Papua	Peruntukan Fungsi Fungsi : 1.278.623 Ha Penunjukan : 6.199.496 Ha Penunjukan : 48.160 Ha	Peruntukan : 273.361 Ha Fungsi : 92.222 Ha Penunjukan : 5.081 Ha SK.490/Men hut-II/2012; 5 September 2012 Persub No : S.427/Men hut-VII/2012; 26 September 2012	<p>1. Telah diterbitkan Keputusan Men hut No. SK.302/Men hut-II/2014 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 415/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku.</p> <p>2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
33	Papua Barat	Peruntukan Fungsi Fungsi : 979.452 Ha Penunjukan : 1.032.759 Ha Penunjukan : 23.870 Ha	Peruntukan : 376.385 Ha Fungsi : 5.736.830 Ha Penunjukan : 45.258 Ha SK.458/Men hut-II/2012; 15 Agustus 2012 Persub No : S.409/Men hut-VII/2012; 11 September 2011	<p>1. Telah dikeluarkan Keputusan Men hut No. SK.782/Men hut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Men hut No. 891/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah TK I Irian Jaya.</p> <p>2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p>
				<p>1. Telah dikeluarkan Keputusan Men hut No. SK.783/Men hut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat.</p> <p>2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan keputusan areal yang DPCLS seluas 50.356 Ha.</p>

Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017

TABEL I.2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI RKTN 2011 - 2030

Kebijakan	Strategi	Milestone				
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
1	2	3	4	5	6	
Pembaharuan Sistem	Perbaikan/revisi dan penguatan peraturan perundangan (cth: Revisi Peraturan Kehutanan Terkait perijinan).	✓				
	Transformasi teknologi dan kelembagaan	✓				
	Perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan	✓				
	Pembangunan baseline sistem informasi kehutanan	✓				
	Penyusunan Rencana Makro Penyelegaraan Kehutanan sesuai arahan pemanfaatan kawasan hutan	✓				
	Rasionalisasi kawasan hutan (luas dan fungsi)	✓				
	Penyelesaian review RTRWP tepat waktu	✓				
	Percepatan Pengukuran Kawasan Hutan	✓	✓			
	Peningkatan produktifitas hutan	✓	✓	✓		
	Penerapan multi sistem dalam pengelolaan kawasan hutan (cth: Joint Production)	✓	✓	✓		
Pemanfaatan dan Optimalisasi Kawasan Hutan	Peningkatan PNBP pemanfaatan kawasan hutan	✓	✓	✓		
	Pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi	✓	✓	✓		
	Pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif	✓	✓	✓		
	Promosi/pemasaran termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam	✓	✓	✓		
	Pelibatan pihak swasta dalam meningkatkan HHBK	✓	✓	✓		
	Pengembangan energi baru terbarukan (EBT)	✓	✓	✓		
	Pengadaan bibit terkonsentrasi untuk menjamin kualitas dan kuantitas (bersertifikat)	✓	✓	✓		

Kebijakan	Strategi	Milestone				
		3	4	5	2026-2030	6
Pengembangan Sistem Incentif dan Disinsentif	Pengalokasian DAK-Kehutanan dan dana Dekon ke daerah berbasis kinerja pengurusan hutan (perencanaan, pengelolaan)		✓	✓	✓	✓
	Pemberian kemudahan proses dan perizinan kepada swasta yang secara sungguh-sungguh mengelola hutannya	✓	✓	✓	✓	✓
	Inisiatif Hutan Rakyat untuk yang bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) oleh BUMN Kehutanan	✓	✓	✓	✓	✓
	Penetapan berbagai tema riset (cth: lanskap hutan, pengelolaan hutan, perubahan iklim, kebijakan, pengolahan hasil hutan)	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengembangan penelitian berbasis kebutuhan	✓	✓	✓	✓	✓
	Pemanfaatan dan penerapan hasil riset dan teknologi bagi perbaikan pengelolaan hutan	✓	✓	✓	✓	✓
	Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan.	✓	✓	✓	✓	✓
	Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH)	✓	✓	✓	✓	✓
	Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk mengelola sebagian Hutan Konservasi	✓	✓	✓	✓	✓
	Pemberian kewenangan yang lebih jelas terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi	✓	✓	✓	✓	✓
Penguatan Desentralisasi dalam Pengelolaan Hutan	Peningkatan pemanfaatan potensi penyuluhan melalui kerjasama dengan instansi terkait (cth: pemanfaatan sarijana penggerak desa)	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan (cth: transportasi menuju taman nasional)	✓	✓	✓	✓	✓
	Deregulasi industri dan perdagangan hasil hutan	✓	✓	✓	✓	✓
	Promosi produk-produk kayu bersertifikat SVLK	✓	✓	✓	✓	✓
	Penggunaan PDB Kawasan Hutan dalam instrumen ekonomi nasional	✓	✓	✓	✓	✓

Kebijakan	Strategi	Milestone				
		2011-2015	2016-2020	2021-2025	2026-2030	
1	2	3	4	5	6	
Penguatan Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang terintegrasi	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengembangan sistem penyuluhan kehutanan	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan peran penyuluhan kehutanan	✓	✓	✓	✓	✓
	Penguatan kelembagaan penyuluhan kehutanan	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan pengembangan SDM dengan Badan Diklat Daerah	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengembangan SDM Kehutanan sesuai komoditas unggulan daerah	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM Kehutanan pusat dan daerah	✓	✓	✓	✓	✓
	Standardisasi kompetensi SDM Kehutanan	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan kerjasama luar negeri berbasis kesetaraan	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan kekuatan penetrasi produk kehutanan dalam pasar regional dan global	✓	✓	✓	✓	✓
Komitmen dan Konsistensi Penegakan Hukum Bidang Kehutanan	Peningkatan peran Sektor Kehutanan Indonesia di Tingkat Regional dan Global	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan hukum secara konsekuensi dan konsisten	✓	✓	✓	✓	✓
	Koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber : Dokumen RKTN 2011-2030

Keterangan: * Dokumen RKTN Tahun 2020 s.d 2030 saat ini sedang dilakukan Revisi sehubungan dengan terdapat isu-isu, Pengelolaan, Pemanfaatan Penatagunaan Kawasan Hutan serta lingkungan khususnya tentang Perutinan sosialpenyediaan tanah untuk masarakat Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA), Kemitmen Industri terhadap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan kawasan hidrologis gambut. Dalam Revisi telah dilakukan konsultasi publik pada tanggal 21 Maret 2017.

TABEL I.3. HASIL ANALISIS KAWASAN BERDASARKAN FUNGSI (JUTA HEKTAR) DALAM DOKUMEN RKTN 2011 - 2030

Arahan/Rencana	Fungsi Kawasan					
	HK	HL	Tetap	Terbatas	HP	Konversi
1	2	3	4	5	6	
Kawasan untuk Konservasi	23,20	-	-	-	-	-
Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	-	22,91	1,45	0,61	3,42	
Kawasan untuk Rehabilitasi	3,62	4,14	2,78	2,23	0,75	
Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar	-	-	26,18	20,17	8,18	
Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil	-	1,81	2,19	1,45	1,53	
Kawasan untuk Non Kehutanan	-	-	-	-	4,06	
Jumlah	26,82	28,86	32,60	24,46	17,94	

Sumber: Dokumen RKTN 2011-2030

TABEL I.4. LUAS ARAHAN PEMANFAATAN PADA TAHUN 2030 (JUTA HEKTAR)

Arahan/Rencana	Fungsi Kawasan					Jumlah
	HK	HL	Tetap	Terbatas	Konversi	
1	2	3	4	5	6	7
Kawasan untuk Konservasi	23,20	-	-	-	-	23,20
Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	-	22,91	1,45 (+3,42)	0,61	Arahan menjadi HP	28,40
Kawasan untuk Rehabilitasi	3,62	3,32	2,23 (+0,60)	1,78	80% sisa arahan menjadi HP	11,55
Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar	-	-	20,93 (+6,55)	16,14	80% sisa arahan menjadi HP	43,62
Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil	-	1,44	1,76 (+1,22)	1,15	80% sisa arahan menjadi HP	5,57
Kawasan untuk Non Kehutanan						18,34
Jumlah	26,82	27,67	26,37 (+11,79)	19,68	-	
Luas Efektif Kawasan Hutan			112,34			
			(85% dari sisa luas total kawasan saat ini)			

Sumber: Dokumen RKTN Tahun 2011-2030

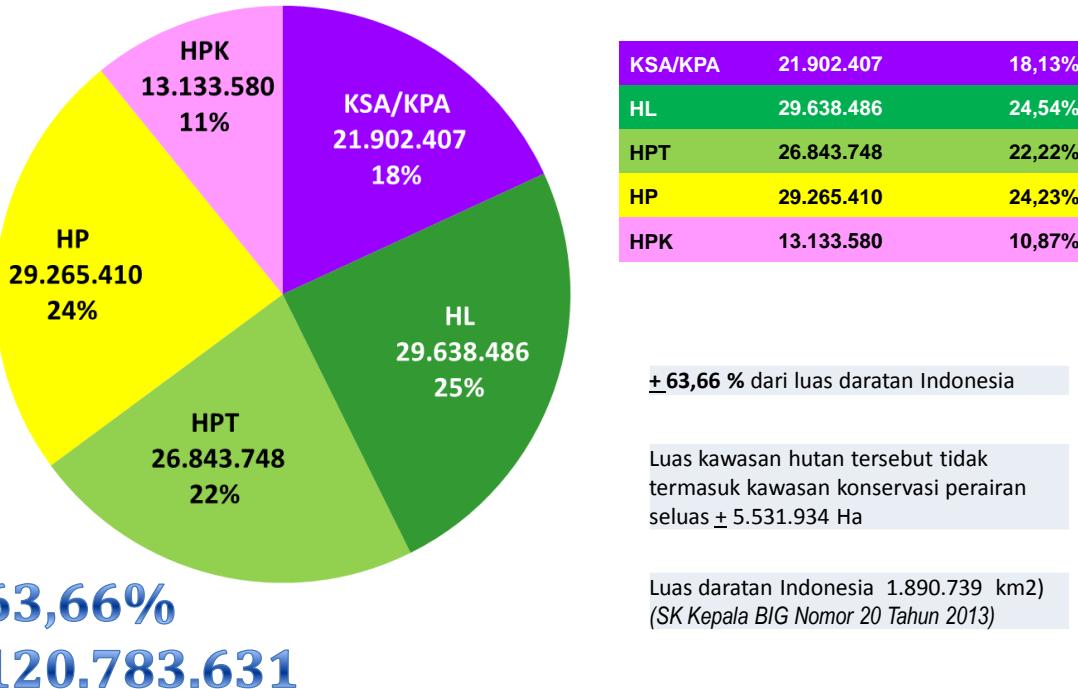
PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2017

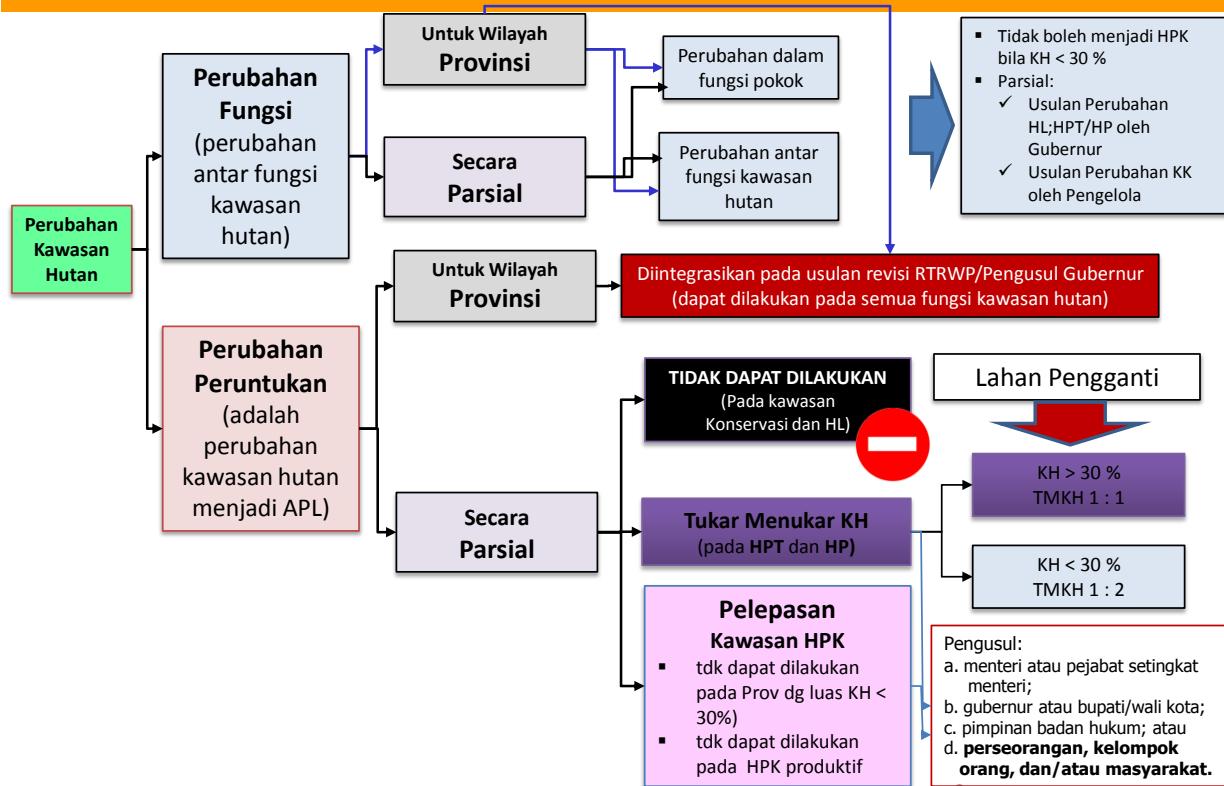




GAMBAR 2. LUAS KAWASAN HUTAN INDONESIA

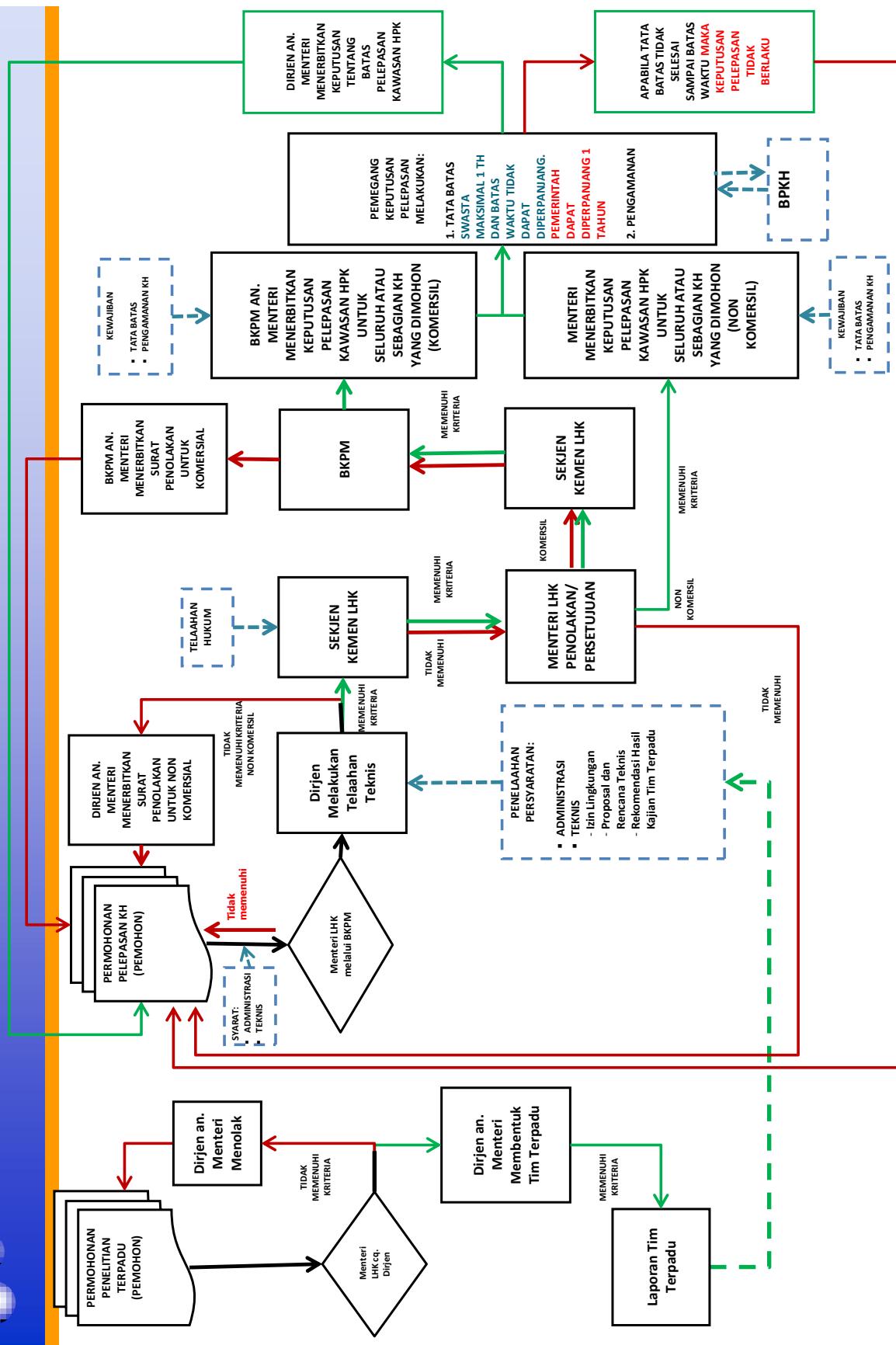


GAMBAR 3. SKEMA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN



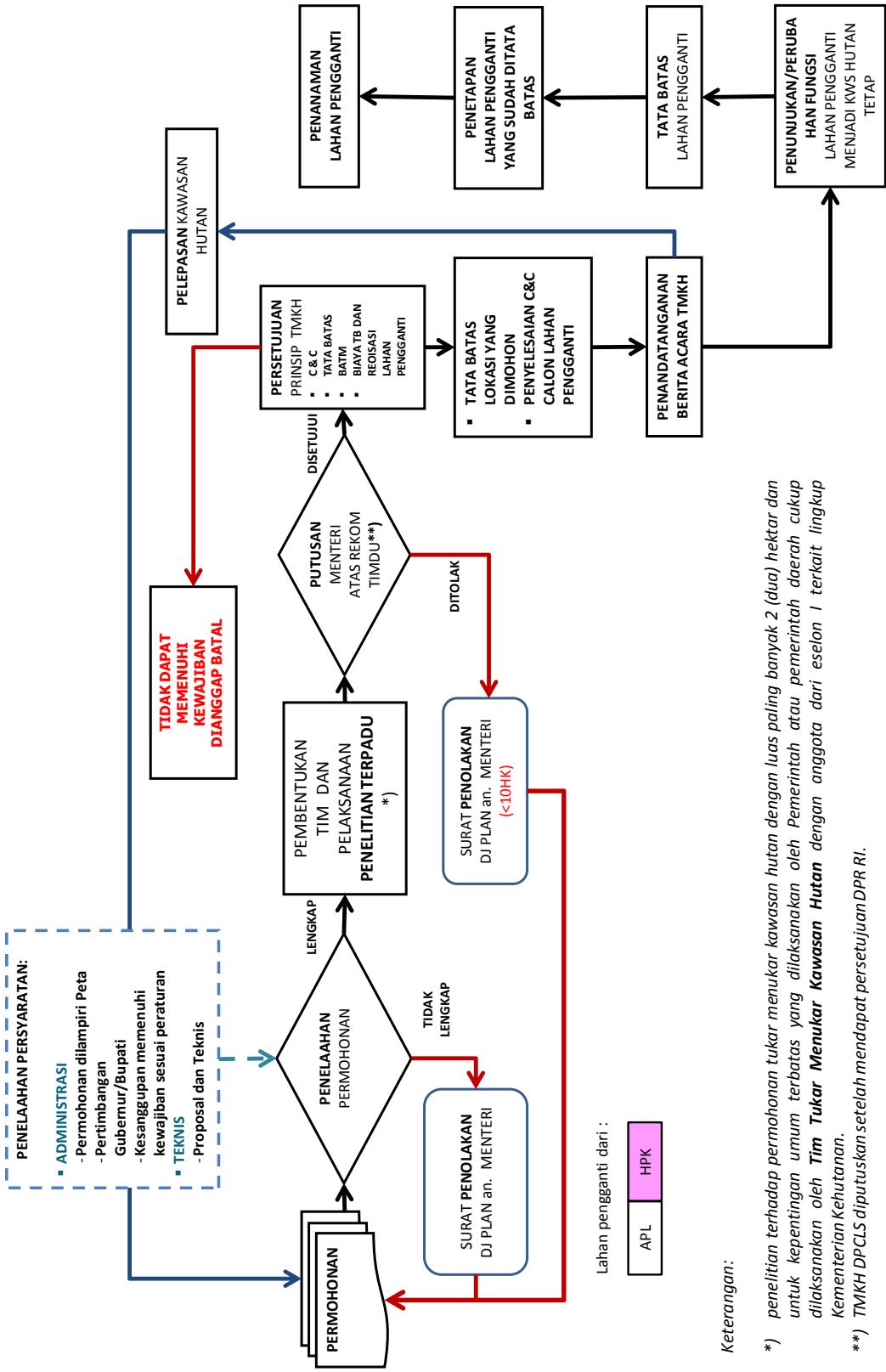
GAMBAR 4. ALUR PROSES PELEPASAN KAWASAN HUTAN

(PP.104 Th 2015; Permenhut P. 51/Menhut/Setjen/KUM.1/6/2016)



GAMBAR 5. TAHAPAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN (TMKH)

(PP.104 Th.2015; Permenhut P. 32/Menhut-II/2010 jo P. 27/Menhut-II/2014)



TABEL II. LUAS KAWASAN HUTAN DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN SK MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Provinsi	SK	Tanggal	KONSERVASI				Luas Darat dan Perairan	Luas Provinsi	Proporsi Luas KH (Daratan)	Ket
				Perairauan	Daratan	Jumlah	HL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	D.I.Aceh	859/MENLHK/SETJENPLA/2/11/2016	11 Nopember 2016	0,00	1.057.628,00	1.794.350,00	145.384,00	551.073,00	15.373,00	3.563.813,00	5.795.600
2	Sumatera Utara	579/Menlh-1/2014	24 Juli 2014	0,00	427.008,00	1.206.881,00	641.769,00	704.452,00	75.684,00	3.055.795,00	7.298.123
3	Sumatera Barat	35/Menlh-1/2013	15 Januari 2013	37.164,00	769.775,00	806.939,00	791.671,00	233.211,00	360.608,00	187.629,00	2.382.894,00
4	Riau	903/MENLHK/SETJENPLA/2/12/2016	07 Desember 2016	0,00	630.753,00	233.910,00	1.017.318,00	2.339.578,00	1.185.433,00	5.406.992,00	8.702.366
5	Jambi	863/Menlh-1/2014	29 September 2014	0,00	685.471,00	685.471,00	179.588,00	258.285,00	963.792,00	11.399,00	2.098.535,00
6	Sumatera Selatan	454/Menlhk/SetienPLA/2/6/2016	17 Juni 2016	49.104,00	741.681,00	790.785,00	578.279,00	213.918,00	1.713.880,00	160.996,00	3.408.754,00
7	Bengkulu	784/Menlh-1/2012	27 Desember 2012	0,00	462.965,00	462.965,00	250.750,00	173.280,00	25.873,00	11.763,00	924.631,00
8	Lampung	256/Kpts-II/2000	23 Agustus 2000	0,00	462.030,00	462.030,00	317.615,00	33.368,00	191.732,00	0,00	1.004.735,00
9	Kep.Bangka Belitung	798/Menlh-1/2012	27 Desember 2012	0,00	34.500,00	34.500,00	166.371,00	0,00	442.051,00	693,00	643.615,00
10	Kepulauan Riau	76/Menlhk/1/2015	06 Maret 2015	0,00	12.294,73	12.294,73	97.662,65	118.332,99	78.830,62	74.511,11	382.132,10
11	DKI Jakarta	220/Kpts-II/2000	02 Agustus 2000	108.000,00	272,34	108.272,34	44,76	0,00	158,35	0,00	475,45
12	Jawa Barat	195/Kpts-II/2003	04 Juli 2003	0,00	132.180,00	132.180,00	291.306,00	190.152,00	202.965,00	0,00	816.603,00
13	Jawa Tengah	359/Menlh-1/2004	01 Oktober 2004	110.117,00	16.413,00	126.530,00	84.430,00	183.380,00	362.360,00	0,00	647.133,00
14	D.I.Yogyakarta	171/Kpts-II/2000	29 Juni 2000	0,00	910,34	910,34	2.057,90	0,00	13.851,28	0,00	16.819,52
15	Jawa Timur	395/Menlh-1/2011	21 Juli 2011	3.506,00	230.126,00	233.632,00	344.742,00	0,00	782.772,00	0,00	1.357.640,00
16	Banten	419/Kpts-II/1999	15 Juni 1999	51.487,00	112.991,00	164.458,00	12.359,00	49.439,00	26.998,00	0,00	201.787,00
17	Bali	433/Kpts-III/1999	15 Juni 1999	3.415,00	22.878,59	26.293,59	95.766,06	6.719,26	0,00	127.271,01	130.686,01
18	N.T.B	270/MENLHK/SETJENPLA/2/6/2017	05 Juni 2017	11.121,00	167.913,00	179.034,00	430.485,00	286.700,00	150.740,00	0,00	1.035.838,00
19	N.T.T	357/Menlhk/1/2016	11 Mei 2016	256.482,00	264.930,00	521.412,00	684.572,00	169.707,00	288.214,00	78.494,00	1.485.917,00
20	Kalimantan Barat	733/Menlh-1/2014	02 September 2014	190.945,00	1.430.101,00	1.621.046,00	2.310.874,00	2.132.398,00	2.121.365,00	197.918,00	8.198.656,00
21	Kalimantan Tengah	529/Menlh-1/2012	25 September 2012	22.542,00	1.608.286,00	1.630.828,00	1.346.066,00	3.317.461,00	3.881.817,00	2.543.535,00	12.697.165,00
22	Kalimantan Selatan	435/Menlh-1/2009	23 Juli 2009	0,00	213.285,00	213.285,00	526.425,00	126.660,00	762.188,00	151.424,00	1.779.982,00
23	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	278/MENLHK/SETJENPLA/2/6/2017	09 Juni 2017	0,00	1.704.666,00	1.704.666,00	2.848.243,00	5.045.164,45	4.040.673,32	194.365,88	13.833.112,65
24	Sulawesi Utara	734/Menlh-1/2014	02 September 2014	69.800,00	245.165,00	314.965,00	161.784,00	208.927,00	64.367,00	14.696,00	694.939,00
25	Sulawesi Tengah	869/Menlh-1/2014	29 September 2014	340.119,00	648.374,00	988.493,00	1.276.087,00	1.390.971,00	401.814,00	217.322,00	3.934.568,00
26	Sulawesi Selatan	434/Menlh-1/2009	23 Juli 2009	606.804,00	244.463,00	851.267,00	1.232.683,00	494.846,00	124.024,00	22.976,00	2.118.992,00
27	Sulawesi Tenggara	465/Menlh-1/2011	09 Agustus 2011	1.504.160,00	282.924,00	1.787.084,00	1.081.489,00	466.854,00	401.581,00	93.571,00	2.326.419,00
28	Gorontalo	325/Menlh-1/2010	25 Mei 2010	0,00	196.653,00	196.653,00	204.608,00	251.097,00	89.879,00	82.431,00	824.668,00
29	Sulawesi Barat	862/Menlh-1/2014	29 September 2014	0,00	215.190,00	452.030,00	330.700,00	71.859,00	22.597,00	1.092.376,00	1.678.718
30	Maluku	854/Menlh-1/2014	29 September 2014	9.208,00	420.330,00	429.538,00	627.256,00	894.258,00	643.699,00	1.324.866,00	3.919.617,00
31	Maluku Utara	302/Menlh-1/2013	01 Mei 2013	0,00	218.499,00	218.499,00	666.851,00	481.730,00	564.082,00	2.515.220,00	3.198.250
32	Papua Barat	783/Menlh-1/2014	22 September 2014	928.350,00	1.711.908,00	2.640.258,00	1.631.589,00	1.778.480,00	1.474.650,00	8.784.787,00	9.713.137,00
33	Papua	782/Menlh-1/2012	27 Desember 2012	1.019.017,00	6.736.267,00	7.755.284,00	5.961.240,00	4.739.327,00	4.116.365,00	29.368.482,00	30.387.489,00
									Jumlah		
				5.321.321,00	22.108.831,00	27.430.152,00	29.861.315,37	26.787.910,70	29.220.318,67	12.822.778,99	120.601.155,73
											191.357.868,00
											63,0

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penataan Kawasan Hutan, Data s.d Agustus 2017
Cataatan: Luas kawasan hutan perfungsidi cida sarkar/mencuplik pada lembar SK kawasan hutan yang di terbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (www.bps.co.id)

TABEL II.2. PERKEMBANGAN PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN

No		s.d Tahun 2016 (KM)				Target 2017 (KM)				Januari-Agustus 2017 (KM)				s.d September 2017 (KM)	
		BL	BF	BL	BF	BL	BF	BL	BF	BL	BF	BL	BF	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	Aceh	4.749,18	1.233,43	176,00	24,00	0,00	0,00	4.749,18	1.233,43						
2	Sumatera Utara	8.602,26	2.002,11	361,00	0,00	0,00	0,00	8.602,26	2.002,11						
3	Sumatera Barat	3.914,23	1.589,66	41,00	0,00	0,00	0,00	3.914,23	1.589,66						
4	Riau	9.177,18	1.520,54	173,00	0,00	205,18	0,00	9.382,36	1.520,54						
5	Jambi	3.731,78	800,17	1,55	3,85	0,00	0,00	3.731,78	800,17						
6	Sumatera Selatan	4.813,76	1.044,38	176,00	32,00	76,00	32,00	4.889,76	1.076,58						
7	Bengkulu	1.663,49	489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,49	489,85						
8	Lampung	3.273,02	25,01	82,00	0,00	0,00	0,00	3.273,02	25,01						
9	Kep. Bangka Belitung	648,51	77,42	17,90	0,00	0,00	0,00	648,51	77,42						
10	Kepulauan Riau	1.200,23	861,91	300,00	0,00	0,00	0,00	1.200,23	861,91						
11	DKI Jakarta	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00						
12	Jawa Barat	20.212,85	17,27	12,00	0,00	0,00	0,00	20.212,85	17,27						
13	Jawa Tengah	19.064,65	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	19.064,65	2,30						
14	D.I. Yogyakarta	276,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,28	0,00						
15	Jawa Timur	19.394,80	43,56	0,00	0,84	0,00	0,00	19.394,80	43,56						
16	Banten	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	0,00						
17	Bali	1.610,00	208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	208,97						
18	Nusa Tenggara Barat	4.806,47	856,16	0,00	12,00	0,00	0,00	4.806,47	856,16						
19	Nusa Tenggara Timur	5.579,34	13,30	128,00	0,00	127,91	0,00	5.707,25	13,30						
20	Kalimantan Barat	10.462,51	8.697,87	116,00	180,80	100,20	158,90	10.562,71	8.856,77						
21	Kalimantan Tengah	4.258,54	3.755,67	388,20	0,00	765,66	0,00	5.024,20	3.755,67						
22	Kalimantan Selatan	11.633,63	3.435,48	108,00	21,00	184,37	0,00	11.818,00	3.435,48						
23	Kalimantan Timur	9.764,16	11.282,94	208,50	41,50	0,00	0,00	9.764,16	11.282,94						
24	Sulawesi Utara	2.838,06	7.773,10	32,88	0,00	31,37	0,00	2.869,43	7.773,10						
25	Sulawesi Tengah	11.661,67	6.614,62	292,95	27,46	312,59	0,00	11.974,26	6.614,62						
26	Sulawesi Selatan	710,63	1.653,77	62,00	0,00	65,51	0,00	776,14	1.653,77						
27	Sulawesi Tenggara	5.789,45	4.228,80	218,00	0,00	218,00	0,00	6.007,45	4.228,80						
28	Gorontalo	6.130,86	1.018,40	13,00	0,00	0,00	0,00	6.130,86	1.018,40						
29	Sulawesi Barat	913,85	1.331,93	106,00	0,00	105,24	0,00	1.019,09	1.331,93						
30	Maluku	7.913,28	4.000,41	77,00	0,00	0,00	0,00	7.913,28	4.000,41						
31	Maluku Utara	494,66	2.137,95	240,71	25,63	28,67	25,63	523,33	2.163,58						
32	Papua Barat	1.711,54	3.201,60	232,00	31,00	0,00	0,00	1.711,54	3.201,60						
33	Papua	12.007,39	11.890,90	85,00	58,00	99,28	0,00	12.106,67	11.890,80						
	JUMLAH	199.099,17	81.807,28	3.650,85	458,08	2.319,98	218,83	201.419,15	82.026,11						

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d September 2017

TABEL II.3. PERKEMBANGAN PENGESAHAN BERITA ACARA TATA BATAS

NO	PROVINSI	s/d Tahun 2016			Januari-Agustus 2017			REALISASI			s.d September 2017		
		BA	KM	BA	KM	BA	KM	BA	KM	BA	KM	BA	KM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	9	10
1	Aceh	89	6.056	95	6.134	0	0	184	12.190				
2	Sumatera Utara	100	13.331	114	13.729	0	0	214	27.061				
3	Sumatera Barat	177	6.449	181	6.494	0	0	358	12.942				
4	Riau	127	12.000	130	12.122	0	0	257	24.123				
5	Jambi	152	129.413	97	26.660	0	0	249	156.072				
6	Sumatera Selatan	197	7.747	197	7.747	0	0	394	15.494				
7	Bengkulu	120	2.467	120	2.467	0	0	240	4.934				
8	Lampung	80	4.167	80	4.167	0	0	160	8.333				
9	Kep. Bangka Belitung	75	51.475	51	642	0	0	126	52.117				
10	Kepulauan Riau	8	116	9	760	0	0	17	876				
11	DKI Jakarta	7	0	0	0	0	0	7	0				
12	Jawa Barat	135	576	5	21	0	0	140	597				
13	Jawa Tengah	58	101	3	4	0	0	61	105				
14	D.I. Yogyakarta	5	0	0	0	0	0	5	0				
15	Jawa Timur	35	538	4	197	2	2	71	737				
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	Bali	40	1.626	0	0	0	0	40	1.626				
18	Nusa Tenggara Barat	100	5.366	0	0	0	0	100	5.366				
19	Nusa Tenggara Timur	118	7.434	18	400	0	0	136	7.834				
20	Kalimantan Barat	541	43.447	297	16.011	0	0	838	59.458				
21	Kalimantan Tengah	137	13.984	89	5.865	0	0	226	19.849				
22	Kalimantan Selatan	140	11.956	89	4.878	0	0	229	16.835				
23	Kalimantan Timur	576	54.236	313	19.409	0	0	889	73.645				
24	Sulawesi Utara	81	7.133	81	7.133	0	0	162	14.266				
25	Sulawesi Tengah	272	15.586	272	15.586	0	0	544	31.173				
26	Sulawesi Selatan	142	10.490	142	10.490	0	0	284	20.981				
27	Sulawesi Tenggara	130	11.644	130	11.644	0	0	260	23.287				
28	Gorontalo	59	1.720	59	1.720	0	0	118	3.440				
29	Sulawesi Barat	12	1.407	12	1.407	0	0	24	2.813				
30	Maluku	190	9.690	19	424	0	0	209	10.114				
31	Maluku Utara	43	1.506	25	468	0	0	68	1.974				
32	Papua Barat	192	16.262	192	16.262	0	0	384	32.525				
33	Papua	131	12.033	131	12.033	0	0	262	24.066				
	JUMLAH	4.269	459.955	2.955	204.876	2	2	7.256	664.833				

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s.d September 2017

TABEL II.4. PERKEMBANGAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2016				Januari s.d Agustus 2017				September 2017				s.d September 2017	
		Unit	(Ha)	Unit	(Ha)	Unit	(Ha)	Unit	(Ha)	Unit	(Ha)	Unit	(Ha)	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8							15	919.633,15
1	Aceh	15	919.633,15	0	0	0	0							15	919.633,15
2	Bali	25	138.762,19	0	0	0	0							25	138.762,19
3	Bangka Belitung	80	530.196,55	4	830,84	0	0							84	531.027,39
4	Banten	20	199.704,43	0	0	0	0							20	199.704,43
5	Bengkulu	52	685.099,56	0	0	0	0							52	685.099,56
6	DI. Yogyakarta	9	8.860,94	0	0	0	0							9	8.860,94
7	DKI. Jakarta	4	107.856,20	0	0	0	0							4	107.856,20
8	Gorontalo	31	774.116,56	0	0	0	0							31	774.116,56
9	Jambi	46	1.733.373,16	1	18740,32	0	0							47	1751513,48
10	Jawa Barat	112	885.089,05	13	64.182,36	0	0							125	949.271,41
11	Jawa Tengah	130	739.114,57	3	4,07	0	0							133	759.118,64
12	Jawa Timur	118	746.952,30	2	5,46	2	5,5712							122	746.957,76
13	Kalimantan Barat	154	6.094.987,62	0	0	0	0							154	6.094.987,62
14	Kalimantan Selatan	41	1.535.951,65	0	0	0	0							41	1.535.951,65
15	Kalimantan Tengah	25	3.742.721,25	3	40.543,91	0	0							28	3.783.265,16
16	Kalimantan Timur	82	3.289.656,96	0	0	0	0							82	3.269.656,96
17	Kalimantan Utara	19	8.007.037,45	2	73.792,49	0	0							21	8.080.829,94
18	Kep. Riau	27	104.105,77	0	0	0	0							27	104.105,77
19	Lampung	28	574.893,53	1	28343,91	0	0							29	603237,44
20	Maluku	112	2.660.495,99	0	0	0	0							112	2.660.495,99
21	Maluku Utara	55	1.346.525,27	0	0	0	0							55	1.346.525,27
22	Nusa Tenggara Barat	63	1.165.161,55	1	869,95	0	0							64	1.166.031,50
23	Nusa Tenggara Timur	129	826.285,02	0	0	0	0							129	826.285,02
24	Papua	93	24.686.884,00	0	0	0	0							93	24.685.430,50
25	Papua Barat	38	6.660.805,04	1	1.453.500,00	0	0							39	8.114.305,04
26	Riau	47	2.053.585,97	0	0	0	0							47	2.053.585,97
27	Sulawesi Barat	18	999.1783,51	0	0	0	0							18	999.183,51
28	Sulawesi Selatan	68	2.035.298,50	0	0	0	0							68	2.035.298,50
29	Sulawesi Tengah	63	2.773.097,35	0	0	0	0							63	2.773.097,35
30	Sulawesi Tengara	47	3.264.102,99	0	0	0	0							47	3.264.102,99
31	Sulawesi Utara	63	406.237,25	0	0	0	0							63	406.237,25
32	Sumatera Barat	51	1.404.320,96	0	0	0	0							51	1.404.320,96
33	Sumatera Selatan	54	3.013.343,62	0	0	0	0							54	3.013.343,62
34	Sumatera Utara	41	1.725.266,43	0	0	0	0							41	1.725.266,43
	JUMLAH	1960	85.838.606,34	31	1.680.213,31	2	5,57							1.993	87.517.366,15

Sumber: Direktorat Pengelolaan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d September 2017

TABEL II.5. PERKEMBANGAN TATA BATAS IUPHHK-HA

NO	PROVINSI	s.d TAHUN 2016			Januari-Agustus 2017			REALISASI 2017			s.d September 2017		
		(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	(km)	(km)
1	Aceh	2	3	2.474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,12	
2	Sumatera Utara			2.026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,78	
3	Sumatera Barat			1.698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,74	
4	Riau			7.648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,64	
5	Jambi			3.161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,87	
6	Sumatera Selatan			2.554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,95	
7	Bengkulu			356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,98	
8	Lampung			52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	
9	Kep. Bangka Belitung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Kepulauan Riau			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	DKI Jakarta			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Jawa Barat			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Jawa Tengah			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	D.I. Yogyakarta			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Jawa Timur			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Banten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Bali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Nusa Tenggara Barat			457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,78	
19	Nusa Tenggara Timur			9.777,92	294,87	294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.072,79	
20	Kalimantan Barat			14.484,00	841,76	841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.325,76	
21	Kalimantan Timur			1.559,10	115,13	115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,23	
22	Kalimantan Selatan			14.901,83	815,86	815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.717,69	
23	Kalimantan Tengah			90,12	90,12	90,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,24	
24	Kalimantan Utara			1.613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,78	
25	Sulawesi Utara			3.852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,04	
26	Sulawesi Tengah			1.188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,61	
27	Sulawesi Selatan			920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,05	
28	Sulawesi Tenggara			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Gorontalo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Sulawesi Barat			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Maluku			7.275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,38	
32	Maluku Utara			246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,47	
33	Papua Barat			11.618,10	248,61	248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.618,10	
34	Papua			88.208,22	2.157,74	2.157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.385,96	

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s.d September 2017

TABEL II.6. PERKEMBANGAN TATA BATAS IUPHHK-HT

NO	PROVINSI	REALISASI 2017			
		s.d Tahun 2016 (km)	Januari-Agustus 2017 (km)	September 2017 (km)	
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	1.066,00	0,00	0,00	1.066,00
2	Sumatera Utara	2.035,92	0,00	0,00	2.035,92
3	Sumatera Barat	2.189,16	0,00	0,00	2.189,16
4	Riau	3.360,04	0,00	0,00	3.360,04
5	Jambi	1.369,04	0,00	0,00	1.369,04
6	Sumatera Selatan	2.190,60	0,00	0,00	2.190,60
7	Bengkulu	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Lampung	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kep. Bangka Belitung	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kepulauan Riau	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Jawa Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Jawa Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
14	D.I. Yogyakarta	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jawa Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Banten	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Bali	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	231,47	0,00	0,00	231,47
19	Nusa Tenggara Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Kalimantan Barat	871,19	1.227,30	0,00	2.098,49
21	Kalimantan Timur	2.891,71	519,73	0,00	3.411,49
22	Kalimantan Selatan	581,68	115,13	0,00	696,81
23	Kalimantan Tengah	581,81	403,46	0,00	985,27
24	Sulawesi Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sulawesi Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sulawesi Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Sulawesi Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Gorontalo	101,32	56,39	0,00	157,71
29	Sulawesi Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Maluku	162,00	0,00	0,00	162,00
31	Maluku Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Papua Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Papua	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		17.631,94	2.322,06	0,00	19.954,00

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d September 2017

TABEL II.7. PERUBAHAN FUNGSI

1). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) MENUJU KAWASAN KONSERVASI (KK)

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2016			Tahun 2017			s.d Tahun 2017 (ha)
			(ha)			(ha)			(ha)			(ha)					
1	NAD	2	3		4			5			6			7			8
1	Sumatera Utara			70.755,00													70.755,00
2	Sumatera Barat			-				-			-			-			-
3	Riau			40.390,00				-			-			-			40.390,00
5	Kepulauan Riau			-				-			-			-			-
6	Jambi			-				-			-			-			-
7	Bengkulu			-				-			-			-			-
8	Kep. Bangka Belitung			-				-			-			-			-
9	Sumatera Selatan			-				-			-			-			-
10	Lampung			-				-			-			-			-
11	DKI Jakarta			-				-			-			-			-
12	Jawa Barat			32.685,70				-			-			-			32.685,70
13	Banten			-				-			-			-			-
14	Jawa Tengah			11.075,56				-			-			-			11.075,56
15	D.I. Yogyakarta			1.000,66				-			-			-			1.000,66
16	Jawa Timur			-				-			-			-			-
17	Bali			-				-			-			-			-
18	Nusa Tenggara Barat			3.155,00				-			-			-			3.155,00
19	Nusa Tenggara Timur			-				-			-			-			-
20	Kalimantan Barat			-				-			-			-			-
21	Kalimantan Tengah			-				-			-			-			-
22	Kalimantan Timur			-				-			-			-			-
23	Kalimantan Selatan			-				-			-			-			-
24	Kalimantan Utara			-				-			-			-			-
25	Corontado			-				-			-			-			-
26	Sulawesi Utara			-				-			-			-			-
27	Sulawesi Tengah			10.659,00				-			-			-			10.659,00
28	Sulawesi Selatan			22.063,10				-			-			-			22.063,10
29	Sulawesi Tenggara			4.000,00				-			-			-			4.000,00
30	Sulawesi Barat			-				-			-			-			-
31	Maluku			-				-			-			-			-
32	Maluku Utara			153.575,00				-			-			-			153.575,00
33	Papua			-				-			-			-			-
34	Papua Barat			-				-			-			-			-
JUMLAH				349.359,02				-			-			-			349.359,02

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penilaiangunaan Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7. PERUBAHAN FUNGSI

2). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN LINDUNG (HL) MENJADI HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		s.d Tahun 2017 (ha)
			(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)	
1	NAD	2	3	2.725,00	-	4	5	6	7	8	-	-	-	2.725,00
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167,40
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	6.351,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.351,22
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583,00
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	5.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.170,00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	2.990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.155,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	8.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.750,00
22	Kalimantan Timur	2.460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.460,00
23	Kalimantan Selatan	11.245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.926,54
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Corontado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295,40
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.185
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.185,00
JUMLAH		40.274,22			681,54		2.237,40			349,70		83.185,00		126.727,86

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penilaian Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7. PERUBAHAN FUNGSI

3). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) MENJADI HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)	
1	NAD	2	3	4		5		6		7		8	
1	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Riau	20.290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.290,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	55,00	-	-	-	-	-	-	55,00
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.958,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	48.021,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.021,12
21	Kalimantan Tengah	53.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.125,00
22	Kalimantan Timur	59.285,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.285,00
23	Kalimantan Selatan	55.950,00	57,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.007,21
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Corontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	959,71
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	1962,75	-	-	-	-	-	-	1.962,75
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	6549,76	-	-	-	-	-	-	6.549,76
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.599,00
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.137,00
JUMLAH		236.671,12	8569,72	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	294.949,55
Sumbar: Direktorat Pengukuran dan Penilaian Kawasan Hutan, Data s.d November 2017		46.695,71	2.958,00	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	294.949,55

Keterangan :
 - : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7. PERUBAHAN FUNGSI

4). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) MENJADI KAWASAN KONSERVASI

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		s.d Tahun 2017 (ha)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	6.163,75												6.163,75
3	Sumatera Barat	-												-
4	Riau	137.376,00												137.376,00
5	Kepulauan Riau	-												-
6	Jambi	20.700,00												20.700,00
7	Bengkulu	-												-
8	Kep. Bangka Belitung	-												-
9	Sumatera Selatan	-												-
10	Lampung	-												-
11	DKI Jakarta	-												-
12	Jawa Barat	41.025,56												41.025,56
13	Banten	-												-
14	Jawa Tengah	-												-
15	D.I. Yogyakarta	-												-
16	Jawa Timur	-												-
17	Bali	-												-
18	Nusa Tenggara Barat	-												-
19	Nusa Tenggara Timur	-												-
20	Kalimantan Barat	-												-
21	Kalimantan Tengah	-												649,00
22	Kalimantan Timur	-												-
23	Kalimantan Selatan	-												-
24	Kalimantan Utara	-												-
25	Corontado	-												-
26	Sulawesi Utara	-												-
27	Sulawesi Tengah	193,00												193,00
28	Sulawesi Selatan	145,00												145,00
29	Sulawesi Tenggara	-												-
30	Sulawesi Barat	-												-
31	Maluku	-												-
32	Maluku Utara	7.650,00												7.650,00
33	Papua	-												-
34	Papua Barat	-												-
JUMLAH		213.253,31												213.902,31
														649,00

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan :
- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7. PERUBAHAN FUNGSI

5). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) MENJADI HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKOBVERSI (HPK)

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		s.d Tahun 2017
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	
1	NAD	-	-	4	-	5	-	6	-	7	-	8	-	9
2	Sumatera Utara	14.747,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.747,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	13.388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.388,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Corontado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	234,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,50
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	3.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200,00
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	1.030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.030,00
JUMLAH		32.599,50	-		33.817,93									

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7. PERUBAHAN FUNGSI

6). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) MENJADI HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)

NO	PROVINSI	SID TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		SID TAHUN 2017
			(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	213.221,00												213.221,00
3	Sumatera Barat	11.148,00												11.148,00
4	Riau	194.440,00												194.440,00
5	Kepulauan Riau	342,82												342,82
6	Jambi	-												-
7	Bengkulu	-												-
8	Kep. Bangka Belitung	-												-
9	Sumatera Selatan	-												-
10	Lampung	-												-
11	DKI Jakarta	-												-
12	Jawa Barat	-												-
13	Banten	-												-
14	Jawa Tengah	-												-
15	D.I. Yogyakarta	-												-
16	Jawa Timur	-												-
17	Bali	-												-
18	Nusa Tenggara Barat	2.710,00												2.710,00
19	Nusa Tenggara Timur	-												-
20	Kalimantan Barat	-												-
21	Kalimantan Tengah	20.160,00												20.160,00
22	Kalimantan Timur	77.010,00												77.010,00
23	Kalimantan Selatan	31.790,00												31.790,00
24	Kalimantan Utara	-												-
25	Corontado	-												-
26	Sulawesi Utara	-												-
27	Sulawesi Tengah	-												-
28	Sulawesi Selatan	-												-
29	Sulawesi Tenggara	-												-
30	Sulawesi Barat	-												-
31	Maluku	-												-
32	Maluku Utara	-												-
33	Papua	-												-
34	Papua Barat	-												-
JUMLAH		550.821,82												550.821,82

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan :
- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7. PERUBAHAN FUNGSI

7). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) MEMJADI HUTAN LINDUNG (HL)

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		s.d Tahun 2017 (ha)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	14.780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.780,00
5	Kepulauan Riau	12.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.950,00
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	133.075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.075,00
22	Kalimantan Timur	31.695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.695,00
23	Kalimantan Selatan	5.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.900,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Corontado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	198.390,00												198.390,00

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan :
- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7. PERUBAHAN FUNGSI

8. PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) MENJADI KAWASAN KONSERVASI (KK)

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			s.d Tahun 2017		
		2	3	(ha)	4	(ha)	5	(ha)	6	(ha)	7	(ha)	8	(ha)	9	(ha)	8	(ha)	9	(ha)	9	(ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	43.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.100,00	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.242,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	25.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.560,00
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	24.804,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.804,80
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617,00
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	352,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352,62
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	600.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.250,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	11.759,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.759,00
28	Sulawesi Selatan	10.355,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.355,00
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	6.075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.075,00
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		722.873,42			-			-			-			-			3.242,00			726.115,42		

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7. PERUBAHAN FUNGSI

9). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) MENJADI HUTAN LINDUNG (HL)

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		s.d Tahun 2017 (ha)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Corontado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		77.595,00										77.595,00		

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7. PERUBAHAN FUNGSI

10). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) MENJADI HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		s.d Tahun 2017 (ha)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Riau	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Kalimantan Timur	59.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.120,00	
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Corontado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH		60.320,00										60.320,00			

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan :
- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7. PERUBAHAN FUNGSI

11). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) MENJADI HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK)

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		s.d Tahun 2017
		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		
1	NAD	-		4		5		6		7		8		9
2	Sumatera Utara	800,00		-		-		-		-		-		-
3	Sumatera Barat	9.840,00		-		-		-		-		-		800,00
4	Riau	6.000,00		-		-		-		-		-		9.840,00
5	Kepulauan Riau	-		-		-		-		-		-		6.000,00
6	Jambi	-		-		-		-		-		-		-
7	Bengkulu	-		-		-		-		-		-		-
8	Kep. Bangka Belitung	-		-		-		-		-		-		-
9	Sumatera Selatan	29.924,85		-		-		-		-		-		29.924,85
10	Lampung	-		-		-		-		-		-		-
11	DKI Jakarta	-		-		-		-		-		-		-
12	Jawa Barat	-		-		-		-		-		-		-
13	Banten	-		-		-		-		-		-		-
14	Jawa Tengah	-		-		-		-		-		-		-
15	D.I. Yogyakarta	-		-		-		-		-		-		-
16	Jawa Timur	-		-		-		-		-		-		-
17	Bali	-		-		-		-		-		-		-
18	Nusa Tenggara Barat	-		-		-		-		-		-		-
19	Nusa Tenggara Timur	-		-		-		-		-		-		-
20	Kalimantan Barat	-		-		-		-		-		-		-
21	Kalimantan Tengah	261,00		-		-		-		-		-		76.793,00
22	Kalimantan Timur	-		-		-		-		-		-		-
23	Kalimantan Selatan	6.303,00		-		-		-		-		-		14.033,57
24	Kalimantan Utara	-		-		-		-		-		-		-
25	Corontado	-		-		-		-		-		-		-
26	Sulawesi Utara	-		-		-		-		-		-		-
27	Sulawesi Tengah	-		-		-		-		-		-		-
28	Sulawesi Selatan	64,00		-		-		-		-		-		64,00
29	Sulawesi Tenggara	-		-		-		-		-		-		-
30	Sulawesi Barat	3.915,00		-		-		-		-		-		3.915,00
31	Maluku	-		-		-		-		-		-		-
32	Maluku Utara	-		-		-		-		-		-		-
33	Papua	-		-		-		-		-		-		-
34	Papua Barat	2.436,00		-		-		-		-		-		2.436,00
JUMLAH		59.543,85		-		7.730,57		76.532,00		-		143.806,42		143.806,42

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penilaian Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7. PERUBAHAN FUNGSI

12). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) MENJADI KAWASAN KONSERVASI (KK)

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		s.d Tahun 2017
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	
1	NAD	2	3	4	5	6	7	8	9	-	-	-	-	-
1	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Riau	5.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.920,00
4	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Tengah	58.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.747,00
21	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Sumatera Tengah	3.221,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.221,00
25	Corontado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		67.591,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.888,00
Sumber: Direktorat Pengkajian dan Penelitian Kawasan Hutan, Data s.d November 2017														

Keterangan :
- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7. PERUBAHAN FUNGSI

12). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) MENJADI HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		s.d Tahun 2017
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	
1	2	3	-	4	-	5	-	6	-	7	-	8	-	9
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	12.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.150,00
4	Riau	49.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.700,00
5	Kepulauan Riau	3.902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.902,00
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	1.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.820,00
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Coronatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	18.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.445,00
30	Sulawesi Barat	9.125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.125,00
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	2.856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.856,00
JUMLAH		97.998,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.998,00

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penilaian Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7. PERUBAHAN FUNGSI

14). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) MENJADI HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		s.d Tahun 2017
		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)
1	NAD	2	3	4		5		6		7		8		9
1	Sumatera Utara		180											180.00
2	Sumatera Barat		25.381											29.486.00
3	Riau		133.238											133.238.00
4	Kepulauan Riau													-
5	Jambi													-
6	Bengkulu													-
7	Kep. Bangka Belitung													-
8	Sumatera Selatan													-
9	Lampung													-
10	DKI Jakarta													-
11	Jawa Barat													-
12	Banten													-
13	Jawa Tengah													-
14	D.I. Yogyakarta													-
15	Jawa Timur													-
16	Bali													-
17	Nusa Tenggara Barat													-
18	Nusa Tenggara Timur													-
19	Kalimantan Barat		15.270											15.269.75
20	Kalimantan Tengah		84.948											84.948.00
21	Kalimantan Timur		53.760											53.760.00
22	Kalimantan Selatan		38.630											38.630.00
23	Kalimantan Utara													-
24	Corontado													-
25	Sulawesi Utara													-
26	Sulawesi Tengah		17.555											17.555.00
27	Sulawesi Tenggara													-
28	Sulawesi Selatan													-
29	Sulawesi Barat													-
30	Maluku													-
31	Maluku Utara		2.860											2.860.00
32	Papua		234.730											324.681.00
33	Papua Barat		4.076											4.076.00
34	JUMLAH		610.627.75					4.105.00			89.951.00			704.683.75

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penilaian Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7. PERUBAHAN FUNGSI

15). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) MENJADI HUTAN LINDUNG (HL)

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		s.d Tahun 2017
		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		
1	2	3		4		5		6		7		8		9
1	NAD	-		-		-		-		-		-		-
2	Sumatera Utara	-		-		-		-		-		-		-
3	Sumatera Barat	-		-		-		-		-		-		-
4	Riau	-		-		-		-		-		-		-
5	Kepulauan Riau	21.750,00		-		-		-		-		-		21.750,00
6	Jambi	-		-		-		-		-		-		-
7	Bengkulu	-		-		-		-		-		-		-
8	Kep. Bangka Belitung	-		-		-		-		-		-		-
9	Sumatera Selatan	-		-		-		-		-		-		-
10	Lampung	-		-		-		-		-		-		-
11	DKI Jakarta	-		-		-		-		-		-		-
12	Jawa Barat	-		-		-		-		-		-		-
13	Banten	-		-		-		-		-		-		-
14	Jawa Tengah	-		-		-		-		-		-		-
15	D.I. Yogyakarta	-		-		-		-		-		-		-
16	Jawa Timur	-		-		-		-		-		-		-
17	Bali	-		-		-		-		-		-		-
18	Nusa Tenggara Barat	-		-		-		-		-		-		-
19	Nusa Tenggara Timur	-		-		-		-		-		-		-
20	Kalimantan Barat	79,75		-		-		-		-		-		79,75
21	Kalimantan Tengah	-		-		-		-		-		-		-
22	Kalimantan Timur	49.400,00		-		-		-		-		-		49.400,00
23	Kalimantan Selatan	-		-		-		-		-		-		-
24	Kalimantan Utara	-		-		-		-		-		-		-
25	Corontado	-		-		-		-		-		-		-
26	Sulawesi Utara	-		-		-		-		-		-		-
27	Sulawesi Tengah	-		-		-		-		-		-		-
28	Sulawesi Selatan	-		-		-		-		-		-		-
29	Sulawesi Tenggara	-		-		-		-		-		-		-
30	Sulawesi Barat	-		-		-		-		-		-		-
31	Maluku	-		-		-		-		-		-		-
32	Maluku Utara	-		-		-		-		-		-		-
33	Papua	-		-		-		-		-		-		6.572,00
34	Papua Barat	-		-		-		-		-		-		-
JUMLAH		71.229,75											6.572,00	77.801,75

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penilaian Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7. PERUBAHAN FUNGSI

16). PERKEMBANGAN MUTASI ANTAR KAWASAN KONSERVASI (KK)

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		s.d Tahun 2017 (ha)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	5.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.688,65
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.238,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	27.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425,50
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.625,50
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	14.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.295,75
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,50
15	D.I. Yogyakarta	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283,58
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.645,64
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	300.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.040,00
22	Kalimantan Timur	61.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.850,00
23	Kalimantan Selatan	7.564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.563,60
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Corontado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	24.669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.669,00
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	15.382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.381,90
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		456.978,98												555.908,75
JUMLAH		71.645,64												3.031,13
JUMLAH		28.253,00												28.253,00

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7. PERUBAHAN FUNGSI

17). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN KONSERVASI (KK) MENJADI HUTAN PRODUKSI (HP)

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		s.d Tahun 2017 (ha)
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Bengkulu	490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,00
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Kalimantan Selatan	27.500,00	-	94,89	-	-	745,00	-	-	-	-	-	-	28.339,89
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Corontado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH		27.990,00		94,89			745,00			4.158,00		4.158,00		32.987,89

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penilaian Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7. PERUBAHAN FUNGSI

19). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN KONSERVASI (KK) MENJADI HUTAN PRODUksi YANG DAPAT DIKONSERVASI (HPK)

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		s.d Tahun 2017 (ha)
		2	3	4	5	6	7	8	9					
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,95
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Corontado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		490,00		-		-		169,95		-		659,95		

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7. PERUBAHAN FUNGSI

19). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN KONSERVASI (KK) MENJADI HUTAN LINDUNG (HL)

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		s.d Tahun 2017
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	-	4	-	5	-	6	-	7	-	8	-	9
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Corontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-		-		-		-		-		3.738,00		285,55

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penilaian Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7. PERUBAHAN FUNGSI

20). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN KONSERVASI (KK) MENJADI HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		s.d Tahun 2017 (ha)
			(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)		(ha)	
1	NAD	2	3	4		5		6		7		8		9
1	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Corontado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH														9.819,55
JUMLAH														341,55

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.7. PERUBAHAN FUNGSI

2). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) MENJADI HUTAN PRODUKSI YANG DIKONVERSI (HPK)

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		s.d Tahun 2017
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386,50
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Corontado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,00	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271,00
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760,50	-

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.8. PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (TAHAP SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN)

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017		
		UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Acah	12	39.376,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	39.376,65		
2	Sumatera Utara	12	28.054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	28.054,00		
3	Sumatera Barat	10	17.433,85	-	-	-	-	-	-	1	900,75	-	-	-	-	11	18.334,60		
4	Riau	11	66.499,68	1	2.313,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	68.812,98		
5	Jambi	14	78.412,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	78.412,53		
6	Sumatera Selatan	30	121.222,46	3	918,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	122.140,80		
7	Bengkulu	5	14.327,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14.327,45		
8	Lampung	16	134.147,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	134.147,20		
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Kepulauan Riau	2	7.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.530,00		
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Java Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	Java Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Java Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Nusa Tenggara Barat	2	2.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.950,00		
19	Nusa Tenggara Timur	2	1.137,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.137,00		
20	Kalimantan Barat	17	28.804,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	28.804,72		
21	Kalimantan Tengah	30	68.511,52	3	2.266,65	1	609,70	-	-	-	-	-	-	-	-	34	71.387,87		
22	Kalimantan Selatan	9	31.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	31.916,00		
23	Kalimantan Timur	7	36.600,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	36.600,08		
24	Kalimantan Utara	2	3.291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.291,00		
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Sulawesi Tengah	17	20.341,29	1	1.216,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	21.558,15		
27	Sulawesi Selatan	6	4.015,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4.015,35		
28	Sulawesi Tenggara	21	37.035,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	37.035,71		
29	Gorontalo	3	5.089,56	-	-	-	-	-	-	1	571,74	-	-	-	-	4	5.661,30		
30	Sulawesi Barat	2	2.486,00	-	-	-	-	-	-	1	1244,78	-	-	-	-	3	3.730,78		
31	Maluku	3	5.664,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5.664,58		
32	Maluku Utara	10	19.099,05	1	555,09	-	-	-	-	1	1057,16	-	-	-	-	12	20.711,30		
33	Papua	15	92.303,95	-	-	1	32,75	-	-	-	-	1	195,76	-	-	17	92.532,46		
34	Papua Barat	7	15.319,38	1	1.078,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16.397,74		
	JUMLAH	265	881.569,01	10	8.348,60	2	642,45	-	4	3.774,43	1	195,76	282	894.530,25					

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.9. PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN/PERTANIAN (TAHAP SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN)

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		
		UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Aceh	58	265.743,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	
2	Sumatera Utara	27	142.762,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	
3	Sumatera Barat	26	157.956,37	-	-	1	6.429,52	-	-	1	5.370,25	-	-	
4	Riau	136	1.541.536,70	1	5.543,00	2	8.061,60	1	3.393,00	-	-	-	140	
5	Jambi	44	366.925,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	
6	Sumatera Selatan	34	328.188,28	6	14.628,36	3	15.503,63	-	-	2	5.259,85	2	54.267,91	
7	Bengkulu	11	57.581,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
8	Lampung	8	83.964,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kepulauan Riau	8	55.333,03	-	-	1	9.694,84	-	-	-	-	-	9	
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Nusa Tenggara Barat	3	846,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Kalimantan Barat	20	241.540,14	1	16.999,20	3	14.732,43	2	5.427,30	-	-	-	26	
21	Kalimantan Tengah	64	703.647,18	11	81.093,79	14	111.622,20	4	26.421,68	7	26.772,94	3	15.890,67	
22	Kalimantan Selatan	17	209.130,53	1	5.074,30	-	-	-	-	-	1	7.231,96	19	
23	Kalimantan Timur	51	437.115,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	
24	Kalimantan Utara	6	57.359,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
25	Sulawesi Utara	1	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
26	Sulawesi Tengah	9	78.532,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
27	Sulawesi Selatan	3	4.584,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
28	Sulawesi Tenggara	3	20.784,20	-	-	-	-	-	-	1	4.003,45	-	4	
29	GORONTALO	5	53.966,68	-	-	1	8.863,00	-	-	-	-	-	6	
30	Sulawesi Barat	10	103.776,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
31	Maluku	12	12.657,74	-	1	386,33	-	-	-	-	-	-	13	
32	Maluku Utara	10	48.544,94	-	1	11.404,20	-	-	-	-	-	-	11	
33	Papua	25	664.741,94	1	37.467,00	9	192.850,49	-	1	12.245,30	2	23.981,91	38	
34	Papua Barat	11	181.595,81	2	55.696,20	6	115.460,33	2	31.974,0	-	1	28.838,82	22	
	JUMLAH	602	5.820.817	23	216.501,85	42	495.008,57	9	67.159,38	12	53.652,29	9	130.241,27	697

Sumber: Direktorat Pengelolaan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL II.10. PERKEMBANGAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN

NO	PROVINSI	s.d Tahun 2012				Tahun 2013				Tahun 2014				Tahun 2015				Tahun 2016				Tahun 2017											
		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar									
		Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
1	Acara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	Sumatera Utara	1	277,30	1	271,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.571,00	1	12.781,10	1	480	1	480,11	3	14.328,30	3	13.532,31				
3	Sumatera Barat	1	13.414,30	1	13.414,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13.414,00	1	13.414,00			
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8	Lampung	1	90,00	1	30,00	-	-	-	-	-	1	1.373,67	-	1	1.373,67	1	1.308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.837,34	2	1.338,00			
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Kepulauan Riau	1	850,50	1	119,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	850,50	1	119,60			
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	Jawa Barat	7	5.147,93	7	1.008,94	2	10,15	2	6,85	1	110,80	1	110,79	1	10,00	1	10,28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	90,40	1	45,04	12	5.369,28	12	1.181,90
13	Jawa Tengah	6	234,40	5	65,04	-	-	-	-	-	1	127,82	1	56,85	-	-	-	-	1	177,8	1	163,9	-	-	-	8	540,02	7	285,79				
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	Jawa Timur	20	1.633,99	19	1.079,90	3	139,08	3	72,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	79,52	4	61,17	3	10,980	3	10,578	30	1.863,57	29	1.224,23			
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	Bali	15	103,00	15	76,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	84,14	1	62,14	-	-	-	-	-	-	-	16	187,14	16	138,14	
18	NTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
19	NTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22	Kalimantan Selatan	2	1.198,00	1	578,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.198,00	1	578,80			
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	JUMLAH	54	22.949,12	51	16.643,38	5	149,23	3	79,43	3	1.612,29	2	167,64	3	1.467,81	3	1.380,42	6	13.828,32	6	13.006,17	5	581	5	536	76	40.588,15	72	31.812,76				

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

TABEL II.11. PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN/PERTANIAN (TAHAP SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN) PER KOMODITI

NO	PERUNTUKAN	KOMODITI	TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017			s.d TAHUN 2017
			UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	FASUM/FASOS/RELIGI	LOKASI PEMAKAMAN, PARIWISATA ALAM	-	-	2	129,44	-	-	2	129,44	-	-
2	FOOD ESTATE	TEBU PADI	-	13	251.334,75	1	4.003,45	14	255.338,20	-	-	14
3		PALAWIJA, PADI, JAGUNG, KACANG KEDELAI	-	1	2.614,00	0	0	1	2.614,00	-	-	1
4	INDUSTRI	PAFRIK KELAPA SAWIT	-	-	-	-	-	-	-	1	17.892,03	1
5		PAFRIK PULP DAN PEMUKIMAN	-	1	1.200,00	-	-	1	99,77	-	-	1
6		PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU	-	1	341,22	-	-	1	341,22	-	-	1
7		PEMBANGUNAN PABRIK	-	1	227,29	-	-	1	227,29	-	-	1
8		PENAMPUNGAN SISA TAMBANG	-	1	33.982,00	-	-	1	33.982,00	-	-	1
9		PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN DAN SARANA PRASARANA	-	1	1.432,22	-	-	1	1.432,22	-	-	1
10		SARANA INDUSTRI PULP DAN KERTAS	-	1	1.348,00	-	-	1	1.348,00	-	-	1
11		PERKEMBANGAN INDUSTRI TERPADU	1	3.393,00	2	7.653,56	-	2	7.653,56	-	-	2
12		PERKEMBANGAN PARIWISATA	-	1	21.829,12	-	-	1	21.829,12	-	-	1
13	LAIN-LAIN	PENGEMBANGAN WILAYAH	-	1	17.203,00	1	5.370,25	2	22.573,25	-	-	2
14		PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN, JALUR TRANSMISI PLTU DAN FASILITAS PENUNJANG LAINNYA	-	1	735	-	-	1	735	-	-	1
15	PERIKANAN		-	1	7.864,84	-	-	1	7.864,84	-	-	1
16		TAMBAK INTIRAKYAT	-	1	607,00	-	-	1	607,00	-	-	1
17		TAMBAK UDANG	-	1	200,00	-	-	1	200,00	-	-	1
18	PERKEBUNAN	COKLAT	-	13	137.169,62	-	-	13	137.169,62	-	-	13
19		COKLAT DAN BUAH-BUAHAN	-	1	500,00	-	-	1	500,00	-	-	1
20		COKLAT, LADA, TANAMAN PANGAN	-	1	8.996,06	-	-	1	8.996,06	-	-	1
21		KAKAO DAN KOPI ARABICA	-	1	3.520,10	-	-	1	3.520,10	-	-	1
22		KARET	-	19	96.340,19	-	-	19	96.340,19	-	-	19
23		KARET DAN COKLAT	-	23	182.650,73	-	-	23	182.650,73	-	-	23
24		KARET DAN KENAF	-	1	10.934,80	-	-	1	10.934,80	-	-	1
25		KARET DAN LADA	-	1	2.000,00	-	-	1	2.000,00	-	-	1
26		KARET COKLAT, KELAPA HIBRIDA	-	7	70.153,18	-	-	7	70.153,18	-	-	7
27		KARET, KAKAO, LADA	-	1	370,00	-	-	1	370,00	-	-	1
28		KARET, KELAPA	-	1	28.717,50	-	-	1	28.717,50	-	-	1
29		KARET, KELAPA SAWIT DAN UBI KAYU	-	1	8.498,00	-	-	1	8.498,00	-	-	1
30		KARET, COKLAT BUAH-BUAHAN	-	1	4.942,60	-	-	1	4.942,60	-	-	1
31		KEDELAI	-	1	920,00	-	-	1	920,00	-	-	1
32		KELAPA & KAKAO	-	1	734,60	-	-	1	734,60	-	-	1
33		KELAPA HIBRIDA	-	3	66.859,65	-	-	3	66.859,65	-	-	3

NO	PERUNTUKAN	KOMODITI	TAHUN 2015			s.d TAHUN 2015			TAHUN 2016			s.d TAHUN 2016			TAHUN 2017			
			UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	s.d TAHUN 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
34	PERKEBUNAN	KELEPA HIBRIDA DAN KAKAO	-	-	6	39.672,90	-	-	6	39.672,90	-	-	-	6	39.672,90			
35		KELEPA HIBRIDA DAN KARET	-	-	1	6.466,70	-	-	1	6.466,70	-	-	-	1	6.466,70			
36		KELEPA SAWIT	7	61.152,38	491	5.043.930,68	7	43.883,88	498	5.087.814,56	7	58.950,37	505	5.146.764,93				
37		KELEPA SAWIT DAN COKLAT	-	-	3	16.920,00	-	-	3	16.920,00	-	-	-	3	16.920,00			
38		KELEPA SAWIT DAN JARAK	-	-	1	9.987,00	-	-	1	9.987,00	-	-	-	1	9.987,00			
39		KELEPA SAWIT KAKAO, KELEPA HIBRIDA	-	-	3	23.626,60	-	-	3	23.626,60	-	-	-	3	23.626,60			
40		KELEPA SAWIT, COKLAT DAN KARET	-	-	5	39.424,10	-	-	5	39.424,10	-	-	-	5	39.424,10			
41		KELEPA SAWIT, DAN KARET	-	-	14	193.624,13	-	-	14	193.624,13	-	-	-	14	193.624,13			
42		KELEPA, COKLAT, LADA	-	-	2	15.725,00	-	-	2	15.725,00	-	-	-	2	15.725,00			
43		KOPI ARABIKA	-	-	1	7.740,00	-	-	1	7.740,00	-	-	-	1	7.740,00			
44		LANDREFORM	-	-	1	758,00	-	-	1	758,00	-	-	-	1	758,00			
45		PALA	-	-	1	2.365,00	-	-	1	2.365,00	-	-	-	1	2.365,00			
46		PERKEBUNAN	-	-	28	152.433,49	-	-	28	152.433,49	-	-	-	28	152.433,49			
47		PERKEBUNAN BUAH-BUAHAN	-	-	1	1.233,13	-	-	1	1.233,13	-	-	-	1	1.233,13			
48		PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	-	-	1	17.202,36	-	-	1	17.202,36	-	-	-	1	17.202,36			
49		PERKEBUNAN NANAS	-	-	1	7.941,00	-	-	1	7.941,00	-	-	-	1	7.941,00			
50		PERKEBUNAN PERCOBAAN BALITBANG	-	-	1	2.640,30	-	-	1	2.640,30	-	-	-	1	2.640,30			
51		PERTANIAN, PERKEBUNAN	-	-	1	73,90	-	-	1	73,90	-	-	-	1	73,90			
52		CACAO DAN KOPI ARABICA	-	-	1	3.680,00	-	-	1	3.680,00	-	-	-	1	3.680,00			
53		TANAH KAS DESA	-	-	1	31.737,90	-	-	1	31.737,90	-	-	-	1	31.737,90			
54		PERTANIAN LAINNYA	HARAMAY	-	1	7.333,65	-	-	1	7.333,65	-	-	-	1	7.333,65			
55		PERKEBUNAN HARAMAY	-	-	1	597,00	-	-	1	597,00	-	-	-	1	597,00			
56	PETERNAKAN	PETERNAKAN	-	-	1	403,00	-	-	1	403,00	-	-	-	1	403,00			
57		PETERNAKAN SAPI	-	-	1	1.000,00	1	95	2	1.094,62	-	-	-	2	1.094,62			
58	PERMUKIMAN DAN PERTANIAN	PEMUKIMAN, USAHA PERTANIAN PERKEBUNAN	-	-	1	957,49	-	-	1	957,49	-	-	-	1	957,49			
59	TRANSPORTASI/	PELABUHAN CPO	-	-	1	4,41	-	-	1	4,41	-	-	-	1	4,41			
60	PERHUBUNGAN	BANDAR UDARA	-	-	0	0	1	200,32	1	200,32	-	-	-	1	200,32			
61		PELABUHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	1	53.368,87	1	53.368,87	1	53.368,87		
		JUMLAH	9	67.159,38	676	6.599.486,51	12	53.652,29	688	6.653.138,80	9	130.211,27	697	6.783.350,07				

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s.d November 2017

Keterangan :
0 : Nihil/Tidak ada kegiatan

PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2017



TABEL III.1. DAFTAR 100 KPH PENETAPAN FASILITAS

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN			LUAS (ha)
			NO SK	4	5	
1	Sumatera Utara	UNIT I KPHP	SK.831/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	69.878
2	Sumatera Utara	UNIT II KPHL	SK.831/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	80.002
3	Sumatera Utara	UNIT XII KPHP	SK.831/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	56.223
4	Sumatera Utara	UNIT XV KPHP	SK.831/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	89.851
5	Sumatera Barat	UNIT I KPHL	SK.832/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	323.510
6	Sumatera Barat	UNIT II KPHL	SK.832/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	62.368
7	Sumatera Selatan	UNIT XIX KPHP	SK.833/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	32.419
8	Sumatera Selatan	UNIT XX KPHP	SK.833/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	27.076
9	Sumatera Selatan	UNIT XXI KPHP	SK.833/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	44.592
10	Sumatera Selatan	UNIT XXII KPHP	SK.833/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	91.392
11	Sumatera Selatan	UNIT XXIII KPHP	SK.833/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	206.254
12	Sumatera Selatan	UNIT XXIV KPHP	SK.833/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	407.604
13	Kalimantan Barat	UNIT XIII KPHL	SK.834/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	56.013
14	Kalimantan Barat	UNIT XVI KPHL	SK.834/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	324.662
15	Kalimantan Barat	UNIT I KPHP	SK.834/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	127.794
16	Kalimantan Barat	UNIT VIII KPHP	SK.834/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	94.544
17	Kalimantan Barat	UNIT XV KPHP	SK.834/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	207.079
18	Kalimantan Barat	UNIT XXX KPHP	SK.834/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	70.458
19	Kalimantan Barat	UNIT XXXI KPHP	SK.834/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	261.701
20	Kalimantan Barat	UNIT XXXIII KPHP	SK.834/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	318.804
21	Kalimantan Timur	UNIT XXII KPHL	SK.835/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	658.129
22	Kalimantan Selatan	UNIT VIII KPHL	SK.836/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	141.349
23	Sulawesi Utara	UNIT V KPHL *	SK.837/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	13.356
24	Sulawesi Utara	UNIT VIII KPHL *	SK.837/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	27.101
25	Sulawesi Utara	UNIT IX KPHL *	SK.837/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	13.272
26	Maluku Utara	UNIT XII KPHP	SK.838/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	170.442
27	Sulawesi Selatan	UNIT V KPHL	SK.839/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	143.751
28	Sulawesi Selatan	UNIT VI KPHL	SK.839/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	59.954
29	Sulawesi Selatan	UNIT VII KPHL	SK.839/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	130.508
30	Sulawesi Barat	UNIT IX KPHL	SK.840/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	51.086
31	Nusa Tenggara Barat	UNIT VI KPHL	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	32.340
32	Nusa Tenggara Barat	UNIT VII KPHL	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	40.645
33	Nusa Tenggara Barat	UNIT VIII KPHL	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016		9 November 2016	44.461

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN			LUAS (ha)]]
			2	3	4	
1					5	6
34	Nusa Tenggara Barat	UNIT XII KPHL	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	74.733
35	Nusa Tenggara Barat	UNIT XIX KPHL	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	44.082
36	Nusa Tenggara Barat	UNIT XXII KPHL	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	43.399
37	Nusa Tenggara Barat	UNIT X KPHP	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	55.226
38	Nusa Tenggara Barat	UNIT XI KPHP	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	64.134
39	Nusa Tenggara Barat	UNIT XIII KPHP	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	33.610
40	Nusa Tenggara Barat	UNIT XV KPHP	SK.841/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	42.630
41	Maluku	UNIT V KPHL	SK.842/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	92.022
42	Maluku	UNIT XV KPHL	SK.842/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	10.067
43	Maluku	UNIT XII KPHP	SK.842/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	193.041
44	Papua	UNIT LVI KPHL	SK.843/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	363.877
45	Papua	UNIT II KPHP	SK.843/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	194.846
46	Papua	UNIT XXIII KPHP	SK.843/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	122.820
47	Papua	UNIT XXV KPHP	SK.843/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	354.901
48	Papua	UNIT XLVII KPHP	SK.843/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	461.382
49	Papua	UNIT XLVIII KPHP	SK.843/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	573.543
50	Papua	UNIT XLIX KPHP	SK.843/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	539.996
51	Papua	UNIT LIII KPHP	SK.843/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	649.375
52	Kepulauan Riau	UNIT II KPHL	SK.844/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	32.472
53	Kepulauan Riau	UNIT V KPHP	SK.844/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	61.403
54	Jambi	UNIT VIII KPHP	SK.845/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	110.372
55	Jambi	UNIT XII KPHP	SK.845/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	79.305
56	Jambi	UNIT XIII KPHP	SK.845/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	103.528
57	Jambi	UNIT XIV KPHP	SK.845/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	80.852
58	Jambi	UNIT XV KPHP	SK.845/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	91.626
59	Jambi	UNIT XVI KPHP	SK.845/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	122.504
60	Kepulauan Bangka Belitung	UNIT VI KPHP	SK.846/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	27.199
61	Nusa Tenggara Timur	UNIT XIV KPHL	SK.847/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	116.160
62	Nusa Tenggara Timur	UNIT XVII KPHP	SK.847/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	113.398
63	Gorontalo	UNIT II KPHL	SK.848/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	90.644
64	Sulawesi Tengah	UNIT III KPHL	SK.849/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	134.726
65	Sulawesi Tengah	UNIT VIII KPHL	SK.849/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	220.766
66	Sulawesi Tengah	UNIT V KPHP	SK.849/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	111.273
67	Papua Barat	UNIT VI KPHL	SK.850/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	225.183
68	Papua Barat	UNIT XII KPHL	SK.850/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	256.207

NO	PROVINSI	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN			LUAS (ha)]]
			2	3	4	
69	Riau	UNIT I KPHP	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	110.513
70	Riau	UNIT II KPHP	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	141.080
71	Riau	UNIT III KPHP	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	131.825
72	Riau	UNIT IV KPHP	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	80.347
73	Riau	UNIT VI KPHP	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	24.663
74	Riau	UNIT XII KPHP	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	149.905
75	Riau	UNIT XIX KPHP	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	87.370
76	Riau	UNIT XV KPHP	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	35.000
77	Riau	UNIT XXXII KPHP	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	69.397
78	Riau	UNIT XXIX KPHP	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	67.827
79	Riau	UNIT XXV KPHP	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	42.898
80	Riau	UNIT XXVII KPHP	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	231.490
81	Riau	UNIT XXVIII KPHP	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	61.182
82	Riau	UNIT XXXII KPHP	SK.851/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	96.697
83	Lampung	UNIT XI KPHL	SK.852/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	47.746
84	Lampung	UNIT XIII KPHL	SK.852/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	8.025
85	Kalimantan Tengah	UNIT IV KPHL	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	7.804
86	Kalimantan Tengah	UNIT VII KPHP	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	158.785
87	Kalimantan Tengah	UNIT X KPHP	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	244.231
88	Kalimantan Tengah	UNIT XI KPHP	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	274.875
89	Kalimantan Tengah	UNIT XVII KPHP	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	681.864
90	Kalimantan Tengah	UNIT XVIII KPHP	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	140.418
91	Kalimantan Tengah	UNIT XIX KPHP	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	366.726
92	Kalimantan Tengah	UNIT XXIV KPHP	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	92.242
93	Kalimantan Tengah	UNIT XXX KPHP	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	157.199
94	Kalimantan Tengah	UNIT XXVII KPHP	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	302.601
95	Kalimantan Tengah	UNIT XXVIII KPHP	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	144.535
96	Kalimantan Tengah	UNIT XXX KPHP	SK.853/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	217.832
97	Sulawesi Tenggara	UNIT XVI KPHL	SK.854/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	126.917
98	Sulawesi Tenggara	UNIT XX KPHL	SK.854/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	230.547
99	Sulawesi Tenggara	UNIT XXI KPHL	SK.854/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	65.901
100	Sulawesi Tenggara	UNIT VIII KPHP	SK.854/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	9 November 2016	9 November 2016	18.588

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d Oktober 2017

* : Sudah ada adendum penetapan KPH Wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Pengabungan beberapa unit)

TABEL III.2. KELEMBAGAAN 100 KPH PENETAPAN FASILITASI

No	Provinsi	Unit	Jenis KPH	SK Kelembagaan	Tanggal SK Kelembagaan
1	2	3	4	5	6
1	Sumatera Utara	UNIT I	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
2	Sumatera Utara	UNIT II	KPHL	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
3	Sumatera Utara	UNIT XII	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
4	Sumatera Utara	UNIT XV	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
5	Sumatera Barat	UNIT I	KPHL	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017	23 Agustus 2017
6	Sumatera Barat	UNIT III	KPHL	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017	23 Agustus 2017
7	Riau	UNIT I	KPHP	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666	12 April 2017
8	Riau	UNIT II	KPHP	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666	12 April 2017
9	Riau	UNIT III	KPHP	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666	12 April 2017
10	Riau	UNIT IV	KPHP	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666	12 April 2017
11	Riau	UNIT VI	KPHP	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666	12 April 2017
12	Riau	UNIT XII	KPHP	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666	12 April 2017
13	Riau	UNIT XXI	KPHP	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666	12 April 2017
14	Riau	UNIT XV	KPHP	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666	12 April 2017
15	Riau	UNIT XXXIII	KPHP	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666	12 April 2017
16	Riau	UNIT XXXIX	KPHP	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666	12 April 2017
17	Riau	UNIT XXV	KPHP	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666	12 April 2017
18	Riau	UNIT XXVII	KPHP	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666	12 April 2017
19	Riau	UNIT XXVIII	KPHP	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666	12 April 2017
20	Riau	UNIT XXXII	KPHP	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666	12 April 2017
21	Jambi	UNIT VII	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 1126 tahun 2017	13 Oktober 2017
22	Jambi	UNIT XII	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 1126 tahun 2017	13 Oktober 2017
23	Jambi	UNIT XIII	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 1126 tahun 2017	13 Oktober 2017
24	Jambi	UNIT XIV	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 1126 tahun 2017	13 Oktober 2017
25	Jambi	UNIT XV	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 1126 tahun 2017	13 Oktober 2017
26	Jambi	UNIT XVI	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 1126 tahun 2017	13 Oktober 2017
27	Sumatera Selatan	UNIT XX	KPHP	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017	19 September 2017
28	Sumatera Selatan	UNIT XXI	KPHP	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017	19 September 2017
29	Sumatera Selatan	UNIT XXI	KPHP	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017	19 September 2017
30	Sumatera Selatan	UNIT XXII	KPHP	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017	19 September 2017
31	Sumatera Selatan	UNIT XXIII	KPHP	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017	19 September 2017
32	Sumatera Selatan	UNIT XXIV	KPHP	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017	19 September 2017
33	Lampung	UNIT XI	KPHL	Peraturan Gubernur Lampung No. 3 Tahun 2017	01 Februari 2017
34	Lampung	UNIT XII	KPHL	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017	01 Februari 2017

No	Provinsi	Unit	Jenis KPH	SK Kelembagaan	Tanggal SK Kelembagaan
1	2	3	4	5	6
35	Kepulauan Riau	UNIT II	KPHL		
36	Kepulauan Riau	UNIT V	KPHP		
37	Kepulauan Bangka Belitung	UNIT VI	KPHP		
38	Nusa Tenggara Barat	UNIT VI	KPHL	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Th. 2016	27 Desember 2016
39	Nusa Tenggara Barat	UNIT VII	KPHL	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Th. 2016	27 Desember 2016
40	Nusa Tenggara Barat	UNIT VIII	KPHL	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Th. 2016	27 Desember 2016
41	Nusa Tenggara Barat	UNIT X	KPHP	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Th. 2016	27 Desember 2016
42	Nusa Tenggara Barat	UNIT XI	KPHP	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Th. 2016	27 Desember 2016
43	Nusa Tenggara Barat	UNIT XII	KPHL	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Th. 2016	27 Desember 2016
44	Nusa Tenggara Barat	UNIT XIII	KPHP	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Th. 2016	27 Desember 2016
45	Nusa Tenggara Barat	UNIT XIV	KPHL	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Th. 2016	27 Desember 2016
46	Nusa Tenggara Barat	UNIT XV	KPHP	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Th. 2016	27 Desember 2016
47	Nusa Tenggara Barat	UNIT XXII	KPHL	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Th. 2016	27 Desember 2016
48	Nusa Tenggara Timur	UNIT XIV	KPHL	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Th. 2016	01 Oktober 2016
49	Nusa Tenggara Timur	UNIT XVII	KPHP	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 90 Tahun 2016	
50	Kalimantan Barat	UNIT I	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 143 Tahun 2016	30 Desember 2016
51	Kalimantan Barat	UNIT VII	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 133 Tahun 2016	30 Desember 2016
52	Kalimantan Barat	UNIT XIII	KPHL	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 142 Tahun 2016	30 Desember 2016
53	Kalimantan Barat	UNIT XV	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 149 Tahun 2016	30 Desember 2016
54	Kalimantan Barat	UNIT XVI	KPHL	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 149 Tahun 2016	30 Desember 2016
55	Kalimantan Barat	UNIT XXX	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 139 Tahun 2016	30 Desember 2016
56	Kalimantan Barat	UNIT XXXI	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 139 Tahun 2016	30 Desember 2016
57	Kalimantan Barat	UNIT XXXII	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 141 Tahun 2016	30 Desember 2016
58	Kalimantan Tengah	UNIT IV	KPHL	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017	07 April 2017
59	Kalimantan Tengah	UNIT VII	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017	07 April 2017
60	Kalimantan Tengah	UNIT X	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017	07 April 2017
61	Kalimantan Tengah	UNIT XI	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017	07 April 2017
62	Kalimantan Tengah	UNIT XIX	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017	07 April 2017
63	Kalimantan Tengah	UNIT XVII	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017	07 April 2017
64	Kalimantan Tengah	UNIT XVIII	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017	07 April 2017
65	Kalimantan Tengah	UNIT XXIV	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017	07 April 2017
66	Kalimantan Tengah	UNIT XXV	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017	07 April 2017
67	Kalimantan Tengah	UNIT XXVII	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017	07 April 2017
68	Kalimantan Tengah	UNIT XXVII	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017	07 April 2017
69	Kalimantan Tengah	UNIT XXX	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017	07 April 2017
70	Kalimantan Selatan	UNIT VII	KPHL	Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 023 Tahun 2017	03 Maret 2017

No	Provinsi	Unit	Jenis KPH	SK Kelembagaan	Tanggal SK Kelembagaan
1	2	3	4	5	6
71	Kalimantan Timur	UNIT XXII	KPHL	Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.22/68/DK-II/2017	18 Januari 2017
72	Sulawesi Utara	UNIT V KPHL*	KPHL	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 98 Tahun 2016	14 Nopember 2016
73	Sulawesi Utara	UNIT VIII KPHL*	KPHL	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 98 Tahun 2016	14 Nopember 2016
74	Sulawesi Utara	UNIT IX KPHL*	KPHL	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 98 Tahun 2016	14 Nopember 2016
75	Sulawesi Tengah	UNIT III	KPHL	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016	17 Nopember 2016
76	Sulawesi Tengah	UNIT V	KPHP	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016	17 Nopember 2016
77	Sulawesi Tengah	UNIT VII	KPHL	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016	17 Nopember 2016
78	Sulawesi Selatan	UNIT V	KPHL		
79	Sulawesi Selatan	UNIT VI	KPHL		
80	Sulawesi Selatan	UNIT VII	KPHL		
81	Sulawesi Tenggara	UNIT VII	KPHP		
82	Sulawesi Tenggara	UNIT XVI	KPHL		
83	Sulawesi Tenggara	UNIT XX	KPHL		
84	Sulawesi Tenggara	UNIT XXI	KPHL		
85	Gorontalo	UNIT II	KPHL	Peraturan Gubernur Gorontalo No. 85 Tahun 2016	23 Desember 2016
86	Sulawesi Barat	UNIT IX	KPHL	Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46.a Tahun 2016	09 Desember 2016
87	Maluku	UNIT V	KPHL	Surat Perintah Gubernur Maluku No. 821.2-131 Tahun 2017	17 Mei 2017
88	Maluku	UNIT XII	KPHP	Surat Perintah Gubernur Maluku No. 821.2-131 Tahun 2017	17 Mei 2017
89	Maluku	UNIT XV	KPHL	Surat Perintah Gubernur Maluku No. 821.2-131 Tahun 2017	17 Mei 2017
90	Maluku Utara	UNIT XII	KPHP	Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 69 Tahun 2016	28 Desember 2016
91	Papua Barat	UNIT VI	KPHL		
92	Papua Barat	UNIT XII	KPHL		
93	Papua	UNIT III	KPHP		
94	Papua	UNIT LIII	KPHP		
95	Papua	UNIT LVI	KPHL		
96	Papua	UNIT XLIX	KPHP		
97	Papua	UNIT XLVII	KPHP		
98	Papua	UNIT XLVIII	KPHP		
99	Papua	UNIT XXIII	KPHP		
100	Papua	UNIT XXXV	KPHP		

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d Oktober 2017

* : Sudah adendum penetapan KPH Wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Penggabungan beberapa unit)

TABEL III.3. PERKEMBANGAN PENETAPAN WILAYAH KPH MODEL

PENETAPAN WILAYAH KPH MODEL									
NO	PROVINSI	KPH MODEL	KABUPATEN/KOTA	SURAT KEPUTUSAN	HUTAN LINDUNG	HUTAN PRODUKSI	HUTAN TERBATAS	HUTAN PRODUKSI	LUAS TOTAL (± ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aceh	KPHL Unit II Aceh	Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Benar Meriah, Gayo Luwes, Kota Langsa	SK.992/Menhu-II/2013 tgl 27 Desember 2013	406.273	276.118	-	-	682.391
2	Sumatera Utara	KPHL Mandailing Natal	Mandailing Natal	SK.332/Menhu-II/2010 tgl 25 Mei 2015	12.681	14.704	131.781	-	159.166
3	Sumatera Utara	KPHL Tobasamosir	Toba Samosir	SK.866/Menhu-II/2013 tgl 5 Desember 2013	75.762	5.191	6.294	-	87.247
4	Sumatera Utara	KPHL Unit XII	Toba Samosir dan Lubukpan Batu Utara	SK.993/Menhu-II/2013 tgl 27 Desember 2013	65.038	-	51.189	-	116.227
5	Riau	KPHP Tasik Besar Serka	Pelaihwan, Siak	SK.505/Menhu-II/2010 tgl 21 September 2010	-	491.768	2.660	18.848	513.276
6	Riau	KPHP Tebing Tinggi	Kepulauan Meranti	SK.345/Menhu-II/2011 tgl 28 Juni 2011	412	-	69.335	-	69.747
7	Riau	KPHP Kampar Kiri	Kampar	SK.640/Menhu-II/2011 tgl 07 November 2011	24.028	-	119.755	-	143.783
8	Riau	KPHP Minas Tahura	Siak, Kampar	SK.765/Menhu-II/2012 tgl 26 Desember 2012	-	-	140.562	6172	146.734
9	Kep.Riau	KPHL Karimun	Karimun	SK.442/Menhu-II/2012 tgl 09 Agustus 2012	9.605	-	8.002	-	17.607
10	Sumatera Barat	KPHL Sijunjung	Sijunjung	SK.331/Menhu-II/2010 tgl 25 Mei 2010	83.952	40.785	25.755	-	150.492
11	Sumatera Barat	KPHL Solok (Unit VI)	Solok	SK.421/Menhu-II/2012 tgl 02 Februari 2012	114.061	3.481	12.804	-	130.346
12	Sumatera Barat	KPHP Dharmasraya	Dharmasraya	SK.695/Menhu-II/2013 tgl 21 Oktober 2012	-	17.721	15.829	-	33.550
13	Sumatera Barat	KPHL Pesisir selatan	Pesisir Selatan	SK.696/Menhu-II/2013 tgl 21 Oktober 2013	9.091	4.563	46.274	-	59.928
14	Sumatera Barat	KPHL 50 Kota	50 Kota	SK.444/Menhu-II/2012 tgl 02 Februari 2012	94.883	5.286	17.363	-	117.552
15	Sumatera Barat	KPHL Bukit Barisan	Kota Padang, Kota Padang Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota SK.867/Menhu-II/2013 tgl 05 Desember 2013	69.504	16.759	245	-	86.508	
16	Jambi	KPHL Sungai Beram Hitam	Tanjung Jabung Barat	SK.787/Menhu-II/2009 tgl 07 Desember 2009	15.965	-	-	-	15.965
17	Jambi	KPHL Limau (Unit VII)	Sarolangun	SK.714/Menhu-II/2011 tgl 19 Desember 2011	54.793	43.807	22.502	-	121.102
18	Jambi	KPHP Merangin	Merangin	SK.431/Menhu-II/2012 tgl 02 Februari 2012	36.088	9.944	30.105	-	76.137
19	Jambi	KPHP Kerinci	Kerinci	SK.960/Menhu-II/2013 tgl 22 Desember 2013	-	34250	-	-	34250
20	Bengkulu	KPHP Muko-Muko	Muko-Muko	SK.330/Menhu-II/2010 tgl 25 Mei 2010	-	11.937	66.337	-	78.274
21	Bengkulu	KPHL Bulkit Balai Rejang	Rejang Lebong	SK.994/Menhu-II/2013 tgl 27 Desember 2013	16.059	-	-	-	16.059
22	Bengkulu	KPHP Bengkulu Utara	Bengkulu Utara	SK.995/Menhu-II/2013 tgl 27 Desember 2013	165	9546	42640	-	52.351
23	Bangka Belitung	KPHP Sungai Sembilan	Bangka Tengah	SK.329/Menhu-II/2010 tgl 25 Mei 2010	5.185	34.228	-	-	39.413
24	Bangka Belitung	KPHP Rambat Menguyung	Bangka Barat	SK.763/Menhu-II/2012 tgl 27 Desember 2012	8.803	50.819	-	-	59.622
25	Bangka Belitung	KPHP Gunung Duren	Belitung Timur	SK.764/Menhu-II/2012 tgl 27 Desember 2012	12.615	45.620	-	-	58.235
26	Bangka Belitung	KPHP Sigambir-Kotawaringin	Bangka	SK.962/Menhu-II/2013 tgl 27 Desember 2013	4.769	30.169	-	-	34.938
27	Sumatera Selatan	KPHP Leban	Musi Banyuasin	SK.788/Menhu-II/2009 tgl 07 Desember 2009	-	-	265.983	-	265.983
28	Sumatera Selatan	KPHP Laktian	Musi Rawas	SK.790/Menhu-II/2009 tgl 07 Desember 2009	76.776	-	-	-	76.776
29	Sumatera Selatan	KPHP Rawas	Musi Rawas	SK.688/Menhu-II/2012 tgl 29 November 2012	-	89.511	32.074	-	121.585
30	Sumatera Selatan	KPHP Meranti	Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Lahat	SK.689/Menhu-II/2012 tgl 29 November 2012	20.082	134.597	97.588	-	252.267
31	Sumatera Selatan	KPHP Benakat (Unit XIV)	Banyuasin	SK.827/Menhu-II/2009 tgl 19 November 2013	-	256.594	-	-	256.594
32	Sumatera Selatan	KPHL Banyaksin	Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Barat	SK.961/Menhu-II/2011 tgl 07 Juli 2011	69.147	5660	-	-	74807
33	Lampung	KPHL Batu Tegi	Lampung Tengah	SK.650/Menhu-II/2010 tgl 22 November 2010	58.162	-	-	-	58.162
34	Lampung	KPHP Reg.47 Way Terusan	Tanggamus	SK.794/Menhu-II/2009 tgl 07 Desember 2009	-	12.500	-	-	12.500
35	Lampung	KPHL Kota Agung Utara (Unit X)	Lampung Selatan, Lampung Timur	SK.375/Menhu-II/2011 tgl 18 Juli 2011	56.020	-	-	-	56.020
36	Lampung	KPHP Gedong Wanii (Unit XI)	Lampung Selatan	SK.427/Menhu-II/2011 tgl 07 Juli 2011	-	30.243	-	-	30.243
37	Lampung	KPHL Rajibasa	Tulang Bawang Dan Way Kanan	SK.367/Menhu-II/2011 tgl 07 Juli 2011	5.160	-	-	-	5.160
38	Lampung	KPHL Muara Dua	Pesawaran	SK.230/Menhu-II/2012 tgl 10 Mei 2012	-	49.134	-	-	49.134
39	Lampung	KPHL Pesawaran	Way Kanan	SK.438/Menhu-II/2012 tgl 09 Agustus 2012	9.944	1.260	-	-	11.204
40	Lampung	KPHP Bukit Punggur	Mesui	SK.435/Menhu-II/2012 tgl 09 Agustus 2012	19.131	21.995	-	-	41.126
41	Lampung	KPHP Sungai Buaya		SK.996/Menhu-II/2013 tgl 27 Desember 2013	-	44249	-	-	44249

PENETAPAN WILAYAH KPH MODEL

NO	PROVINSI	KPH MODEL	KABUPATEN/KOTA	SURAT KEPUTUSAN			HUTAN PRODUKSI TERBATAS	HUTAN PRODUKSI	LUAS TOTAL (± ha)				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	DIY	KPHP Yogyakarta	Kulon Progo, Bantul Dan Gunung Kidul	SK.72/Menut-1/I/2011 tgl 20 Desember 2011			2.312.80	13.411.70	-	-	-	15.724,50	
43	Bali	KPHL Bali Barat	Jembrana, Buleleng, Tabanan	SK.78/Menut-1/I/2009 tgl 07 Desember 2009			59.848	1.892	1.610	-	-	63.350	
44	Bali	KPHL Bali Timur	Buleleng, Karang Asem	SK.62/Menut-1/I/2011 tgl 01 November 2011			21.891	1.087	-	-	-	22.978	
45	Bali	KPHL Bali Tengah	Buleleng, Bangli	SK.620/Menut-1/I/2009 tgl 01 November 2011			14.651	-	-	-	-	14.651	
46	NTB	KPHL Rinjani Barat	Lombok Barat, Lombok Utara	SK.785/Menut-1/I/2009 tgl 07 Desember 2009			28.911	5.075	6.977	-	-	40.963	
47	NTB	KPHL Batu Lanteh	Batu Lanteh	SK.342/Menut-1/I/2011 tgl 28 Juni 2011			14.303	14.842	3.631	-	-	32.776	
48	NTB	KPHL Rinjani Timur (Unit IV)	Lombok Limur	SK.225/Menut-1/I/2012 tgl 04 Mei 2012			31.987	5.602	-	-	-	37.589	
49	NTB	KPHL Ampang	Sumbawa	SK.75/Menut-1/I/2012 tgl 26 Desember 2012			24.168	8.261	6.252	-	-	38.681	
50	NTB	KPHL Maria	Bima, Kota Bima	SK.752/Menut-1/I/2012 tgl 26 Desember 2012			8.515	4.554	14.563	-	-	27.632	
51	NTB	KPHL Seputra	Lombok Tengah	SK.977/Menut-1/I/2013 tgl 27 Desember 2013			11.153	5.000	-	-	-	16.153	
52	NTB	KPHL Sejorong	Sumbawa Barat	SK.963/Menut-1/I/2013 tgl 27 Desember 2013			15762	5274	19862	-	-	40.988	
53	NTB	KPHP Tambora Utara	Bima Dompu	SK.970/Menut-1/I/2013 tgl 27 Desember 2013			-	14769	12151	-	-	-	26.920
54	NTT	KPHP Rote Ndao	Rote Ndao	SK.333/Menut-1/I/2010 tgl 25 Mei 2010			15.509	25.221	-	-	-	40.730	
55	NTT	KPHL Mutis Timau	Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara	SK.4/I/Menut-1/I/2012 tgl 02 Februari 2012			97.005	-	18.375	-	-	115.380	
56	NTT	KPHL Alor Pantar	Alor	SK.767/Menut-1/I/2012 tgl 26 Desember 2012			59.419	22.938	21.977	-	-	104.334	
57	NTT	KPHL Flores Timur	Flores Timur	SK.972/Menut-1/I/2013 tgl 27 Desember 2013			39.856	1.793	13.759	-	-	55.408	
58	NTT	KPHP Manggarai Barat	Manggarai Barat	SK.973/Menut-1/I/2013 tgl 27 Desember 2013			27.113	18.613	14.571	-	-	60.297	
59	Kalimantan Barat	KPHP Sintang	Sintang	SK.79/Menut-1/I/2009 tgl 07 Desember 2009			10.420	46.473	-	-	-	56.883	
60	Kalimantan Barat	KPHP Kapus Hulu (Unit XVII, XIX)	Kapus Hulu	SK.380/Menut-1/I/2011 tgl 18 Juli 2011			224.522	83.241	150.282	-	-	458.025	
61	Kalimantan Barat	KPHP Kadavangan	Ketapang	SK.680/Menut-1/I/2010 tgl 23 November 2010			16.268	162.583	-	-	-	178.851	
62	Kalimantan Timur	KPHP Baradai Barat	Berau	SK.646/Menut-1/I/2010 tgl 22 November 2010			247.025	118.261	410.283	-	-	775.559	
63	Kalimantan Utara	KPHP Malinau (Unit X)	Malinau	SK.224/Menut-1/I/2012 tgl 04 Mei 2012			220.723	110.518	384.271	-	-	715.512	
64	Kalimantan Utara	KPHP Kayan (Unit V)	Bulungan	SK.225/Menut-1/I/2012 tgl 04 Mei 2012			168.198	9.776	309.868	-	-	487.842	
65	Kalimantan Utara	KPHL Tarakan	Kota Tarakan	SK.783/Menut-1/I/2009 tgl 07 Desember 2009			2.400	-	2.223	-	-	4.623	
66	Kalimantan Timur	KPHP Meratus	Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser Utara,	SK.766/Menut-1/I/2012 tgl 26 Desember 2012			-	274.159	113.329	-	-	-	387.488
67	Kalimantan Timur	KPHP Kendilo	Paser	SK.966/Menut-1/I/2013 tgl 27 Desember 2013			44.152	61.051	34.032	-	-	139.235	
68	Kalimantan Selatan	KPHP Banjar	Banjar	SK.793/Menut-1/I/2009 tgl 07 Desember 2009			42.090	72.513	25.364	-	-	139.957	
69	Kalimantan Selatan	KPHP Tanah Laut	Tanah Laut	SK.440/Menut-1/I/2012 tgl 09 Agustus 2012			15.862	71.490	5.289	-	-	92.641	
70	Kalimantan Selatan	KPHP Pulau Laut & Sibulu Unit III	Kota Baru	SK.226/Menut-1/I/2012 tgl 04 Mei 2012			12.863	99.395	-	-	-	112.258	
71	Kalimantan Selatan	KPHL Hulu Sungai Selatan	Hulu Sungai Selatan	SK.750/Menut-1/I/2012 tgl 26 Desember 2012			21.221	11.530	52	-	-	32.803	
72	Kalimantan Selatan	KPHP Tabalong	Tabalong	SK.997/Menut-1/I/2013 tgl 27 Desember 2013			48.776	44.759	23.822	-	-	117.357	
73	Kalimantan Tengah	KPHL Kapus	Kapus	SK.247/Menut-1/I/2011 tgl 02 Mei 2011			105.372	-	-	-	-	105.372	
74	Kalimantan Tengah	KPHP Setiawati Unit XXI	Serui	SK.746/Menut-1/I/2011 tgl 19 Desember 2011			38.970	6.112	228.827	-	-	373.909	
75	Kalimantan Tengah	KPHP Lamandau	Lamandau	SK.717/Menut-1/I/2011 tgl 19 Desember 2011			25.432	19.906	180.951	-	-	226.289	
76	Kalimantan Tengah	KPHP Kotawaringin Barat	Kotawaringin Barat	SK.745/Menut-1/I/2012 tgl 26 Desember 2012			9.672	257.160	49.303	-	-	316.135	
77	Kalimantan Tengah	KPHL Gerbang Barito	Barito Selatan	SK.964/Menut-1/I/2013 tgl 27 Desember 2013			90.361	43.345	20.961	-	-	154.667	
78	Kalimantan Tengah	KPHP Murung Raya	Murung Raya	SK.965/Menut-1/I/2013 tgl 22 Desember 2013			103.578	205.729	598.948	-	-	908.255	
79	Kalimantan Tengah	KPHP Gunung Mas	Gunung Mas	SK.974/Menut-1/I/2013 tgl 27 Desember 2013			57.337	50.107	187.291	-	-	294.735	
80	Sulawesi Utara	KPHP Poiger	Bolaangmongondow, Minahasa Selatan	SK.788/Menut-1/I/2009 tgl 07 Desember 2009			5.265	19.739	16.594	-	-	41.588	
81	Gorontalo	KPHL Pohuwato Unit II	Pohuwato	SK.334/Menut-1/I/2010 tgl 25 Mei 2010			59.301	13.605	43.369	-	-	116.275	
82	Gorontalo	KPHP Bailemo Unit V	Boalemo	SK.402/Menut-1/I/2011 tgl 21 Juli 2011			29.383	12.403	55.140	-	-	96.926	
83	Gorontalo	KPHP Gorontalo Utara	Gorontalo Utara	SK.766/Menut-1/I/2012 tgl 26 Desember 2012			18.632	15.759	71.417	-	-	105.808	
84	Gorontalo	KPHP Gorontalo	Gorontalo	SK.976/Menut-1/I/2013 tgl 27 Desember 2013			13.126	17.781	40.775	-	-	71.682	
85	Sulawesi Tengah	KPHP Dampelas Tinombo	Donggala, Parigi Moutong	SK.792/Menut-1/I/2009 tgl 07 Desember 2009			21.017	10.244	69.651	-	-	100.912	
86	Sulawesi Tengah	KPHP Rano Patanu	Poso	SK.636/Menut-1/I/2011 tgl 07 November 2011			46.341	28.740	62.349	-	-	137.430	

NO	PROVINSI	KPH MODEL	KABUPATEN/KOTA	SURAT KEPUTUSAN				HUTAN PRODUKSI TERBATAS	HUTAN PRODUKSI	LUAS TOTAL (± ha)
				5	6	7	8			
1	2	3	4							10
87	Sulawesi Tengah	KPHP Dolago Tanggungunung	Paijigi Moutong, Sigi Donggala, Kota Palu	SK.755/Menut-1/2012 tgl 26 Desember 2012	67.794	19.008	57.548	-	144.350	
88	Sulawesi Tengah	KPHP Pogugul	Buol	SK.756/Menut-1/2012 tgl 26 Desember 2012	44.257	54.008	101.288	-	199.533	
89	Sulawesi Tengah	KPHP Balantak	Banggai	SK.754/Menut-1/2012 tgl 26 Desember 2012	30.418	28.049	58.936	-	117.403	
90	Sulawesi Tengah	KPHP Tolii Batutubé	Banggai, Tojo Una-Una Morowali	SK.967/Menut-1/2013 tgl 27 Desember 2013	126.447	55.389	94.800	-	276.636	
91	Sulawesi Tengah	KPHP Unit XVII Tojo Una-Una	Tojo Una-Una	SK.968/Menut-1/2013 tgl 27 Desember 2013	39.921	10.827	61.744	-	112.492	
92	Sulawesi Barat	KPHL Mapili	Polewai Mandar	SK.651/Menut-1/2010 tgl 22 November 2010	53.485	-	23.711	-	77.196	
93	Sulawesi Barat	KPHL Lariang Unit II	Majupi Utara	SK.60/Menut-1/2011 tgl 28 Februari 2011	34.512	2.394	21.010	-	57.916	
94	Sulawesi Barat	KPHP Manasa Tengah	Mamasasa	SK.340/Menut-1/2011 tgl 27 Juni 2011	33.218	-	4.744	-	37.962	
95	Sulawesi Barat	KPHP Manasa Barat	Mamasasa	SK.341/Menut-1/2011 tgl 27 Juni 2011	17.352	-	36.203	-	53.555	
96	Sulawesi Barat	KPHL Ganda Dewata	Mamuju, Mamasa	SK.441/Menut-1/2012 tgl Agustus 2012	157.598	-	-	-	157.598	
97	Sulawesi Barat	KPHL Malunda	Majeine	SK.752/Menut-1/2012 tgl 26 Desember 2012	45.109	-	6.962	-	52.071	
98	Sulawesi Barat	KPHP Budong Burdung	Mamuju, Mamuju Tengah	SK.998/Menut-1/2013 tgl 27 Desember 2013	5.463	36.461	86.172	-	128.096	
99	Sulawesi Tenggara	KPHP Lakonpa Unit III	Butoan	SK.795/Menut-1/2009 tgl 07 Desember 2009	12.432	11.880	6.288	-	30.600	
100	Sulawesi Tenggara	KPHP Unit XXIV	Konawe Selatan, Kota Kendari	SK.611/Menut-1/2011 tgl 28 Februari 2011	41.405	89.343	3.671	-	134.419	
101	Sulawesi Tenggara	KPHP Bombaia	Bombana	SK.426/Menut-1/2011 tgl 27 Juli 2011	23.659	74.514	17.953	-	116.126	
102	Sulawesi Tenggara	KPHL Konawe	Konawe Selatan, Kota Kendari	SK.762/Menut-1/2012 tgl 26 Desember 2012	96.941	8.018	35.668	-	140.627	
103	Sulawesi Tenggara	KPHP Paropaté Gantara	Biton Utara	SK.975/Menut-1/2013 tgl 27 Desember 2013	15.157	-	2.571	-	17.728	
104	Sulawesi Selatan	KPHP Jeneterang	Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Jeneponto, Takalar	SK.715/Menut-1/2011 tgl 19 Desember 2011	60.451	45.471	54.932	-	160.854	
105	Sulawesi Selatan	KPHL Latona Malli	Luwu Timur	SK.722/Menut-1/2011 tgl 20 Desember 2011	156.593	6.391	79.008	-	241.992	
106	Sulawesi Selatan	KPHP Aweta	Wejo	SK.979/Menut-1/2013 tgl 27 Desember 2013	5.539	13.532	-	-	19.071	
107	Maluku Utara	KPHP Gunung Sinopua	Haimahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan	SK.337/Menut-1/2010 tgl 25 Mei 2010	21.056	9.604	13.917	-	44.577	
108	Maluku Utara	KPHP Bacan	Haimahera Selatan	SK.963/Menut-1/2013 tgl 27 Desember 2013	62.836	7.760	70.212	-	140.808	
109	Maluku	KPHP Wae Sapalewa	Maluku Tengah	SK.336/Menut-1/2010 tgl 25 Mei 2010	4.545	34.609	27.903	-	67.057	
110	Maluku	KPHP Wae Apu	Buru	SK.770/Menut-1/2012 tgl 26 Desember 2012	73.478	62.921	96.033	-	232.432	
111	Maluku	KPHP Wae Tira	Buru, Buru Selatan	SK.977/Menut-1/2013 27 Desember 2013	51.599	86.938	65.847	-	204.384	
112	Maluku	KPHP Wae Bubi	Seram Bagian Selatan	SK.978/Menut-1/2010 tgl 20 Desember 2010	12.666	11.059	42.739	-	66.464	
113	Paupa Barat	KPHP Sorong	Sorong	SK.701/Menut-1/2010 tgl 20 Desember 2010	11.789	111.444	100.136	-	223.369	
114	Paupa Barat	KPHP Sorong Selatan	Sorong Selatan	SK.771/Menut-1/2012 tgl 26 Desember 2012	121.361	88.710	88.710	-	283.260	
115	Paupa Barat	KPHL Kota Sorong (temu)	Kota Sorong	SK.999/Menut-1/2013 tgl 27 Desember 2013	41.635	6.602	-	6.173	12.775	
116	Paupa	KPHL Biak Numfor	Biak Numfor	SK.646/Menut-1/2010 tgl 22 November 2010	120.340	30.527	55.149	-	206.016	
117	Paupa	KPHP Yapen	Kepulauan Yapen	SK.785/Menut-1/2009 tgl 07 Desember 2009	15.100	90.767	-	-	105.867	
118	Paupa	KPHP Keerom	Keerom	SK.282/Menut-1/2013 tgl 19 November 2013	49.196	93.930	30.330	-	173.456	
119	Paupa	KPHP Waropen	Waropen	SK.760/Menut-1/2012 tgl 26 Desember 2012	83.372	97.691	5.899	-	186.962	
120	Paupa	KPHL Memberamo	Sami, Jayapura	SK.825/Menut-1/2013 tgl November 2013	50.492	46.105	159.271	-	255.888	

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d Oktober 2017

TABEL III.4. PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN KPH MODEL

NO.	LOKASI/NAMA KPH MODEL	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SURAT KEPUTUSAN
1	2	3	4	5
1	KPHL Unit III Aceh	Aceh	Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Kota Langsa	Peraturan Gubernur Aceh No.20 Tahun 2013
2	KPHL Mandailing Natal	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016
3	KPHL Unit XII	Sumatera Utara	Toba Samosir, Labuhan Batu Utara	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016
4	KPHL Tobasamosir	Sumatera Utara	Toba Samosir	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016
5	KPHP Dharmasraya	Sumatera Barat	Dharmasraya	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017
6	KPHP Pesisir Selatan	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017
7	KPHL Bukit Barisan	Sumatera Barat	Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok dan Tanah Datar	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017
8	KPHL Lima Puluh Kota (Unit I)	Sumatera Barat	Lima Puluh Kota	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017
9	KPHL Sijunjung	Sumatera Barat	Sijunjung	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017
10	KPHL Solok (unit V)	Sumatera Barat	Solok	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017
11	KPHL Banyuasin	Sumatera Selatan	Banyuasin	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017
12	KPHP Meranti	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017
13	KPHP Rawas	Sumatera Selatan	Musi Rawas	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017
14	KPHP Unit VII Benakat	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu, Muara Enim dan Lahat	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017
15	KPHP Lakitan Unit VI	Sumatera Selatan	Musi Rawas	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017
16	KPHP Lahan	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017
17	KPHL Karimun	Kepulauan Riau	Karimun	Keputusan Bupati Karimun No 97 Tahun 2012
18	KPHP Minas Tahura	Riau	Siaik, Kampar dan Kota Pekanbaru	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666
19	KPHP Kampar Kiri (Unit XVIII)	Riau	Kampar	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666
20	KPHP Tebing Tinggi (Unit XXIV)	Riau	Kepulauan Meranti	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666
21	KPHP Tasik Besar Serkap	Riau	Pejaiawan, Siak	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666
22	KPHP Sigambir-Kotawaringin	Kep. Bangka Belitung	Bangka	Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung No. 522/108/DISHUT
23	KPHP Sungai Sembulan	Kep. Bangka Belitung	Bangka Tengah	Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung No. 522/108/DISHUT
24	KPHP Rambat Mendiyung	Kep. Bangka Belitung	Bangka Barat	Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung No. 522/108/DISHUT
25	KPHP Gunung Duren	Kep. Bangka Belitung	Belitung Timur	Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung No. 522/108/DISHUT
26	KPHP Bengkulu Utara	Bengkulu	Bengkulu Utara	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2017
27	KPHP Muko-Muko	Bengkulu	Muko-Muko	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2017
28	KPHL Bukit Batu Rejang	Bengkulu	Rejang Lebong	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2017
29	KPHP Kerinci	Jambi	Kerinci	Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 1126 tahun 2017
30	KPHP Bukit Lubuk Pekak-Hulu Landai	Jambi	Merangin	Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 1126 tahun 2017
31	KPHP Limau unit VII	Jambi	Sarolangun	Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 1126 tahun 2017
32	KPHL Sungai Beram Hitam	Jambi	Tanjung Jabung Barat	Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 1126 tahun 2017
33	KPHL Pesawaran	Lampung	Pesawaran	Peraturan Gubernur Lampung No. 3 Tahun 2017
34	KPHP Bukit Punggur	Lampung	Way Kanan	Peraturan Gubernur Lampung No. 3 Tahun 2017

NO.	LOKASI/NAMA KPH MODEL	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		SURAT KEPUTUSAN
			1	2	
3	4	5			
35	KPHL Batu Tegi	Lampung	Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus		Peraturan Gubernur Lampung No. 3 Tahun 2017
36	KPHL Rajabasa (Unit XIV)	Lampung	Lampung Selatan		Peraturan Gubernur Lampung No. 3 Tahun 2017
37	KPHP Gedong Wanii (Unit XVII)	Lampung	Lampung Selatan, Lampung Timur		Peraturan Gubernur Lampung No. 3 Tahun 2017
38	KPHP Register 47 Way Tensuan	Lampung	Lampung Tengah		Peraturan Gubernur Lampung No. 3 Tahun 2017
39	KPHP Sungai Buaya	Lampung	Mesuji		Peraturan Gubernur Lampung No. 3 Tahun 2017
40	KPHL Kotaagung Utara (Unit X)	Lampung	Tanggamus		Peraturan Gubernur Lampung No. 3 Tahun 2017
41	KPHP Muara Dua	Lampung	Tulang Bawang, Way Kanan		Peraturan Gubernur Lampung No. 3 Tahun 2017
42	KPHP Yogyakarta	DI Yogyakarta	Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo		Peraturan Gubernur DIY Nomor. 96 Tahun 2015
43	KPHL Bali Tengah (Unit II)	Bali	Buleleng, Bangli, Tabanan, Badung		Peraturan Gubernur Bali Nomor 111 Tahun 2016
44	KPHL Bali Timur (Unit III)	Bali	Buleleng, Karangasem, Bangli, Klungkung		Peraturan Gubernur Bali Nomor 111 Tahun 2016
45	KPHL Bali Barat	Bali	Jembrana, Buleleng, Tabanan		Peraturan Gubernur Bali Nomor 111 Tahun 2016
46	KPHP Tambora Utara	Nusa Tenggara Barat	Bima, Dompu		Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Tahun 2016
47	KPHP Maria Unit XXIII	Nusa Tenggara Barat	Bima dan Kota Bima		Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Tahun 2016
48	KPHL Ampang	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa		Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Tahun 2016
49	KPHL Rinjani Barat	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat, Lombok Utara		Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Tahun 2016
50	KPHL Tastura	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah		Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Tahun 2016
51	KPHL Rinjani Timur	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur		Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Tahun 2016
52	KPHP Batulanitah (Unit IX)	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa		Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Tahun 2016
53	KPHP Sejorong	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat		Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Tahun 2016
54	KPHP Rote Ndao	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao		Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016
55	KPHL Alor Pantar	Nusa Tenggara Timur	Alor		Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016
56	KPHP Mutis Timau (Unit XIX)	Nusa Tenggara Timur	Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan		Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016
57	KPHP Manggarai Barat	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat		Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016
58	KPHL Flores Timur	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur		Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016
59	KPHP Kapuas Hulu (Unit XVII dan Unit XIX)	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu		Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 137 Tahun 2016
60	KPHP Kendawangan	Kalimantan Barat	Ketapang		Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 139 Tahun 2016
61	KPHP Sungai Merakai	Kalimantan Barat	Sintang		Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 148 Tahun 2016
62	KPHP Berau Barat	Kalimantan Timur	Berau		Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.22/68/DK-II/2017
63	KPHP Kayan	Kalimantan Utara	Bulungan		Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2016
64	KPHP Meratus	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan		Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.22/68/DK-II/2017
65	KPHL Tarakan	Kalimantan Utara	Kota Tarakan		Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2016
66	KPHP Malinau	Kalimantan Utara	Malinau		Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2016
67	KPHP Kendilo	Kalimantan Timur	Paser		Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.22/68/DK-II/2017
68	KPHP Banjar	Kalimantan Selatan	Banjar		Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 023 Tahun 2017
69	KPHL Hulu Sungai Selatan	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Selatan		Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 023 Tahun 2017
70	KPHP Pulau Laut dan Sebuku (UNIT II)	Kalimantan Selatan	Kota baru		Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 023 Tahun 2017
71	KPHP Tanah Laut	Kalimantan Selatan	Tanah Laut		Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 023 Tahun 2017

NO.	LOKASI/NAMA KPH MODEL	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		SURAT KEPUTUSAN
			2	3	
1			4	5	
72	KPHP Tabalong	Kalimantan Selatan	Tabalong		Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 023 Tahun 2017
73	KPHL Gerbang Barito	Kalimantan Tengah	Barito Selatan		Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017
74	KPHP Gunung Mas	Kalimantan Tengah	Gunung Mas		Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017
75	KPHP Kota Wairingin Barat	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat		Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017
76	KPHP Lamandau	Kalimantan Tengah	Lamandau		Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017
77	KPHL Kapuas	Kalimantan Tengah	Kapuas		Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017
78	KPHP Murung Raya	Kalimantan Tengah	Murung Raya		Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017
79	KPHP Seruyan (Unit XXI)	Kalimantan Tengah	Seruyan		Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017
80	KPHP Poigar	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan		Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 98 Tahun 2016
81	KPHP Bolaemo (Unit V)	Gorontalo	Baolemo		Peraturan Gubernur Gorontalo No. 85 Tahun 2016
82	KPHP Gorontalo	Gorontalo	Gorontalo		Peraturan Gubernur Gorontalo No. 85 Tahun 2016
83	KPHP Gorontalo Utara	Gorontalo	Gorontalo Utara		Peraturan Gubernur Gorontalo No. 85 Tahun 2016
84	KPHL Unit III Pohuwato	Gorontalo	Pohuwato		Peraturan Gubernur Gorontalo No. 85 Tahun 2016
85	KPHP Toili Batunube	Sulawesi Tengah	Banggai, Tojo Una-Una Morowali		Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016
86	KPHP Unit XVII Tojo Una-Una	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una		Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016
87	KPHP Dampelas Tinombwo	Sulawesi Tengah	Donggala, Parigi, Moutong		Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016
88	KPHP Balantak	Sulawesi Tengah	Banggai		Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016
89	KPHP Pogogul	Sulawesi Tengah	Buol		Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016
90	KPHP Dolago Tanggunung	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong, Sigi, Donggala dan Kota Palu		Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016
91	KPHP Sintuwu Maroso/Rano Patanu	Sulawesi Tengah	Poso		Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016
92	KPHL Ganda Dewata	Sulawesi Barat	Manuju, Mamasa		Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. 46.a Tahun 2016
93	KPHL Malunda	Sulawesi Barat	Majene		Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. 46.a Tahun 2016
94	KPHL Mamasa Tengah (Unit VIII)	Sulawesi Barat	Mamasae		Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. 46.a Tahun 2016
95	KPHP Mamasa Barat (Unit VII)	Sulawesi Barat	Mamasae		Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. 46.a Tahun 2016
96	KPHL Unit I Lariang	Sulawesi Barat	Manuju Utara		Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. 46.a Tahun 2016
97	KPHP Budong-Buddong	Sulawesi Barat	Manuju, Mamuju Tengah		Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. 46.a Tahun 2016
98	KPHL Mapili	Sulawesi Barat	Polewali Mandar		Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No. 46.a Tahun 2016
99	KPHP Tina Orima bombania	Sulawesi Tenggara	Bombanua		Peraturan Bupati Bombanua No.17 Tahun 2012
100	KPHP Unit III Lakompa	Sulawesi Tenggara	Biton		Peraturan Bupati Biton No. 5 Tahun 2011
101	KPHL Peropa Ea Gantara	Sulawesi Tenggara	Buton Utara		Peraturan Bupati Buton Utara No.22 Tahun 2013
102	KPHL Konawe	Sulawesi Tenggara	Konawe		Peraturan Bupati Konawe No.6 Tahun 2013
103	KPHP Unit XXXV Gularaya	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan, Kota Kendari		Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor. 13 Tahun 2014
104	KPHP Jeneberang (Unit IX)	Sulawesi Selatan	Bone, Sijai, Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Takalar, Jeneponto		Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No.29 Tahun 2012
105	KPHL Larona Malili (Unit I)	Sulawesi Selatan	Luwu Timur		Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur No.38 Tahun 2011
106	KPHP Awota	Sulawesi Selatan	Wajo		Peraturan Bupati Wajo No.14 Tahun 2014
107	KPHP Bacan	Maluku Utara	Halmahera Selatan		Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 69 Tahun 2016
108	KPHP Gunung Sinopaa	Maluku Utara	Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan		Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 69 Tahun 2016

NO.	LOKASI/NAMA KPH MODEL	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	SURAT KEPUTUSAN
1	2	3	4	5
109	KPHP Wae Apu	Maluku	Buru	Surat Perintah Gubernur Maluku No. 8212-131 Tahun 2017
110	KPHP Wae Sapalewa	Maluku	Maluku Tengah	Surat Perintah Gubernur Maluku No. 8212-131 Tahun 2017
111	KPHP Wae Bubi	Maluku	Seram Bagian Timur	Surat Perintah Gubernur Maluku No. 8212-131 Tahun 2017
112	KPHP Wae Tira	Maluku	Buru, Buru Selatan	Keputusan Gubernur Maluku No. 63 Tahun 2015
113	KPHP Sorong Selatan	Papua Barat	Sorong Selatan	Peraturan Bupati Sorong Selatan No.07 Tahun 2013
114	KPHL Kota Sorong (remu)	Papua Barat	Kota Sorong	Peraturan Walikota Sorong No.11 Tahun 2013
115	KPHP Sorong	Papua Barat	Sorong	Perda Kabupaten Sorong No. 14 Tahun 2011
116	KPHL Biak Numfor	Papua	Biak Numfor	Perda Kab. Biak Numfor No.28 Tahun 2011
117	KPHP Keerom	Papua	Keerom	Peraturan Bupati Keerom No 10 Tahun 2012
118	KPHP Waropen	Papua	Waropen	Keputusan Bupati Kabupaten Waropen No.7 Tahun 2012
119	KPHP Yapen	Papua	Kepulauan Yapen	Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen No. 16 Tahun 2010
120	KPHP Memberamo	Papua	Sarmi, Jayapura	Peraturan Gubernur Papua No 19 Tahun 2014

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d Oktober 2017

TABEL III.5. KELEMBAGAAN 114 KPH PENETAPAN FASILITASI

No	Nama KPH	Provinsi	Organisasi KPH	No SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
1	KPHL Lintas Kabupaten Unit I	Aceh	UPTD	Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 20 Tahun 2013
2	KPHL Lintas Kabupaten Unit II	Aceh	UPTD	Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 20 Tahun 2013
3	KPHL Lintas Kabupaten Unit IV	Aceh	UPTD	Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 20 Tahun 2013
4	KPHL Lintas Kabupaten Unit VI	Aceh	UPTD	Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 20 Tahun 2013
5	KPHL Lintas Kabupaten Unit V	Aceh	UPTD	Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 20 Tahun 2013
6	KPHL Lintas Kabupaten Bengkulu	Bengkulu	UPTD	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2017
7	KPHL Bengkulu Selatan	Bengkulu	UPTD	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2017
8	KPHL Kaur	Bengkulu	UPTD	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2017
9	KPHL Seluma	Bengkulu	UPTD	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2017
10	KPHP Bone Bolango	Gorontalo	UPTD	Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 85 Tahun 2016
11	KPHP Tebo Timur	Jambi	UPTD	Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 1126 tahun 2017
12	KPHP Tebo Barat	Jambi	UPTD	Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 1126 tahun 2017
13	KPHP Menungking	Kalimantan Barat	UPTD	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 140 Tahun 2016
14	KPHP Sorkan	Kalimantan Barat	UPTD	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 142 Tahun 2016
15	KPHP Belimbang	Kalimantan Barat	UPTD	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 138 Tahun 2016
16	KPHL Hulu Sungai Tengah	Kalimantan Selatan	UPTD	Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 023 Tahun 2017
17	KPHP Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan	UPTD	Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 023 Tahun 2017
18	KPHP Palangkaraya	Kalimantan Tengah	UPTD	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017
19	KPHP Barito Utara	Kalimantan Tengah	UPTD	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017
20	KPHP Barito Timur	Kalimantan Tengah	UPTD	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017
21	KPHP Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	UPTD	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017
22	KPHP Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	UPTD	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017
23	KPHP DAS Belawan	Kalimantan Timur	UPTD	Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.22/68/DK-II/2017
24	KPHP Santan	Kalimantan Timur	UPTD	Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.22/68/DK-II/2017
25	KPHL Sungai Wain-Sungai Manggar	Kalimantan Timur	UPTD	Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.22/68/DK-II/2017
26	KPHP Bongan	Kalimantan Timur	UPTD	Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.22/68/DK-II/2017
27	KPHP Telukai	Kalimantan Timur	UPTD	Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.22/68/DK-II/2017
28	KPHP Delta Mahakam	Kalimantan Timur	UPTD	Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.22/68/DK-II/2017
29	KPHP Tana Tidung	Kalimantan Utara	UPTD	Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2016
30	KPHP Jebu Bembang Antan	Kep. Bangka Belitung	UPTD	Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.22/68/DK-II/2017
31	KPHP Bubus Panca	Kep. Bangka Belitung	UPTD	Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung No. 522/108/DISHUT
32	KPHP Bangka Selatan	Kep. Bangka Belitung	UPTD	Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung No. 522/108/DISHUT
33	KPHL Belitung	Kep. Bangka Belitung		
34	KPHP Lingga	Kep. Riau		
35	KPHP Bintan Tanjung Pinang	Kep. Riau	UPTD	Peraturan Gubernur Lampung No. 3 Tahun 2017
36	KPHL Liwa	Lampung	UPTD	Peraturan Gubernur Lampung No. 3 Tahun 2017
37	KPHL UNIT VII Way Waya / KPHL Sendang Agung	Lampung	UPTD	Peraturan Gubernur Lampung No. 3 Tahun 2017

No	Nama KPH	Provinsi	Struktur Organisasi KPH	No SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
38	KPHL Tangkit Tebak	Lampung	UPTD	Peraturan Gubemur Lampung No. 3 Tahun 2017
39	KPHL Gunung Balak	Lampung	UPTD	Peraturan Gubemur Lampung No. 3 Tahun 2017
40	KPHP Wae Mala-Wae Mikona	Maluku	UPTD	Surat Perintah Gubemur Maluku No. 821.2-131 Tahun 2017
41	KPHP Bungai	Maluku	UPTD	Surat Perintah Gubemur Maluku No. 821.2-131 Tahun 2017
42	KPHP P. Molkar - P. Trangan	Maluku	UPTD	Surat Perintah Gubemur Maluku No. 821.2-131 Tahun 2017
43	KPHL Kota Ambon	Maluku	UPTD	Surat Perintah Gubemur Maluku No. 821.2-131 Tahun 2017
44	KPHL Maluku Tenggara	Maluku	UPTD	Surat Perintah Gubemur Maluku No. 821.2-131 Tahun 2017
45	KPHP Unit XXII	Maluku Utara	UPTD	Surat Perintah Gubemur Maluku No. 821.2-131 Tahun 2017
46	KPHP Halmahera Timur	Maluku Utara	UPTD	Peraturan Gubemur Provinsi Maluku Utara No. 69 Tahun 2016
47	KPHP Kepulauan Sula	Maluku Utara	UPTD	Peraturan Gubemur Provinsi Maluku Utara No. 69 Tahun 2016
48	KPHP Oba	Maluku Utara	UPTD	Peraturan Gubemur Provinsi Maluku Utara No. 69 Tahun 2016
49	KPHL Tofo Pajo	Nusa Tenggara Barat	UPTD	Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Barat No. 53 Tahun 2016
50	KPHP Madapangga Rompu	Nusa Tenggara Barat	UPTD	Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Barat No. 53 Tahun 2016
51	KPHL Manggarai Timur	Nusa Tenggara Timur	UPTD	Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur No. 90 Tahun 2016
52	KPHL Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur	UPTD	Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur No. 90 Tahun 2016
53	KPHL Manggarai	Nusa Tenggara Timur	UPTD	Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur No. 90 Tahun 2016
54	KPHL Ngada	Nusa Tenggara Timur	UPTD	Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur No. 90 Tahun 2016
55	KPHL Lembata	Nusa Tenggara Timur	UPTD	Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur No. 90 Tahun 2016
56	KPHP Nagekeo	Nusa Tenggara Timur	UPTD	Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur No. 90 Tahun 2016
57	KPHP Ende	Nusa Tenggara Timur	UPTD	Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur No. 90 Tahun 2016
58	KPHL Sikka	Nusa Tenggara Timur	UPTD	Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur No. 90 Tahun 2016
59	KPHP Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur	UPTD	Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur No. 90 Tahun 2016
60	KPHP Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur	UPTD	Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur No. 90 Tahun 2016
61	KPHL Belu	Nusa Tenggara Timur	UPTD	Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur No. 90 Tahun 2016
62	KPHL Nabire	Papua		
63	KPHP Boven Digoel	Papua		
64	KPHL Mimika	Papua	SKPD	Perda Kabupaten Mimika No. 8 Tahun 2014
65	KPHP Nduga	Papua	UPTD	Perbu Ndgia No. 04 Tahun 2015
66	KPHP Sami	Papua		
67	KPHL Pegunungan Bintang	Papua		
68	KPHL Intan Jaya	Papua	UPTD	Perbu Jayawijaya No. 10 Tahun 2014
69	KPHL Jayawijaya	Papua		
70	KPHL Kota Jayapura	Papua		
71	KPHP Tambrauw	Papua Barat		
72	KPHP Bakau /KPHP Teluk Bintuni	Papua Barat	UPTD	PerDpu Teluk Bintuni Nomor 9 Tahun 2015
73	KPHP Fakfak	Papua Barat	UPTD	Perbu Fakfak Nomor 36 Tahun 2015
74	KPHP Raja Ampat	Papua Barat	UPTD	Perbu Raja Ampat No. 4 Tahun 2014
75	KPHP Bengkalis	Riau	UPTD	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/166

No	Nama KPH	Provinsi	Struktur Organisasi KPH	No SK KELEMBAGAAN
1	2	3	4	5
76	KPHP Siak	Riau	UPTD	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666
77	KPHP Rokan Hulu	Riau	UPTD	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666
78	KPHP Pelalawan XX	Riau	UPTD	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666
79	KPHP Pelalawan XXI	Riau	UPTD	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666
80	KPHP Indragiri Hulu	Riau	UPTD	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666
81	KPHL Kuantan Singingi	Riau	UPTD	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/PP/1666
82	KPHP Karoza	Sulawesi Barat	UPTD	Peraturan Gubemur Sulbar No. 46.a Tahun 2016
83	KPHP Karama	Sulawesi Barat	UPTD	Peraturan Gubemur Sulbar No. 46.a Tahun 2016
84	KPHP Kepulauan Selayar	Sulawesi Selatan	UPTD	Perbup Kepulauan Selayar No. 1 Tahun 2014
85	KPHP Gunung Dako	Sulawesi Tengah	UPTD	Peraturan Gubemur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016
86	KPHP Banawa Lalundu	Sulawesi Tengah	UPTD	Peraturan Gubemur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016
87	KPHP Morowali	Sulawesi Tengah	UPTD	Peraturan Gubemur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016
88	KPHP Peling	Sulawesi Tengah	UPTD	Peraturan Gubemur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016
89	KPHP Muna	Sulawesi Tenggara	UPTD	Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor : 11 Tahun 2013
90	KPHP Ladongi	Sulawesi Tenggara		
91	KPHL Mekongga Selatan	Sulawesi Tenggara		
92	KPHL Ueesi	Sulawesi Tenggara		
93	KPHP Bina Mahawana Sejuk	Sulawesi Tenggara	UPTD	Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor : 410 Tahun 2014
94	KPHP Kota Baubau	Sulawesi Tenggara		
95	KPHL Wakatobi	Sulawesi Tenggara		
96	KPHP Mekongga Selatan	Sulawesi Tenggara		
97	KPHL Lintas Sulut	Sulawesi Utara	UPTD	Peraturan Gubemur Sulawesi Utara No. 98 Tahun 2016
98	KPHP Lalan Sembilang	Sumatera Selatan	UPTD	Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017
99	KPHP Ogan Ulu	Sumatera Selatan	UPTD	Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017
100	KPHP Suban Jenji	Sumatera Selatan	SKPD	Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017
101	KPHL Bukit Nanti	Sumatera Selatan	UPTD	Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017
102	KPHL Dempo	Sumatera Selatan	UPTD	Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017
103	KPHL Peraduan Gistang	Sumatera Selatan	UPTD	Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2017
104	KPHL UNIT XVII	Sumatera Utara	UPTD	Peraturan Gubemur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016
105	KPHP UNIT XVII	Sumatera Utara	UPTD	Peraturan Gubemur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016
106	KPHL UNIT XVIII	Sumatera Utara	UPTD	Peraturan Gubemur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016
107	KPHP UNIT XX	Sumatera Utara	UPTD	Peraturan Gubemur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016
108	KPHL UNIT XXXI	Sumatera Utara	UPTD	Peraturan Gubemur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016
109	KPHP UNIT XXIV	Sumatera Utara	UPTD	Peraturan Gubemur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016
110	KPHL UNIT XXXV	Sumatera Utara	UPTD	Peraturan Gubemur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016
111	KPHL UNIT XXXVI	Sumatera Utara	UPTD	Peraturan Gubemur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016
112	KPHP Tapanuli Selatan	Sumatera Utara	UPTD	Peraturan Gubemur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016
113	KPHP UNIT XXVIII	Sumatera Utara	UPTD	Peraturan Gubemur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016
114	KPHP UNIT XXXI	Sumatera Utara	UPTD	Peraturan Gubemur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d Oktober 2017

TABEL III.6. DAFTAR 114 KPH PENETAPAN FASILITASI

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN			PENETAPAN				
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dikonversi	Tanura	Luas Total (ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 Aceh	Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie	UNIT I KPHL	SK.627/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	377.404	118.674	72.232		568.250	
2	2 Aceh	Kab. Pidie Jaya, Kab. Bireun, Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah	UNIT II KPHL	SK.627/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	149.613	90.377	13.959		253.948	
3	3 Aceh	Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Tengah	UNIT IV KPHL	SK.627/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	357.841	45.146	-		402.986	
4	4 Aceh	Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Barat Daya	UNIT V KPHL	SK.627/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	243.230	4.950	41.982		290.162	
5	5 Aceh	Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Tenggara, Kota Subulussalam, Kab. Aceh Singkil	UNIT VI KPHL	SK.627/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	261.301	41.312	7.940		310.552	
6	6 Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah	UNIT XVI KPHL	SK.637/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	46.882	48	25.236		72.166	
7	7 Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat	UNIT XVII KPHL	SK.637/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	7.401	76.105	3.049		86.555	
8	8 Sumatera Utara	Kab. Samosir, Kab. Tobasa	UNIT XVIII KPHL	SK.637/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	47.635	1.779	-		49.415	
9	9 Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan	UNIT XX KPHL	SK.637/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	20.127	38.213	30.591		88.931	
10	10 Sumatera Utara	Kab. Tapsel, Kab. Padang Lawas Utara	UNIT XIII KPHL	SK.637/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	42.693	-	22.244		64.937	
11	11 Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	UNIT XIV KPHL	SK.637/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	97.332	-	27.015		124.347	
12	12 Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	UNIT XXV KPHL	SK.637/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	44.011	2.631	13.755		60.396	
13	13 Sumatera Utara	Kab. Tapsel, Kab. Padang Lawas Utara	UNIT XXVI KPHL	SK.637/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	110.776	18.638	44.962		174.395	
14	14 Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	UNIT XXVII KPHL	SK.637/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	17.655	20.416	-		38.071	
15	15 Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	UNIT XXVIII KPHL	SK.637/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	53.199	24.139	50.419		127.758	
16	16 Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas, Kab. Labu Sel	UNIT XXXI KPHL	SK.637/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	42.614	188.448	39.397		270.460	
17	17 Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	UNIT II KPHL	SK.621/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	-	62.486	-		62.486	
18	18 Sumatera Selatan	Kota Padar Alam	UNIT XII KPHL	SK.621/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	26.052	-	-		26.052	
19	19 Sumatera Selatan	Kab. Lahat	UNIT XIII KPHL	SK.621/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	69.431	-	-		69.431	
20	20 Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim, Kab. OKU	UNIT XIV KPHL	SK.621/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	3.190	133.076	42.778		179.044	
21	21 Sumatera Selatan	Kab. OKU	UNIT XV KPHL	SK.621/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	67.969	24.441	2.436		94.847	
22	22 Sumatera Selatan	Kab. OKUS	UNIT XVI KPHL	SK.621/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	29.706	-	-		29.706	
23	23 Kep. Riau	Kab. Lingga	UNIT II KPHL	SK.634/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	31.937	17.047	49.768		98.752	
24	24 Kep. Riau	Kab. Bintan, Kota Tanjung Pinang	UNIT IV KPHL	SK.634/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	20.338	18.688	7.730		46.756	
25	25 Riau	Kab. Bengkalis	UNIT V KPHL	SK.615/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	-	11.437	12.001		23.438	
26	26 Riau	Kab. Siak	UNIT VII KPHL	SK.615/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	-	100.504	2.454		102.958	

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN				PENETAPAN			
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dikonversi	Tahura	Luas Total (ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Riau	Kab. Rokan Hulu	UNIT XIV KPHP	SK.615/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	61	10.724	56.332			67.118
28	Riau	Kab. Pelalawan	UNIT XX KPHP	SK.615/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	-	106.288	62.170			168.458
29	Riau	Kab. Pelalawan	UNIT XI KPHP	SK.615/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	4.451	119.628	30			124.109
30	Riau	Kab. Indragiri Hulu	UNIT XXX KPHP	SK.615/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	21.682	61.988	67.048			150.718
31	Riau	Kab. Kuantan Singingi	UNIT XXXI KPHL	SK.615/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	45.615	38.579	4.677			88.870
32	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	UNIT IX KPHP	SK.626/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	16.553	35.216	51.769			103.559
33	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	UNIT III KPHP	SK.626/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	10.687	33.968	44.655			89.310
34	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	UNIT VIII KPHP	SK.626/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	18.016	67.578	85.595			171.189
35	Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	UNIT X KPHL	SK.626/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	26.772	21.983	48.754			97.508
36	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah	UNIT III KPHL	SK.628/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	89.664	1.018	5.443			96.125
37	Bengkulu	Kab. Seluma	UNIT IV KPHL	SK.628/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	66.534	-	15.707			82.242
38	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	UNIT V KPHL	SK.628/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	32.742	1.704	14.241			48.686
39	Bengkulu	Kab. Kaur	UNIT VI KPHL	SK.628/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	44.592	2.069	31.571			78.232
40	Jambi	Kab. Tebo	UNIT IX KPHP	SK.632/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	4.966	132.927	5.075			142.967
41	Jambi	Kab. Tebo	UNIT X KPHP	SK.632/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	-	90.640	13.010			103.650
42	Lampung	Kab. Lampung Barat	UNIT II KPHL	SK.617/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	42.074	-	-			42.074
43	Lampung	Kab. Lampung Tengah	UNIT VII KPHL	SK.617/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	24.337	-	-			24.337
44	Lampung	Kab. Lampung Utara	UNIT VIII KPHL	SK.617/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	21.117	-	-			21.117
45	Lampung	Kab. Lampung Timur	UNIT XV KPHL	SK.617/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	24.285	-	-			24.285
46	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	UNIT XVI KPHL	SK.631/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	12.937	2.865	9.620			25.422
47	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	UNIT XX KPHP	SK.631/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	17.689	13.259	14.715			45.663
48	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	UNIT II KPHL	SK.633/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	17.736	-	-			17.736
49	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur	UNIT III KPHL	SK.633/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	34.719	16.233	-			50.952
50	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	UNIT IV KPHL	SK.633/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	30.330	5.404	-			35.734
51	Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	UNIT IX KPHL	SK.633/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	48.577	605	-			49.182
52	Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagekeo	UNIT V KPHP	SK.633/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	11.091	10.891	10.809			32.791
53	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	UNIT VI KPHP	SK.633/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	21.113	36.005	622			57.740
54	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	UNIT VII KPHL	SK.633/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	35.259	1.018	722			36.999
55	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	UNIT XI KPHL	SK.633/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	12.028	8.618	-			20.647
56	Nusa Tenggara Timur	Kab. TTS	UNIT XX KPHP	SK.633/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	22.018	44.143	3.300			69.461
57	Nusa Tenggara Timur	Kab. TTU	UNIT XI KPHP	SK.633/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	36.605	13.779	55.249			105.632
58	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	UNIT XII KPHL	SK.633/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	39.305	3.524	3.708			46.537
59	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	UNIT XIII KPHP	SK.620/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	80.157	14.488	94.954			189.599

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN				PENETAPAN			
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi yang Dikonversi	Tahura	Luas Total (ha)	
						5	6	7	8		
1	2	3	4							9	10
11	12									11	12
60	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	UNIT XXIV KPHP	SK.620/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	70.683	42.806	65.972		179.461	
61	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang, Kab. Kayong Utara	UNIT XXV KPHP	SK.620/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	75.107	243.610	-		318.717	
62	Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	UNIT VII KPHP	SK.623/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	-	120.789	-		120.789	
63	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu, Kab. Kutai Barat	UNIT XXXIX KPHP	SK.623/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	-	109.314	-		109.314	
64	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	UNIT XXVI KPHP	SK.623/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	207.736	264.457	507.759		979.933	
65	Kalimantan Timur	Kab. Kukar, Kab. Bontang	UNIT XXVII KPHP	SK.623/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	20.609	242.858	-		263.467	
66	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	UNIT XXX KPHL	SK.623/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	14.873	257	-		15.130	
67	Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Paser, Kab. Kutai Barat	UNIT XXXII KPHP	SK.623/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	31.960	165.973	135.232		333.166	
68	Kalimantan Timur	Kab. Paser	UNIT XXXIII KPHP	SK.623/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	76.414	102.069	76.762		255.245	
69	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	UNIT IX KPHL	SK.624/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	32.488	15.841	13.858		62.186	
70	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu	UNIT VI KPHP	SK.624/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	83.325	154.074	25.520		262.919	
71	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	UNIT III KPHP	SK.629/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	-	59.185	-		59.185	
72	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	UNIT V KPHP	SK.629/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	14.279	125.265	194.525		334.069	
73	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur	UNIT XIV KPHP	SK.629/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	-	34.317	14.083		48.400	
74	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	UNIT XXXIX KPHP	SK.629/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	1.589	198.929	-		200.518	
75	Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	UNIT XXXI KPHP	SK.629/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	153.084	215.424	10.311		378.819	
76	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara, Kota Bitung	UNIT VII KPHL	SK.625/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	17.628	-	9.472		27.101	
77	GORONTALO	Kab. Bone Bolango	UNIT VII KPHP	SK.639/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	16.144	836	18.804		35.784	
78	Sulawesi Tengah	Kab. Tol-Toli	UNIT II KPHP	SK.618/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	45.364	34.602	82.818		162.785	
79	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	UNIT VII KPHP	SK.618/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	40.090	6.813	63.020		109.923	
80	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	UNIT XIV KPHP	SK.618/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	71.486	14.251	105.092		190.830	
81	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Banggai Laut	UNIT XI KPHP	SK.618/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	36.446	33.650	46.984		117.079	
82	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah	UNIT IV KPHP	SK.636/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	15.111	-	47.989		63.110	
83	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	UNIT VI KPHP	SK.636/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	55.795	36.368	64.755		156.917	
84	Sulawesi Tenggara	Kota Baubau	UNIT V KPHP	SK.635/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	4.555	2.618	5.006		12.179	
85	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna	UNIT VII KPHP	SK.635/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	30.779	42.947	0		73.726	
86	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	UNIT XI KPHP	SK.635/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	2.675	23.161	20.744		46.580	
87	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur, Kab. Kolaka	UNIT XII KPHP	SK.635/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	18.752	1.075	27.261		47.088	
88	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	UNIT XIII KPHL	SK.635/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	101.966	18.246	5.505		125.777	
89	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur	UNIT XIV KPHL	SK.635/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	126.747	48	36.949		163.744	
90	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara, Kab. Morowali	UNIT XIX KPHP	SK.635/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	24.360	65.498	23.722		113.580	
91	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	UNIT XXV KPHL	SK.635/Menlhk-Sej/en/2015	14-Des-15	10.022	-	-		10.022	

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN				PENETAPAN			
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dikonversi	Tahura	Luas Total (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Sulawesi Selatan	Kab. Selaway	UNIT X KPHP	SK.616/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	9.812	4.030	7.060	-	-	20.901
93	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	UNIT IV KPHP	SK.619/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	36.863	51.918	110.546	-	-	199.327
94	Maluku Utara	Kab. Tidore Kepulauan	UNIT IX KPHP	SK.619/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	540	-	17.458	-	-	17.998
95	Maluku Utara	Kab. Taliabu	UNIT XVI KPHP	SK.619/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	22.010	136.203	10.512	-	-	168.726
96	Maluku	Kab. Buru Selatan	UNIT I KPHP	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	50.196	45.759	48.583	-	-	144.539
97	Maluku	Kota Ambon	UNIT XIV KPHL	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	10.288	-	-	-	-	10.288
98	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	UNIT XVI KPHL	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	6.454	2.975	2.407	-	-	11.836
99	Maluku	Kab. Maluku Tenggara Barat	UNIT XVIII KPHL	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	11.040	68.955	52.343	-	-	132.339
100	Maluku	Kab. Kep. Aru	UNIT XI KPHP	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	3.617	66.541	-	-	-	70.159
101	Maluku	Kab. Kep. Aru	UNIT XII KPHP	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	-	-	-	-	-	-
102	Papua Barat	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong	UNIT I KPHL	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	137.657	49.932	4.553	-	-	192.142
103	Papua Barat	Kab. Tambraw	UNIT IV KPHP	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	30.913	-	108.825	-	-	139.738
104	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	UNIT XV KPHP	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	10.186	54.348	86.863	-	-	640.508
105	Papua Barat	Kab. Fakfak	UNIT XVI KPHP	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	31.419	9.792	168.344	-	-	209.554
106	Papua	Kab. Nabire, Kab. Doglai	UNIT II KPHL	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	224.870	33.872	100.392	-	-	359.135
107	Papua	Kab. Boven Digoel	UNIT LI KPHP	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	12.690	312.097	341.310	-	-	666.097
108	Papua	Kab. Mimika, Kab. Doglai	UNIT VI KPHL	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	139.368	37.671	96.185	-	-	273.223
109	Papua	Kab. Intan Jaya, Kab. Puncak, Kab. Waropen	UNIT X KPHL	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	407.554	76.860	143.526	-	-	627.940
110	Papua	Kab. Lani Jaya, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, UNIT XII KPHL	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	107.991	-	31.938	-	-	-	139.928
		Kab. Memberano Tengah, Kab. Tolikara									
111	Papua	Kab. Yahukimo, Kab. Nduga, Kab. Asmat	UNIT XIII KPHP	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	556	171.515	85.460	-	-	257.531
112	Papua	Kab. Sami	UNIT XXII KPHP	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	39.435	49.747	96.078	-	-	185.280
113	Papua	Kota Jayapura	UNIT XXVIII KPHL	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	6.655	24.683	16.388	-	-	47.726
114	Papua	Kab. Pegunungan Bintang	UNIT XXXV KPHL	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	270.939	13.045	15.145	-	-	299.129

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d Oktober 2017

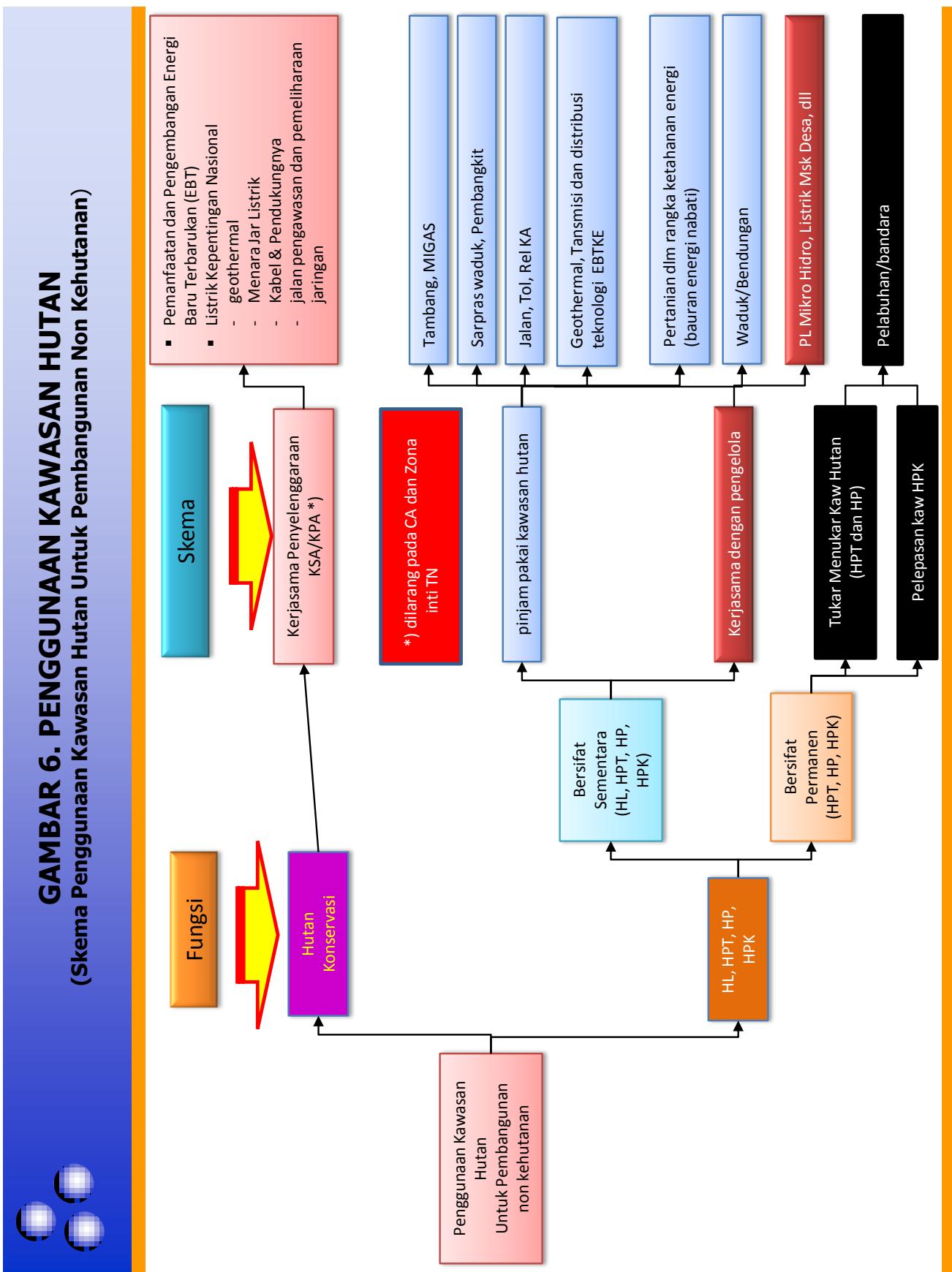
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2017



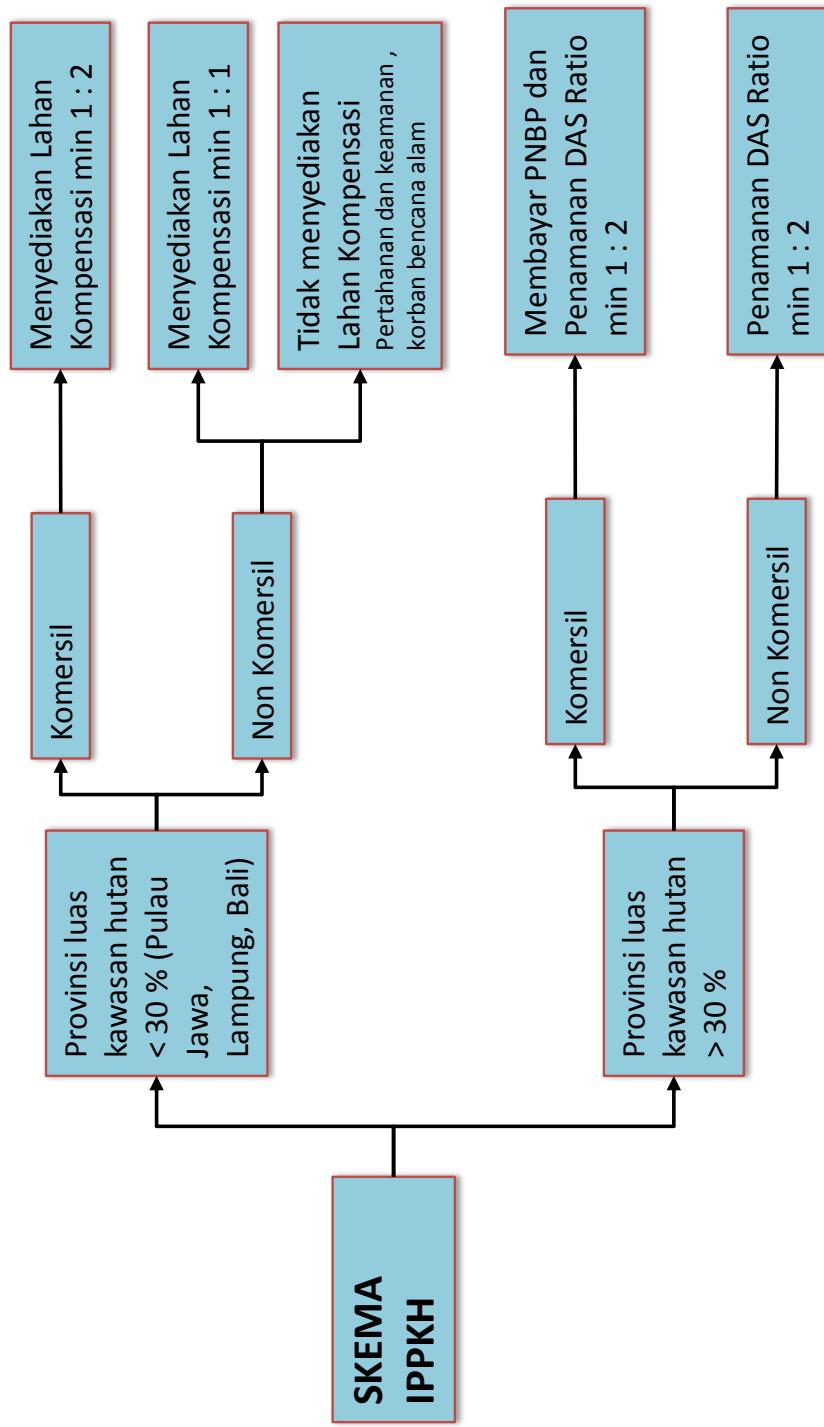
GAMBAR 6. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

(Skema Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Non Kehutanan)



GAMBAR 7. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

(Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan)



TABEL IV.1. PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN SURVEY/EKSPLORASI TAMBANG DAN NON TAMBANG

NO	PROVINSI	IPPKH-SE TAMBANG						IPPKH-SE NON TAMBANG						Total s.d 2017
		s.d 2016		2017		Total s.d 2017		s.d 2016		2017		Total s.d 2017		
Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	-
1	Aceh	9	59.855,72	-	-	9	59.855,72	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	18	151.120,04	-	-	18	151.120,04	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	3	4.720,53	-	-	3	4.720,53	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	8	413.967,37	-	-	8	413.967,37	-	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	48	207.186,60	3	27.426,92	51	234.613,52	-	-	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	42	192.527,96	4	21.577,53	46	214.105,49	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	5	5.516,04	-	-	5	5.516,04	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	2	8.624,19	-	-	2	8.624,19	-	-	-	-	-	-	-
9	Bangka Belitung	7	20.100,72	-	-	7	20.100,72	1	1.081,00	-	-	1	1.081,00	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	18	10.028,21	1	4,98	19	10.033,19	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	21	25.311,39	-	-	21	25.311,39	-	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	23	63.461,53	2	3.531,22	25	66.992,75	1	1.24	-	-	1	1.24	-
16	Banten	3	1.790,65	2	8,76	5	1.799,41	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	1	25,28	-	-	1	25,28	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	16	139.549,99	-	-	16	139.549,99	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	8	39.543,26	1	96,03	9	39.639,29	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	87	1.015.618,07	2	593.900,06	89	1.609.518,13	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	17	65.558,67	2	31.916,98	19	97.475,65	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	102	378.716,93	4	22.738,46	106	401.455,39	1	23.870,28	-	-	1	23.870,28	-
24	Kalimantan Utara	24	116.379,23	1	18,83	25	116.398,06	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	7	45.659,00	-	-	7	45.659,00	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	15	100.222,73	1	3.350,36	16	103.573,09	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	6	53.803,45	2	6.014,34	8	59.817,79	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	20	72.058,46	1	19.251,69	21	91.310,15	-	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	7	30.357,24	-	-	7	30.357,24	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	1	33,55	-	-	1	33,55	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	18	13.435,45	-	-	18	13.435,45	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	86	324.050,44	-	-	86	324.050,44	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	26	92.363,17	1	14.167,07	27	106.530,24	-	-	1	242,24	1	242,24	-
34	Papua	7	78.491,94	-	-	7	78.491,94	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		655	3.730.077,80	27	744.003,23	682	4.474.081,03	3	24.952,52	1	242,24	4	25.194,76	

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d November 2017

TABEL IV.2. PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI TAMBANG DAN NON TAMBANG

NO	PROVINSI	IPPKH-OP TAMBANG						IPPKH-OP NON TAMBANG						Total s.d 2017	
		s.d 2016			2017			s.d 2017			2016			2017	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Aceh	2	444,42	-	-	2	444,42	7	980,06	1	345,08	8	1.325,14		
2	Sumatera Utara	4	554,01	1	5,81	5	559,82	61	6.827,75	3	140,39	64	6.968,14		
3	Sumatera Barat	8	1.379,59	1	242,30	9	1.621,89	20	619,00	1	17,17	21	636,17		
4	Riau	15	6.204,43	2	1.651,74	17	7.856,17	5	12.927,79	-	-	5	12.927,79		
5	Jambi	47	6.005,93	6	44,31	53	6.050,24	3	247,79	1	177,27	4	425,06		
6	Sumatera Selatan	34	11.198,29	15	2.220,75	49	13.419,03	15	952,44	3	444,61	18	1.397,05		
7	Bengkulu	5	2.212,93	3	1.906,14	8	4.119,07	8	226,74	-	-	8	226,74		
8	Lampung	6	175,71	2	33,36	8	209,07	5	315,53	1	94,86	6	410,39		
9	Bangka Belitung	16	5.226,13	3	519,70	19	5.745,83	6	87,87	-	-	6	87,87		
10	Kepulauan Riau	2	1.891,13	-	-	2	1.891,13	6	425,72	2	17,11	8	442,83		
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	3	16,22	-	-	3	16,22		
12	Jawa Barat	31	2.308,28	5	50,86	36	2.359,14	18	971,03	1	52,78	19	1.023,81		
13	Jawa Tengah	15	658,49	1	1.184	16	659,88	30	379,04	3	177,03	33	556,08		
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Jawa Timur	20	1.872,95	1	144,56	21	2.017,51	12	945,07	6	453,28	18	1.398,35		
16	Banten	1	16,00	-	-	1	16,00	3	223,74	-	-	3	223,74		
17	Bali	1	-	-	-	1	-	17	60,24	-	-	17	60,24		
18	Nusa Tenggara Barat	2	7.417,08	-	-	2	7.417,08	14	931,65	-	-	14	931,65		
19	Nusa Tenggara Timur	4	805,61	-	-	4	805,61	8	166,90	2	30,83	10	197,73		
20	Kalimantan Barat	9	4.848,91	4	1.879,43	13	6.728,34	4	11.884,80	2	67,12	6	11.951,92		
21	Kalimantan Tengah	68	87.325,49	19	13.564,02	87	100.889,51	2	1.922,22	2	533,82	4	2.456,04		
22	Kalimantan Selatan	82	45.270,07	22	14.891,23	104	60.161,30	3	255,45	-	-	3	255,45		
23	Kalimantan Timur	91	189.041,65	14	10.395,70	105	199.437,35	10	1.104,79	2	68,64	12	1.173,43		
24	Kalimantan Utara	6	9.146,79	7	3.967,93	13	13.114,72	5	3.261,32	1	26,47	6	3.287,79		
25	Sulawesi Utara	5	1.801,43	4	727,49	9	2.528,92	3	13,41	1	504,33	4	517,74		
26	Sulawesi Tengah	7	5.575,66	2	1.120,63	9	6.696,29	14	1.128,16	4	148,10	18	1.276,26		
27	Sulawesi Selatan	15	1.482,93	5	570,00	20	2.052,93	9	389,64	4	888,12	13	1.277,76		
28	Sulawesi Tenggara	32	23.908,69	11	2.267,99	43	26.176,68	6	139,25	2	110,61	8	249,86		
29	Gorontalo	-	-	1	999,90	1	999,90	4	312,53	2	9,84	6	322,37		
30	Sulawesi Barat	1	603,50	-	-	1	603,50	-	-	-	-	-	-		
31	Maluku	4	708,41	-	-	4	708,41	1	53,97	-	-	1	53,97		
32	Maluku Utara	28	15.752,78	14	5.970,85	42	21.723,63	-	-	-	-	-	-		
33	Papua Barat	6	815,60	-	-	6	815,60	2	6.372,63	-	-	2	6.372,63		
34	Papua	-	-	-	-	-	-	8	2.578,48	1	4,40	9	2.582,88		
	TOTAL	567	434.652,87	143	63.175,88	710	497.828,75	312	56.721,22	45	4.311,87	357	61.033,08		

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d November 2017

TABEL IV.3. PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN SURVEY/EKSPLORASI KOMODITAS TAMBANG

NO	PROVINSI	KOMODITAS										TOTAL			
		Minyak dan Gas		Logam Mulia		Mineral Logam Lain		Batu bara		Galian C		Panas Bumi			
1	2	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	3	27.426,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	27.426,92
6	Sumatera Selatan	4	21.577,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21.577,53
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	1	4,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,98
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	1	3.393,18	-	-	-	-	1	138,04	-	-	2	3.531,22
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8,76	2	8,76
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	1	96.03	-	-	-	-	-	1	96.03	-	-
21	Kalimantan Tengah	1	586.478,06	1	7.422,00	-	-	-	-	-	-	2	593.900,06	-	-
22	Kalimantan Selatan	1	31.550,15	-	-	-	1	366,83	-	-	-	2	31.916,98	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	4	22.738,46	-	-	-	4	22.738,46	-	-
24	Kalimantan Utara	1	18,83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18,83	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	1	3.350,36	-	-	-	-	1	3.350,36	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	2	6.014,34	-	-	-	-	2	6.014,34	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	1	19.251,69	-	-	-	-	1	19.251,69	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	1	14.167,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.167,07
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		12	681.223,54	2	10.815,18	5	28.712,42	5	23.105,29	1	138,04	2	8.76	27	744.003,23

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d November 2017

TABEL IV.4. PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN SURVEY EKSPLORASI/SUB KEGIATAN NON TAMBANG TAHUN 2011

NO	PROVINSI	KOMODITAS			TOTAL	
		Unit	Minyak dan Gas	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-
9	Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	1	242,24	1	242,24	
34	Papua	-	-	-	-	-
TOTAL		1	242,24	1	242,24	

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d November 2017

TABEL IV.5. PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI KOMODITAS TAMBANG

NO	PROVINSI	KOMODITAS												TOTAL						
		Pertambangan			Minyak dan Gas			Logam Mulia			Mineral Logam Lain			Batu bara		Galian C		Panas Bumi		
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	-	-	
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,81	-	-	-	1	5,81	5,81	
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	242,30	-	-	-	-	1	242,30	242,30	
4	Riau	-	-	1	175,00	-	-	-	-	1	1.476,74	-	-	-	-	-	2	1.651,74	1.651,74	
5	Jambi	-	6	44,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	44,31	44,31	
6	Sumatera Selatan	-	8	568,43	-	-	-	-	5	1.437,32	1	100,00	1	115,00	15	15	2.220,75	2.220,75		
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	2	1.828,85	-	-	1	77,29	3	3	1.906,14	1.906,14		
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	33,36	-	-	-	2	33,36	33,36		
9	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	1	216,75	-	-	2	302,95	-	-	3	3	519,70	519,70	
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Jawa Tengah	-	1	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,18	1,18		
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Jawa Timur	-	1	144,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	144,56	144,56		
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	47,01	1	3,85	5	50,86	50,86		
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Kalimantan Barat	1	1,65	-	-	1	939,79	2	937,99	-	-	-	-	-	-	4	1.879,43	1.879,43		
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	4	1.360,28	15	12.203,74	-	-	-	-	19	13.564,02	13.564,02		
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	1	128,98	19	10.938,06	2	3.824,19	-	-	22	14.891,23	14.891,23		
23	Kalimantan Timur	-	-	1	1.925,40	-	-	-	13	8.470,30	-	-	-	-	-	14	10.395,70	10.395,70		
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3.967,93	-	-	-	-	7	3.967,93	3.967,93		
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	4	727,49	-	-	-	-	-	-	-	-	4	727,49	727,49		
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	2	1.120,63	-	-	-	-	-	-	2	1.120,63	1.120,63		
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	1	338,14	-	-	4	231,86	-	-	-	5	570,00	570,00		
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	10	2.228,11	-	-	1	39,88	-	-	-	-	11	2.267,99	2.267,99		
29	Gorontalo	-	-	-	1	999,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	999,90	999,90		
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
32	Maluku Utara	-	-	1	1.710,43	13	4.260,42	-	-	-	-	-	-	-	-	14	5.970,85	5.970,85		
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	1	1,65	18	2.858,88	7	4.377,61	34	10.591,30	62	40.322,94	18	4.827,36	3	196,14	143	63.175,88	63.175,88		

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d November 2017

TABEL IV.6. PERKEMBANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN OPERASI KOMODITAS/SUB KEGIATAN NON TAMBANG

NO	PROVINSI	KOMODITAS/SUB KEGIATAN													TOTAL			
		Pembangunan Ketenagalistrikan dan Instalasi Teknologi Terbarukan	Pembangunan Jaringan Telekomunikasi	Jalan Umum dan Jalan Kereta Api, Tol	Sumber Daya Air, Instalasi Air, Saluran Air Bersih dan atau Limbah	Fasilitas Umum	Prasarana penunjang keselamatan laju lintas laut, udara dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika	Transportasi Non Umum										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	345,08	-	-	-	-	-	-	345,08	
2	Sumatera Utara	3	140,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,39	
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17,17	-	-	-	-	17,17	
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Jambi	1	177,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,27	
6	Sumatera Selatan	1	208,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	235,65	3	444,61
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Lampung	1	94,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	94,86	
9	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kepulauan Riau	-	-	1	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17,08	2	17,11
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Jawa Barat	1	52,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,78	
13	Jawa Tengah	3	177,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,03	
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Jawa Timur	1	21,12	-	2	332,79	1	82,19	1	5,50	1	11,68	-	-	-	6	453,28	
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58	-	1	30,25	-	-	2	30,83	
20	Kalimantan Barat	1	64,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,50	2	67,12
21	Kalimantan Tengah	1	152,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	381,69	2	533,82
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Kalimantan Imur	2	68,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	68,64	
24	Kalimantan Utara	1	26,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26,47	
25	Sulawesi Utara	1	504,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	504,33	
26	Sulawesi Tengah	1	53,27	-	-	3	94,83	-	-	-	-	-	-	-	-	4	148,10	
27	Sulawesi Selatan	2	271,35	-	-	-	-	2	616,77	-	-	-	-	-	-	4	888,12	
28	Sulawesi Tenggara	1	74,59	-	-	-	-	1	36,02	-	-	-	-	-	-	2	110,61	
29	Gorontalo	2	9,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9,84	
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	23	2.097,65	1	0,03	5	427,62	6	1.080,64	1	5,50	3	59,10	6	641,32	45	4.311,87	

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d November 2017

TABEL IV.7. PERKEMBANGAN LAHAN KOMPENSASI

No	PROVINSI	s.d 2016			2017			Total
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Bali	1	7,50	-	-	1	7,50	
2	Banten	1	12,01	-	-	1	12,01	
3	DKI Jakarta	2	4,18	-	-	2	4,18	
4	Jawa Barat	67	5.670,02	1	115,50	68	5.785,52	
5	Jawa Tengah	31	1.247,88	-	-	31	1.247,88	
6	Jawa Timur	39	2.618,28	-	-	39	2.618,28	
7	Lampung	10	538,66	-	-	10	538,66	
8	Sumatera Utara	1	104,00	-	-	1	104,00	
Grand Total		152	10.202,53	1	115,50	153	10.318,03	

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d Tahap Berita Acara Serah Terima

TABEL IV.8. REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PENYETORAN PNBP PENGUNAAN HUTAN

NO	PROVINSI	REALISASI PNBP-PKH						REALISASI PNBP-PKH					
		s.d Tahun 2016						s.d Tahun 2017					
		Jumlah WB	TAMBANG	NON TAMBANG	TOTAL (Rp.)	Jumlah WB	TAMBANG	NON TAMBANG	TOTAL (Rp.)	Jumlah WB	TAMBANG	NON TAMBANG	TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nanggroe Aceh D	4	633.550.029	102.603.434	736.153.463	6	3.425.283.675	160.920.000	3.586.203.675	6	4.058.833.704	263.523.434	4.322.357.138
2	Sumatera Utara	31	387.161.120	4.982.844.209	5.370.005.329	38	0	3.070.819.644	3.070.819.644	38	387.161.120	8.053.663.553	8.440.824.973
3	Sumatera Barat	9	4.984.193.943	555.523.799	5.539.717.742	15	346.307.850	193.916.000	540.223.850	15	5.330.501.793	749.439.799	6.079.941.592
4	Riau	15	18.805.916.269	1.796.096.000	20.602.012.269	18	4.013.369.177	2.840.346.757	6.853.715.934	18	22.819.285.446	4.636.442.757	27.455.728.203
5	Kepulauan Riau	5	1.996.714.615	0	1.996.714.615	8	5.115.823.618	154.724.000	5.270.547.618	8	7.112.538.233	154.724.000	7.267.262.233
6	Jambi	49	23.449.263.905	9.012.775.161	32.462.039.066	56	3.667.983.900	1.590.074.635	5.258.058.535	56	27.112.247.805	10.602.849.796	37.720.097.601
7	Bengkulu	12	7.689.728.769	888.672.691	8.578.401.460	14	1.892.241.799	282.889.347	2.175.114.146	14	9.581.970.568	1.171.562.038	10.753.532.606
8	Bangka Belitung	28	32.464.362.641	96.499.839	32.560.862.480	28	6.185.402.157	20.055.766	6.205.457.923	28	38.649.764.798	116.555.605	38.766.320.403
9	Sumatera Selatan	51	208.445.635.714	15.695.641.374	224.141.277.088	59	7.854.773.216	2.826.197.718	10.680.970.934	59	216.300.408.930	18.521.839.092	234.822.248.022
10	NTB	11	152.612.439.868	112.229.516	152.724.669.384	12	29.189.805.000	232.742.180	29.422.547.180	12	181.802.244.868	344.971.696	182.147.216.564
11	Nusa Tenggara Timur	4	322.999.615	358.469.641	681.469.256	6	0	289.008.203	289.008.203	6	322.999.615	647.477.844	970.477.459
12	Kalimantan Barat	11	77.465.906.358	29.792.993	77.495.699.351	16	66.324.515.747	106.272.000	66.430.787.747	16	143.790.422.105	136.064.993	143.926.437.098
13	Kalimantan Tengah	73	519.634.710.342	462.864.000	520.097.574.342	86	167.599.932.348	120.848.000	167.720.780.348	86	687.234.642.680	563.712.000	687.818.354.690
14	Kalimantan Selatan	103	1.363.116.693.862	96.888.371	1.363.213.582.233	119	256.417.957.927	1.532.400	256.419.490.327	119	1.619.534.651.789	98.420.771	1.619.633.072.560
15	Kalimantan Timur	97	2.195.401.652.596	1.039.072.012	2.196.440.724.608	105	257.966.228.861	239.302.520	258.205.531.381	105	2.453.367.881.457	1.278.314.532	2.454.646.255.989
16	Kalimantan Utara	7	20.995.115.846	911.868.400	21.906.984.246	12	19.273.598.795	2.885.400.000	22.158.998.795	12	40.268.714.641	3.797.266.400	44.065.983.041
17	Sulawesi Utara	5	11.457.234.915	3.149.558	11.460.384.473	9	2.337.349.000	839.577.641	3.176.926.641	9	13.794.583.915	842.727.199	14.637.311.114
18	Gorontalo	3	0	1.518.301.357	1.518.301.357	5	0	373.264.000	373.264.000	5	0	1.891.565.357	1.891.565.357
19	Sulawesi Tengah	18	44.557.393.940	2.070.431.265	46.627.825.205	20	13.087.655.000	1.956.920.924	15.044.575.924	20	57.645.048.940	4.027.352.189	61.672.401.129
20	Sulawesi Barat	1	1.534.754.718	0	1.534.754.718	2	0	0	0	2	1.534.754.718	0	1.534.754.718
21	Sulawesi Selatan	21	4.369.498.658	2.952.645.883	7.322.144.541	25	3.358.255.777	614.037.617	3.972.293.394	25	7.727.754.435	3.566.683.500	11.294.437.935
22	Sulawesi Tenggara	38	66.242.088.443	770.598.800	67.012.687.243	49	34.325.122.168	34.193.440	34.359.315.608	49	100.567.210.611	804.792.240	101.372.002.851
23	Maluku	3	2.199.338.918	34.143.661	2.234.082.579	3	0	8.407.333	8.407.333	3	2.199.338.918	42.550.394	2.242.438.912
24	Maluku Utara	33	164.272.084.980	0	164.272.084.980	41	39.417.512.253	0	39.417.512.253	41	203.689.597.233	0	203.689.597.233
25	Papua Barat	6	1.665.853.139	1.006.640.000	2.672.493.139	6	1.831.878.474	312.976.000	2.144.854.474	6	3.497.731.613	1.319.616.000	4.817.347.613
26	Papua	3	0	5.692.272.886	5.692.272.886	3	0	1.584.709.418	1.584.709.418	3	0	7.276.982.304	7.276.982.304
	TOTAL	641	4.924.704.893.203	50.190.024.850	4.974.394.918.053	761	923.630.996.741	20.739.135.543	944.370.132.285	761	5.848.335.889.944	70.929.160.393	5.919.265.050.338

Sumbar: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembenyataan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d September 2017

Catatan:
WB adalah Wajib Bayar
Data Penampaikan bukti Pembayaran PNBP s/d tgl. 30 September 2017

INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2017



TABEL V.1. PERKEMBANGAN PEMERIKSAAN HASIL PENAFSIRAN CITRA SATELIT PADA UNIT IUPHHK-HA

NO	KLASIFIKASI LAHAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	2	3	4	5
1	Hutan Lahan Kering Primer	1.343.046,27	1.053.181,77	517.555,77
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	3.682.272,27	3.120.832,75	2.164.320,60
3	Hutan Primer Kerdil			
4	Hutan Bekas Tebangan Kerdil			
5	Hutan Karst			
6	Hutan Rawa Primer	97.888,00	47.406,00	
7	Hutan Rawa Sekunder	103.176,48	165.731,35	19.813,00
8	Hutan Mangrove Primer	29.357,00	27.819,00	1.952,06
9	Hutan Mangrove Bekas Sekunder	66.516,66	63.263,18	1.612,00
10	Hutan Tanaman (Transmigrasi)	19.769,00	36.684,22	13.030,00
11	Belukar Tua	341.631,71	359.366,25	267.594,58
12	Belukar Tua Rawa	7.844,50	13.321,99	25.264,00
13	Belukar Muda dan Semak	396.967,71	377.379,67	301.312,58
14	Belukar Muda dan rawa	1.015,00		
15	Belukar Muda dan Semak rawa	16.213,09	36.905,87	2.197,00
16	Perkebunan	1.784,00	3.592.320,00	12.805,27
17	Transmigrasi			
18	Non Hutan			
19	Non Hutan Bekas Terbakar			
20	Karst			
21	Tanah Terbuka	46.485,84	538.080,68	67.718,10
22	Ter tutup Awan/TAD	237.181,05	228.110,86	148.705,23
23	Pertanian Campuran	20.538,00	7.616,00	12.342,00
24	Tambang	752,00	1.711,00	1.522,62
25	Rawa			941,00
26	Tubuh Air/Rawa/Danau	4.536,00	3.983,00	
27	Karst primer	52.410,00	49.819,00	13.110,20
28	Karst sekunder	16.041,00	336,00	
29	Pemukiman		188,00	28,00
30	Sawah			1.032,00
JUMLAH LUAS PENAFSIRAN		6.485.425,58	9.724.126,59	3.572.856,01

Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Data s.d Oktober 2017

Keterangan : Luasan yang disajikan dalam tabel diatas menggambarkan luasan areal IUPHHK yang ditelaah oleh Direktorat IPSDH.

Luas tersebut tidak menggambarkan luas total areal hutan Produksi Indonesia

TABEL V.2. PERKEMBANGAN PEMERIKSAAN HASIL PENAFSIRAN CITRA SATELIT PADA UNIT IUPHHK-HTI

NO	KLASIFIKASI LAHAN	TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017	
		1	2	3	4	5	6		
1	Hutan Lahan Kering Primer		139.291,00		49.227,00		7.156,00		1.291,00
2	Hutan Lahan Kering Sekunder		1.319.524,14		306.274,22		248.467,62		172.037,54
3	Hutan Primer Kerdil	-							
4	Hutan Bekas Tebangan Kerdil	-							
5	Hutan Karst	-							
6	Hutan Rawa Primer	49.172,00		19.268,00		19.268,00		12.744,00	
7	Hutan Rawa Sekunder	477.738,60		33.986,00		43.105,00		42.869,00	
8	Hutan Mangrove Primer	485.358,70		3.210,00		5.765,00			
9	Hutan Mangrove Sekunder	29.038,83							
10	Hutan Rawang	-							
11	Hutan Tanaman (Transmigrasi)	1.811.584,88		189.553,75		186.614,00		181.684,06	
	Hutan Kars								
12	Belukar Tua	1.010.782,15		161.727,50		168.622,00		132.772,12	
13	Belukar Muda	14.083,00		38.778,70				49.052,55	
14	Belukar Tua Rawa	332.217,85		16.139,00		12.651,00			
15	Belukar Muda Rawa	19.182,00							
16	Belukar Muda dan Semak	1.867.960,57		140.509,45		175.275,45		152.855,17	
17	Belukar Muda dan Semak Rawa	319.724,89		41.449,00		40.484,00		59.603,61	
18	Perkebunan	264.794,12		4.919,00		3.580,00		50.316,75	
19	Transmigrasi	306,52							
20	Non Hutan	25.039,00							
21	Non Hutan Rawa	-							
22	Non Hutan Bekas Terbakar	-							
23	Karst	24.295,00		11.463,00		11.463,00			
24	Tambak	3.382,13							
25	Perfanian Campuran	79.906,47							
26	Tanah Terbuka/tambang	955.550,14		17.377,78		92.383,60		69.613,08	
27	Tertutup Awan/TAD	409.470,71		48.862,44		48.234,99		38.011,75	
28	Tambang	913,00		3.006,00		10.440,00		20.595,62	
29	Tubuh Air/Rawa/Danau	7.435,13		2.551,00		3.146,00		3.987,00	
30	Pemukiman							1.722,00	
	Rawa		9.646.730,83		1.088.301,84		1.119.272,66		16.559,60
	JUMLAH LUAS PENAFSIRAN								1.111.926,85

Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, Data s.d Oktober 2017

Keterangan: Luasan yang disajikan dalam tabel diatas menggambarkan luasan areal IUPHHK yang ditelaah oleh Direktorat IPSDH. Luas tersebut tidak menggambarkan luas total areal hutan Produksi Indonesia

TABEL V.3. PETA TEMATIK NON KEHUTANAN TAHUN 2017

NO.	PROVINSI	PETA TEMATIK UNTUK PEMBANGUNAN KEHUTANAN				GEOLOGI				LERENG			
		TANAH		IKLIM		1:1.000.000		1:250.000		1:1.000.000		1:250.000	
		Tersedia (lembar)	Tersedia (lembar)	Tersedia (lembar)	Tersedia (lembar)	Tersedia (lembar)	Tersedia (lembar)	Tersedia (lembar)	Tersedia (lembar)	Tersedia (lembar)	Tersedia (lembar)	Tersedia (lembar)	Tersedia (lembar)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Aceh	5	-	8	-	8	-	-	-	1	1	1	20
2	Sumatera Utara	8	1	10	1	8	1	1	1	1	1	1	19
3	Sumatera Barat	3	1	6	1	4	1	1	1	1	1	1	15
4	Riau	6	1	6	1	-	-	-	-	1	1	1	20
5	Kepulauan Riau	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	Jambi	3	1	3	1	-	-	-	-	1	1	1	10
7	Bengkulu	2	1	3	-	3	1	1	1	1	1	1	8
8	Kep.Bangka Belitung	2	-	5	-	5	-	2	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	4	1	5	1	4	1	1	1	1	1	1	15
10	Lampung	3	-	3	-	3	-	1	1	1	1	1	13
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
15	DI. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
20	Kalimantan Barat	14	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	10	1	-	-	-	12	-	-	1	1	1	-
22	Kalimantan Timur	18	1	-	-	-	2	-	-	-	-	30	-
23	Kalimantan Selatan	4	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-
24	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
25	Sulawesi Utara	9	1	9	1	1	1	1	1	1	1	1	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	40
27	Sulawesi Selatan	10	1	10	1	1	1	1	1	-	-	-	-
28	Sulawesi Tengara	6	1	6	1	1	-	-	-	1	1	1	20
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
30	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
31	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
32	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		111	13	78	10	52	11	23	215				

Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Data s.d Tahun 2017

TABEL V.4. PERKEMBANGAN PENDOKUMENTASIAN PETA DASAR TAHUN 2017

NO	PROVINSI	RUPA BUMI INDONESIA (RBI) (Lembar)										TOPOGRAFI (TOP) (Lembar)														
		1:25.000		1:50.000		1:100.000		1:250.000		1:1.000.000		1:500.000		1:200.000		1:250.000		1:1.000.000		1:250.000		1:1.000.000				
		Cetakan	Digital	Cetakan	Digital	Cetakan	Digital	Cetakan	Digital	Cetakan	Duplikat	Cetakan	Cetakan	Cetakan	Cetakan	Cetakan	Cetakan	Cetakan	Cetakan	Cetakan	Cetakan	Cetakan	Cetakan			
1	Aceh	-	-	96	113	-	-	11	-	4	5	99	22	-	-	4	4	4	4	11	4	4	2			
2	Sumatera Utara	-	-	71	154	-	-	12	9	2	5	102	22	-	-	7	2	1	1	9	2	9	2			
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	103	-	-	10	-	2	5	40	36	-	-	12	2	2	2	11	2	11	2		
4	Riau	-	-	150	158	-	-	14	-	4	5	78	74	-	-	16	4	5	5	16	4	16	4			
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Jambi	-	-	65	86	-	-	8	-	2	5	21	40	-	-	6	1	2	9	1	1	1	1	1		
7	Bengkulu	-	-	32	51	-	-	5	-	3	5	52	21	-	-	3	3	3	3	5	3	5	3	1		
8	Kep.Bangka Belitung	-	-	-	-	53	-	-	7	-	1	5	-	-	2	-	2	2	2	2	1	1	1	1		
9	Sumatera Selatan	-	-	14	151	-	-	9	-	2	5	112	64	-	-	7	4	2	2	10	2	10	2	2		
10	Lampung	6	-	70	-	-	3	-	2	5	77	38	-	-	7	4	2	6	2	1	1	1	1	1		
11	DIKI Jakarta	20	19	-	-	-	-	-	1	5	4	8	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
12	Jawa Barat	290	233	-	-	-	-	-	2	5	116	14	-	-	4	3	2	8	2	2	2	2	2	2		
13	Banten	94	80	-	-	-	-	-	1	5	30	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1		
14	Jawa Tengah	231	233	-	-	-	-	-	1	5	113	26	-	-	6	2	3	3	8	1	1	1	1	1		
15	D.I.Jogjakarta	14	28	-	-	-	-	-	1	5	15	-	-	-	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1		
16	Jawa Timur	374	344	-	-	-	-	-	4	5	164	-	-	-	4	-	2	10	2	2	2	10	2	2		
17	Bali	87	51	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	1		
18	Nusa Tenggara Barat	213	180	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	1	1	1	1		
19	Nusa Tenggara Timur	498	426	-	-	-	-	-	2	5	-	-	21	-	-	-	2	14	2	2	2	14	2	2		
20	Kalimantan Barat	-	-	84	260	-	-	4	-	3	5	170	-	53	-	3	2	12	3	2	2	12	3	2		
21	Kalimantan Tengah	-	-	194	242	-	-	4	-	4	5	-	-	11	-	-	4	18	4	2	1	2	1	1		
22	Kalimantan Timur	-	-	177	223	-	-	5	-	4	5	24	-	-	-	1	3	17	4	2	1	3	17	4		
23	Kalimantan Selatan	-	-	125	83	-	-	6	-	2	5	34	31	-	-	-	1	9	1	1	1	9	1	1		
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Gorontalo	-	-	32	35	-	-	1	-	1	5	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	1	1		
26	Sulawesi Utara	-	-	70	42	-	-	9	-	2	5	-	-	-	-	-	2	9	1	1	1	1	1	1		
27	Sulawesi Tengah	-	-	189	169	-	-	12	-	4	5	-	-	-	-	-	4	16	3	4	4	16	3	4		
28	Sulawesi Selatan	-	-	98	104	-	-	13	-	4	5	-	-	22	-	-	4	13	4	1	13	4	1	1		
29	Sulawesi Tenggara	-	-	77	76	-	-	6	-	2	5	-	-	-	-	-	2	7	2	1	2	7	2	1		
30	Sulawesi Barat	-	-	1	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	Maluku	298	-	-	174	-	-	-	-	4	5	-	-	42	-	-	2	6	2	1	1	6	2	1		
32	Maluku Utara	-	-	38	117	-	-	10	-	-	3	5	-	-	47	-	-	3	15	2	2	3	15	2	2	
33	Papua	-	-	-	458	10	-	-	-	8	5	27	100	-	-	40	-	-	7	44	7	44	7	44	3	3
34	Papua Barat	-	-	-	-	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUMLAH		2125	1594	1513	3359	10	10	139	9	77	150	1278	670	64	78	39	72	300	67	48	48	48	48	48	48	

Sumber : Direktorat Inventarisasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, Data s.d Tahun 2017

1

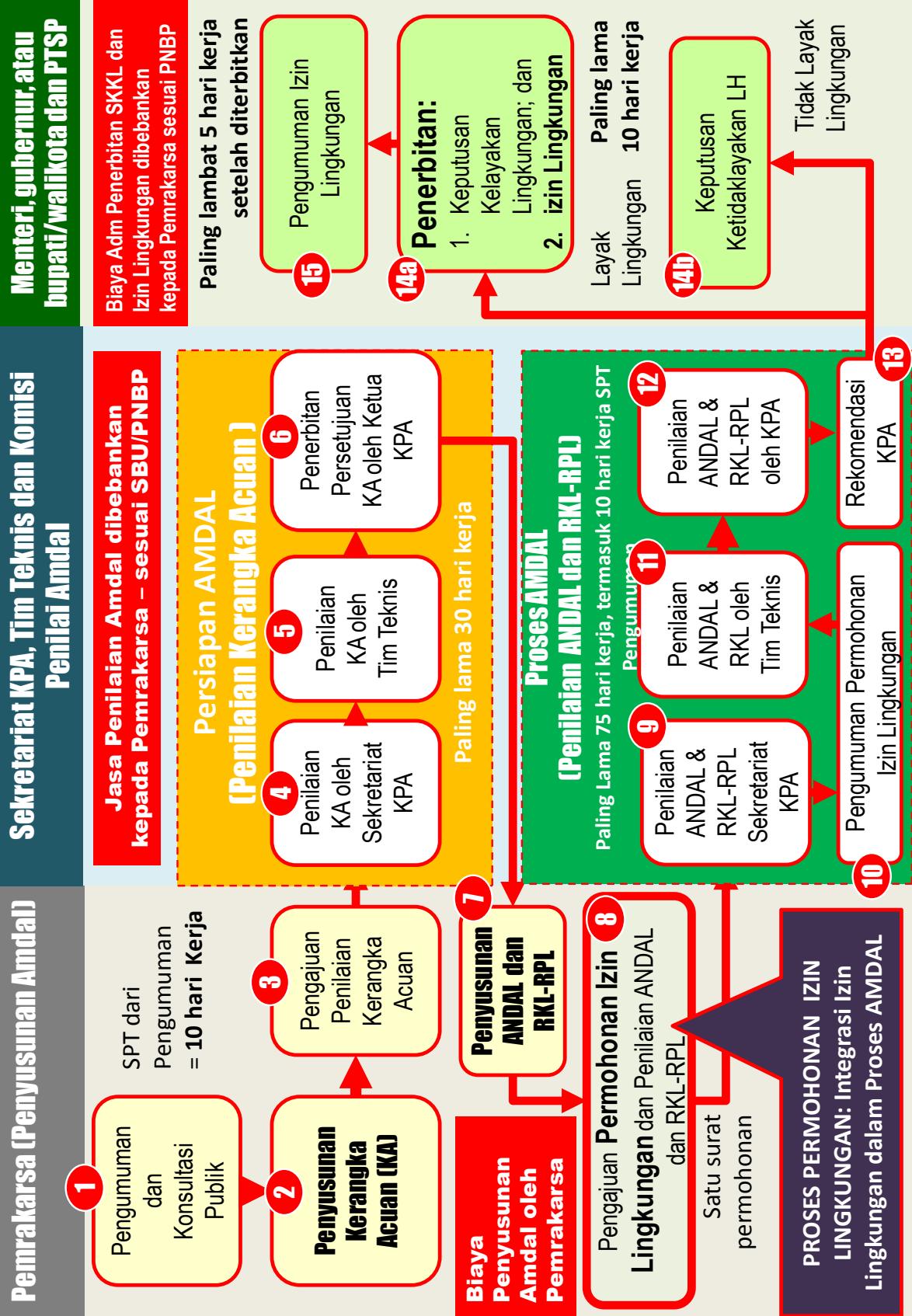
JOG : Joint Operations Graphic Ground
 TPC : Tactical Pilots Chart
 TTC : Topographic Tactical Chart
 ONC : Operational Navigation Chart

PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2017



GAMBAR 8. PROSES PENYUSUNAN DAN PENILAIAN AMDAL SERTA IZIN LINGKUNGAN (PP 27/2012)



GAMBAR 9. PROSES PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL SERTA IZIN LINGKUNGAN (PP 27/2012)

Pemrakarsa

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

Penyusunan UKL-UPL

Biaya
Penyusunan
UKL-UPL oleh
Pemrakarsa

Permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL-UPL

Pemeriksaan Administrasi

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

Catatan: Jangka waktu
Pemeriksaan Teknis UKL-
UPL: paling lama
14 Hari Kerja, termasuk
pengumuman permohonan izin
lingkungan DAN
tidak termasuk perbaikan/
penyempurnaan

Passal 40 PP 27/2012

Pemeriksaan UKL-
UPL dan Penerbitan
Rekomendasi UKL-
UPL dapat dilakukan
oleh:

- a. Pejabat yang
ditunjuk oleh
Menteri;
- b. Kepala Instansi LH
Provinsi; atau
- c. Kepala Instansi LH
Kab/Kota.

Penerbitan Rekomendasi
oleh Menteri, Gubernur
atau Bupati/Walikota.
Penerbitan Izin
Lingkungan oleh PTSP

Pemeriksaan Suhstansi UKL/UPL

Penerbitan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL & Izin Lingkungan

Pengumuman Izin Lingkungan



Pemrakarsa

TABEL VI.1. DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI DARI KEGIATAN AMDAL DAN UKL-UPL PADA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN BULAN JANUARI-NOVEMBER 2017

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
1.	Izin Lingkungan Kegiatan Survey Seismik 2D, di Wilayah Kerja Anggursi, Laut Jawa, Provinsi Jawa Barat Kepada PT. Pertamina Hulu Energi Anggursi,	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5/Menlhk/Setjen/PLA.4/1/2017	6 Januari 2017
2.	Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pemboran Eksplorasi Sumur Mako South-1 Blok Duyung (Lepas Pantai) di Laut Cina Selatan oleh West Natuna Exploration Ltd (WNEL)	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 18/Menlhk/Setjen/PLA.4/1/2017	13 Januari 2017
3.	Rekomendasi Rencana Kegiatan Pemboran Eksplorasi Sumur Mako South-1 Blok Duyung (Lepas Pantai) di Laut Cina Selatan oleh West Natuna Exploration Ltd (WNEL)	Rekomendasi	Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor:S.1053/PKTL/PDLUK/PLA.4/11/2016	30 November 2016
4.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas berupa Pemasangan Umbilikal dari Anjungan Gajah Baru ke Anjungan Naga dan Pelikan di Blok A West Natuna PSC, Laut Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, oleh Premier Oil Natuna Sea B.V	SKKL	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.41//Menlhk/Setjen/PLA.4/1/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 88 Tahun 2013	30 Januari 2017
5.	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas berupa Pemasangan Umbilikal dari Anjungan Gajah Baru ke Anjungan Naga dan Pelikan di Blok A West Natuna PSC, Laut Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, oleh Premier Oil Natuna Sea B.V.	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.42//Menlhk/Setjen/PLA.4/1/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 89 Tahun 2013	30 Januari 2017
6.	Rencana Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban di Desa Patimban, Kecamatan Kalentambo, Desa Gempol, Desa Kotasari, Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakajaya, dan Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat oleh Direktorat Kepelabuhanan,	Surat Keputusan Kerangka Acuan	Surat Keputusan Ketua Komisi Penilaian AMDAL Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor	31 Januari 2017

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
1	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan		SK.5/PKTL/PDLUK/PLA.4/1/2017	
7.	Rencana Pembangunan Bandar Udara New Yogyakarta International Airport, Di Desa Palihan, Desa Glagah, Desa Jangkaran, Desa Sidutan, Dan Desa Kebon Rejo, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh PT. Angkasa Pura I (Persero).	Surat Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK..3/PKTL/PDLUK/PLA.4/1/2017	Surat Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK..3/PKTL/PDLUK/PLA.4/1/2017	26 Januari 2017
8.	Rencana Kegiatan Pengembangan Kilang Beserta Fasilitas Pendukung untuk Kegiatan Operasional RU V Balikpapan di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, oleh Pertamina RU V Balikpapan	Surat Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK..4/PKTL/PDLUK/PLA.4/1/2017	Surat Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK..4/PKTL/PDLUK/PLA.4/1/2017	26 Januari 2017
9.	Rencana Kegiatan Pengembangan Dermaga Pelabuhan Jayapura di Kota Jayapura, Provinsi Papua oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Jayapura	SKKL	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.72/ Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2017	7 Februari 2017
10.	Kegiatan Pengembangan Dermaga Pelabuhan Jayapura di Kota Jayapura, Provinsi Papua oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Jayapura	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.73/ Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2017	7 Februari 2017
11.	Rencana Kegiatan Survey Seismik 2D dan 3D, di Blok West Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Eni West Timor Limited	Rekomendasi	Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor:S.69/Menlhk-PKTL/PDLUK/PLA.4/1/2017	24 Januari 2017
12.	Kegiatan Survey Seismik 2D dan 3D, di Blok West Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Eni West Timor Limited	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.70/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2017	7 Februari 2017
13.	Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Penumpukan (Kegiatan Reklamasi dan Pembangunan Lapangan Penumpukan Kontainer) Pelabuhan Tarakan, di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Tarakan	SKKL	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.95/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2017	17 Februari 2017
14.	Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.430/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17 Februari 2017

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
1	Pelabuhan Tarakan di Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Tarakan	SKKL	Nomor SK.96/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2017	
15.	Rencana Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban di Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Desa Kotasari, Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara dan Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat kepada Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 135/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2017	28 Februari 2017
16.	Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban di Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Desa Kotasari, Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara dan Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat kepada Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.136/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2017	28 Februari 2017
17.	Rencana Kegiatan Survey Seismik 2D dan 3D, di Blok Offshore Timor Sea 1, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Eni Indonesia OTS 1 Limited	Rekomendasi	Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor.S.68/Menlhk-PKTL/PDLUK/PLA.4/1/2017	24 Januari 2017
18.	Kegiatan Survey Seismik 2D dan 3D, di Blok Offshore Timor Sea 1, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Eni Indonesia OTS 1 Limited	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 118/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2017	22 Februari 2017
19.	Rencana Kegiatan Peleburan Aluminium Terintegrasi dengan Kegiatan Stamping dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Mandiri Pratama Intilogam	SKKL	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 111/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2017	21 Februari 2017
20.	Kegiatan Peleburan Aluminium Terintegrasi dengan Kegiatan Stamping dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Mandiri Pratama Intilogam	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.121/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2017	22 Februari 2017
21.	Rencana Kegiatan Normalisasi Kali Cisadane Sepanjang 65 km melintasi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	SK KA	Surat Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.10/PKT1/PDLUK/PLA.4/3/2017	8 Maret 2017

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
22.	Rencana Kegiatan Pengembangan Dermaga VII Pelabuhan Penyeberangan Merak – Bakauheni di Kota Cilegon, Provinsi Banten dan Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	SKKL	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.148/Menlhk/Setjen/PLA.4/3/2017	15 Maret 2017
23.	Kegiatan Pengembangan Dermaga VII Pelabuhan Penyeberangan Merak – Bakauheni di Kota Cilegon, Provinsi Banten dan Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.149/Menlhk/Setjen/PLA.4/3/2017	15 Maret 2017
24.	Rencana Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Ternate, di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ternate	SKKL	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.144/Menlhk/Setjen/PLA.4/3/2017	13 Maret 2017
25.	Kegiatan Pelabuhan Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ternate	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.145/Menlhk/Setjen/PLA.4/3/2017 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.453/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016	13 Maret 2017
26.	Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW (Dua Ratus Lima Puluh Megawatt), di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan kepada PT. Supreme Energy Rantau Dedap	SKKL	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.151/Menlhk/Setjen/PLA.4/3/2017	15 Maret 2017
27.	Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW (Dua Ratus Lima Puluh Megawatt), di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, kepada PT. Supreme Energy Rantau Dedap	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.152/Menlhk/Setjen/PLA.4/3/2017	15 Maret 2017
28.	Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat oleh Kantor Kesyahbandaran Pelabuhan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak dan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)	SK KA	Surat Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.14/PKTL/PDLUKI/PLA.4/2017	17 Maret 2017

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
29.	Rencana Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Nunukan (Tunon Taka), Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Nunukan	SKKL	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.110/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2017	21 Februari 2017
30.	Kegiatan Operasional Pelabuhan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Nunukan	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.120/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2017	21 Februari 2017
31.	Rencana Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon	SKKL	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.115/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2017	22 Februari 2017
32.	Kegiatan Operasional Pelabuhan Ambon dan Sarana Penunjangnya, Kota Ambon, Provinsi Maluku Kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.116/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2017	22 Februari 2017
33.	Rencana Kegiatan Pengembangan Kilang berserta Fasilitas Pendukung untuk Operasional Kegiatan Pertamina RU V Balikpapan Kapasitas 260 MBSD menjadi 360 MBSD di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Pertamina RU V Balikpapan	SKKL	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.176/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017	4 April 2017
34.	Kegiatan Operasional Kegiatan Pertamina RU V Balikpapan Kapasitas 360 MBSD berserta Fasilitas Pendukungnya di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Pertamina RU V Balikpapan	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.177/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017	4 April 2017
35.	Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) Rencana Kegiatan Perluasan Pelabuhan Arar di Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sorong	SK KA	Surat Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.15/PKTLP/DLUK/PLA.4/2017	tanggal 6 April 2017
36.	Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.504/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penempatan Corridor Storage Tanker (CST) di Perairan Selat Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	Perubahan Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.182/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017	April 2017

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
37.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Sorong,	SKKl	SK MENLHK Nomor SK.190/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017	17 April 2017
38.	Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Pelabuhan Sorong beserta fasilitas penunjangnya, di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat kepada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Sorong	Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.191/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017	17 April 2017
39.	Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Pengelolaan Limbah (B3 dan Non B3) di Tanjung Batu, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur kepada PT. PSOB Reksa Bumi Indonesia (TUKS), Pangkalan Logistik dan Fasilitas Pendukung Kegiatan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Offshore Supply Base) Tajiung Batu, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur kepada PT. Petrosea Tbk	Perubahan Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.196/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017	20 April 2017
40.	Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), Pangkalan Logistik dan Fasilitas Pendukung Kegiatan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Offshore Supply Base) Tajiung Batu, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur kepada PT. Petrosea Tbk	Perubahan Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.197/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017	20 April 2017
41.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Banjarmasin (Terminal Trisakti-Basirih-Martapura Baru), Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan kepada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Banjarmasin	SKKl	SK MENLHK Nomor SK. 194/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017	17 April 2017
42.	Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Pelabuhan Banjarmasin beserta Fasilitas Penunjangnya, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan kepada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Banjarmasin	Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.195/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017	17 April 2017
43.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Balikpapan Environmental Services	SKKl	SK MENLHK Nomor SK. 203/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017	20 April 2017
44.	Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Balikpapan Environmental Services	Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.204/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017	20 April 2017
45.	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Rencana Kegiatan Uprating Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV GIS 150 KV Gandaria-GI 150 KV Cibinong melintasi Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta serta Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat	Rekomendasi	Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S. 325/Menlhk.PKTL/PDLUK/PLA.4/21/2017	6 April 2017

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
46.	Izin Lingkungan Kegiatan Upgraling Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV GIS 150 KV Gandaria-GI 150 KV Cibinong melintasi Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta serta Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat	Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.213/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017	28 April 2017
47.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap (Perpanjangan DAM Penahan Lumpur Eksisting sepanjang 250 meter dan Revitalisasi Dermaga IV Eksisting seluas 33 meter x 86,9 meter), Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)	SKKL	SK MENLHK Nomor SK.214/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017	28 April 2017
48.	Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Pelabuhan Cilacap beserta Sarana Penunjangnya, Dikabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah Kepada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero),	Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor:SK.215/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2017	28 April 2017
49.	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Pemboran Eksplorasi di Wilayah Kerja East Seruway, Perairan Selat Malaka, Provinsi Aceh kepada KrisEnergy East Seruway B.V.		Surat Rekomendasi Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.359/Menlhk-PKTL/PDLUK/PLA.4/4/2017	17 April 2017
50.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Eksplorasi di Wilayah Kerja East Seruway, Perairan Selat Malaka, Provinsi Aceh kepada KrisEnergy East Seruway B.V.		SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.227/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2017	10 Mei 2017
51.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Industri Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non B3 di Desa Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Rizqi Bari Utama Internasional	SKKL	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.217/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2017	2 Mei 2017
52.	Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non B3 di Desa Bojomangu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kepada PT. Rizqi Bari Utama Internasional	Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.218/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2017	2 Mei 2017
53.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok Tahap I (Rencana Pendalamau Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan Tanjung Priok) Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)	SKKL	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.237/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2017	17 Mei 2017

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
54.	Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 293 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok Tahap I (Rencana Pendalam Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan Tanjung Priok) Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.238/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2017	17 Mei 2017
55.	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Rencana Kegiatan Survei Seismik 3D di Wilayah Kerja Andaman III, Selat Malaka, Provinsi Aceh kepada Talisman Andaman B.V.	Rekomendasi	Surat Rekomendasi Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S. 408/Menlhk.PKTL/PDLUK/PLA.4/4/2017	27 April 2017
56.	Izin Lingkungan Kegiatan Kegiatan Survey Seismik 3D di Wilayah Kerja Andaman III, Selat Malaka, Provinsi Aceh kepada Talisman Andaman B.V.	Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.243/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2017	19 Mei 2017
57.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Manokwari, di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manokwari	SKKL	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.258/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2017	31 Mei 2017
58.	Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Pelabuhan Manokwari, di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manokwari	Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.259/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2017	31 Mei 2017
59.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo beserta Fasilitas Pendukungnya di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Bajo, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	SKKL	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.253/Menlhk/Setjen/PLA.4/	29 Mei 2017
60.	Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Pelabuhan Labuan Bajo beserta Fasilitas Pendukungnya di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Bajo, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.254/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2017	29 Mei 2017
61.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Alir Rambong, Alur Siwah dan Julu Rayeu di Wilayah Kerja (Blok) A, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh oleh PT. Medco E&P Malaka	SKKL	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.244/	19 Mei 2017

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
62.	Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Alur Rambong, Alur Siwah dan Julu Rayeu di Wilayah Kerja (Blok) A, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh oleh PT. Medco E&P Malaka	Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.245/Menlhk/Sejjen/PLA.4/5/2017	19 Mei 2017
63.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemanisasi Transmisi Gas Bumi Grissik-Duri dan Grissik-Batam (Trans Sumatera Tengah) di Kota Batam, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, serta Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan kepada PT Transportasi Gas Indonesia Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Bitung, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Bitung	Izin Lingkungan	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.293/Menlhk/Sejjen/PLA.4/6/2017	19 Juni 2017
64.	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Bitung, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Bitung	SKKL	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.247/Menlhk/Sejjen/PLA.4/5/2017	19 Mei 2017
65.	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Bitung, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Bitung	Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.248/Menlhk/Sejjen/PLA.4/5/2017	19 Mei 2017
66.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Peningkatan Produksi Lapangan Minyak Banyu Urip Blok Cepu sampai dengan maksimum 220.000 BOPD di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur kepada ExxonMobil Cepu Ltd	SKKL	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.341/Menlhk/Sejjen/PLA.4/7/2017	24 Juli 2017
67.	Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 255 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak Banyu Urip di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur oleh Mobil Cepu Ltd	Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.342/Menlhk/Sejjen/PLA.4/7/2017	24 Juli 2017
68.	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Rencana Kegiatan Seismik 3D di Blok Cenderawasih, Perairan Laut Teluk Cenderawasih, Provinsi Papua oleh Repsol Exploracion Cenderawasih I.B.V.	Rekomendasi	Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S. 807/Menlhk.PKTL/PDLUK/PLA.4/7/2017	13 Juli 2017

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
69.	Izin Lingkungan Kegiatan Survei Seismik 3D di Blok Cenderawasih, Perairan Laut Teluk Cenderawasih, Provinsi Papua oleh Repsol Exploracion Cenderawasih IV.B.V.	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.362/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2017	2 Agustus 2017
70.	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Rencana Kegiatan Survei Seismik 3D di Blok Cenderawasih Bay IV, Perairan Laut Teluk Cenderawasih, Provinsi Papua oleh Repsol Exploracion Cenderawasih IV.B.V.	Rekomendasi	Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S. 808/Menlhk.PKTL/PDLUK/PLA.4/7/2017	13 Juli 2017
71.	Izin Lingkungan Kegiatan Survei Seismik 3D di Blok Cenderawasih Bay IV, Perairan Laut Teluk Cenderawasih, Provinsi Papua oleh Repsol Exploracion Cenderawasih IV.B.V.	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.363/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2017	2 Agustus 2017
72.	Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL) Rencana Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Tenua Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tenau Kupang	SK KA	Surat Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.21/PKTL/PDLUK/PLA.4/4/2017	28 April 2017
73.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Pelabuhan Bungkutoko (Kendari New Port), Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kendari	SKKL	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.366/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2017	7 Agustus 2017
74.	Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pelabuhan Bungkutoko (Kendari New Port) berserta Fasilitas Pendukungnya, Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Kendari	Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.367/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2017	7 Agustus 2017
75.	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 335 Tahun 2013 Tanggal 13 September 2013 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Blok Corridor, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh Conocophillips (Grissik) Ltd	Izin Lingkungan	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.403/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2017	21 Agustus 2017
76.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Bandar Udara Juwata	SKKL	SK Menteri Lingkungan	9 Agustus 2017

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
	Tarakan Beserta Fasilitas Penunjangnya di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara Kepada Unit Penyelempgara Bandar Udara Kelas I Utama Juwata Tarakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan	Izin Lingkungan	Hidup dan Kehutanan Nomor SK.376/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2017	
77.	Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Bandar Udara Juwata Tarakan Beserta Fasilitas Penunjangnya di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara kepada Unit Penyelempgara Bandar Udara Kelas I Utama Juwata Tarakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan	Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.377/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2017	9 Agustus 2017
78.	Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 108 Tahun 2013 tanggal 2 April 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kontrak Mahakam, South Mahakam dan Balikpapan Base, Provinsi Kalimantan Timur oleh Total E&P Indonesia	Izin Lingkungan	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.378/Menlhk/Setjen/PLB.3/8/2017	9 Agustus 2017
79.	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 189 Tahun 2013 tanggal 3 Juni 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Blok B Natuna, di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau oleh ConocoPhillips Indonesia Inc Ltd	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.400/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2017	21 Agustus 2017
80.	Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Industri Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kawasan Industri Candi, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, oleh PT. Wastec International	SK KA	Surat Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.38/PKTL/PDLUK/PKTL.4/8/2017	25 Agustus 2017
81.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Lapangan Uap dan PLTP (2 x 55 MW) di Bukit Daun dan Pengembangan Lapangan Uap di Huluais, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, oleh PT Pertamina Geothermal Energy	SKKL	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.446/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2017	31 Agustus 2017
82.	Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Lapangan Uap dan PLTP (2 x 55 MW) di Bukit Daun dan Pengembangan Lapangan Uap di Huluais, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu kepada PT. Pertamina Geothermal Energy	Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.450/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2017	31 Agustus 2017
83.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Pertamina-Rosnett Terintegrasi BBM dan Petrokimia beserta Fasilitas Penunjangnya di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur oleh PT. Pertamina (Persero)	SKKL	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.463/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2017	6 September 2017

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
84.	Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Pertamina-Rosneft Terintegrasi BBM dan Petrokimia berserta Fasilitas Penunjangnya di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur oleh PT. Pertamina (Persero)	Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.464/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2017	6 September 2017
85.	Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) – Penyimpanan Gas Alam Cair Terapung (LNG) Floating Storage Unit dan Fasilitas Regasifikasi, di Banten, Provinsi Banten, oleh PT. Nusantara Energy Plant Indonesia	SK KA	SK Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.39/PKTL/PDLUK/PLA.4/8/2017	28 Agustus 2017
86.	Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Tembaga- Emas Batu Hijau dan Fasilitas Pendukungnya di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh PT Newmont Nusa Tenggara	Izin Lingkungan	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.482/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2017	12 September 2017
87.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Non B3 di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Multi Hamna Kreasindo	SKKL	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.483/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2017	12 September 2017
88.	Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Non B3 di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, kepada PT. Multi Hamna Kreasindo	Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.484/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2017	12 September 2017
89.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) IV Cilacap Pembaruan Fasilitas Eksisting dan Pembangunan Kilang Baru berserta Fasilitas Penunjangnya di Kecamatan Cilacap Tengah, Kecamatan Cilacap Selatan, dan Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah oleh PT Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) IV Cilacap	SKKL	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.488/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2017	12 September 2017
90.	Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2013 Tanggal 21 Januari 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Proyek Kilang Langit Biru Cilacap dan Kegiatan Maintenance Jalur Cross Country di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah oleh PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit IV Cilacap	Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.489/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2017	12 September 2017
91.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Bandar Udara	SKKL	SK Menteri Lingkungan	24 Agustus 2017

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
	Internasional Soekarno - Halta (Pengembangan Terminal 4 Tahap 1, Landas Pacu 3 dan Automatic People Mover System berserta Fasilitas Penunjangnya) di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten oleh PT Angkasa Pura II (Persero)		Hidup dan Kehutanan Nomor SK.438/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2017	
92.	Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 02.3.02 Tahun 2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta oleh PT Angkasa Pura II (Persero)	Izin Lingkungan	SK MENLHK Nomor SK.439/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2017	24 Agustus 2017
93.	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UPL) Rencana Kegiatan Pemboran 17 ('Tujuh Belas) Sumur Eksplorasi di Wilayah Kerja North Madura II, Lepas Pantai Utara Madura, Provinsi Jawa Timur oleh PC North Madura II Ltd	Rekomendasi	Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan S.1080/MENLHK-PKTL/PDLUK/PLA.4/8/2017	30 Agustus 2017
94.	Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 328/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2016 tanggal 27 April 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi di Wilayah Kerja North Madura II Lepas Pantai Utara Madura, Provinsi Jawa Timur oleh PC North Madura II Ltd	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.511/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2017	25 September 2017
95.	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan Hidup (UPL) Rencana Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi di Blok Aru, Perairan Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat kepada Ophir Energy Indonesia (Aru) Limited	Rekomendasi	surat Rekomendasi Dirjen PKTL Nomor S.1142/Menlhk-PKTL/PDLUK/PLA.4/9/2017	15 September 2017
96.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi di Blok Aru, Perairan Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat kepada Ophir Energy Indonesia (Aru) Limited	Izin Lingkungan	SK MENLHK NOMOR SK 526/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017	2 Oktober 2017

Sumber: Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data s.d Tahun 2017

PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2017



TABEL VII.1. STATUS PERKEMBANGAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (JANUARI 2017 - SKR)

No	Nama KLHS	Nomor surat permohonan	Perkembangan	Nomor surat evaluasi / validasi	Tanggal
1	2	3	4	5	6
1	REVISI RTRW KOTA SERANG 2010-2030		Evaluasi Kelayakan	S.12/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/1/2017	26 Januari 2017
2	RPMKD KABUPATEN ROKAN HULU		Evaluasi Kelayakan	S.8/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/1/2017	23 Januari 2017
3	RPMKD Kabupaten Gorontalo		Evaluasi Kelayakan	S.16/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/2/2017	9 Februari 2017
4	RPMKD Kabupaten Manggarai Barat		Evaluasi Kelayakan	S.17/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/2/2017	9 Februari 2017
5	RTR KSP Pantai Timur Provinsi Jambi		Evaluasi Kelayakan	S.19/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/0/2017	14 Februari 2017
6	RTR KS Pantura DKI Jakarta	237/1.794.2 tgl 21 Maret 2017 518/-1.794.2 tgl 26 April 2017	Validasi BerTahap Validasi Akhir	S.317/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2017 S.834/PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2017	06 April 2017 29 Mei 2017
7	RZWP3K Jawa Timur		Berita Acara Rapat	BA.01/PDLKWS/PKLHWS/06/2017	31 Mei 2017
8	RZWP3K Sumatera Barat		Berita Acara Rapat	BA.02/PDLKWS/PKLHWS/06/2017	7 Juni 2017
9	RTR KSP Gorontalo		Berita Acara Rapat	BA.03/PDLKWS/PKLHWS/06/2017	13 Juni 2017
10	RTR KSP Danau Limboto		Berita Acara Rapat	BA.04/PDLKWS/PKLHWS/06/2017	13 Juni 2017
11	RTR KSP Agropolitik Alas Utan Provinsi NTB		Berita Acara Rapat	BA.05/PDLKWS/PKLHWS/06/2017	13 Juni 2017
12	RZWP3K Kalimantan Selatan		Berita Acara Rapat	BA.07/PDLKWS/PKLHWS/07/2017	5 Juli 2017
13	RTRW Kabupaten Sumba Tengah		Berita Acara Rapat	BA.08/PDLKWS/PKLHWS/07/2017	5 Juli 2017
14	RZWP3K NTB		Berita Acara Rapat	BA.09/PDLKWS/PKLHWS/07/2017	10 Juli 2017
15	RZWP3K Jawa Tengah		Berita Acara Rapat	BA.10/PDLKWS/PKLHWS/07/2017	10 Juli 2017
16	RZWP3K Sulawesi Tengah		Berita Acara Rapat	BA.11/PDLKWS/PKLHWS/07/2017	21 Juli 2017
17	RZWP3K Jawa Timur	523/9705/120/4/2017 tgl 7 Juli 2017	Belum dapat Validasi	S.1031/PKTL/PDKWS/PLA.3/6/2017	21 Juli 2017
18	RTR KSP Danau Limboto		Sudah Validasi	S.1089/PKTL/PDLKWS/PLA.3/7/2017	28 Juli 2017
19	RZWP3K Sulawesi Barat		Berita Acara Rapat	BA.12/PDLKWS/PKLHWS/08/2017	4 Agustus 2017
20	RZWP3K NTB		Berita Acara Rapat	BA.13/PDLKWS/PKLHWS/08/2018	22 September 2017
21	RPMKD Gorontalo		Berita Acara Rapat	BA.14/PDLKWS/PKLHWS/09/2017	28 September 2017
22	RPMKD Gorontalo	660/DLHK.PPLH/964/I/X/2017	Belum dapat Validasi	S.145/PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2017	2 Oktober 2017
23	RZWP3K Sumatera Barat	523/1976.DKP.3/I/X/2017 tgl 4 Sept 2017	Belum dapat Validasi	S.144/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/10/2017	2 Oktober 2017
24	RZWP3K Jawa Timur	523/1493/1/120/4/2017 tgl 16 Agustus 2017	Sudah Validasi	S.1377/PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2017	6 Oktober 2017
25	Revisi RTRW Jawa Tengah	660/1/0013630 tgl 31 Ags 2017	Sudah Validasi	S.1263/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2017	7 Oktober 2017
26	RPMKD Gorontalo	522/DLHK.PPLH/3624/2017 tgl 11 Okt 2017	Sudah Validasi	S.1533/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	06 Nopember 2017
27	RZWP3K Sulawesi Tengah	146/540/Dis.Lutkan tgl 29 Sept 2017	Sudah Validasi	S.1534/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	06 Nopember 2017
28	Revisi RTRW DIY	650/17940 tgl 112 Okt 2017	Sudah Validasi	S.1535/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	06 Nopember 2017
29	RPMKD Bangka belitung	660/3537/DLH tgl 23 Okt 2017	Sudah Validasi	S.1536/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	06 Nopember 2017
30	RZWP3K NTB	522/1998.1/PPUD/LHK/2017 tgl 3 Okt 2017	Sudah Validasi	S.1537/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	06 Nopember 2017
31	RZWP3K NTT	BU.523/04/PERIKANAN/17 tgl 13 Okt 2017	Sudah Validasi	S.1570/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	06 Nopember 2017

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d November 2017

TABEL VII.2. STATUS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR PULAU PULAU KECIL (RZWP3K) 2017

No	Provinsi	Pembahasan & Nomor	Status	Validasi & Nomor	Tanggal BA	Tanggal Surat
1	2	3	4	5	6	
1	DKI Jakarta					
2	Banten					
3	Jawa Barat					
4	Jawa Timur	BA.01/PDLKWS/PKLHWS/06/2017	BELUM VALIDASI S.1031/PKTL/PDKWS/PLA.3/6/2017			21 Juli 2017
5	Jawa Tengah	BA.10/PDLKWS/PKLHWS/07/2017				
6	DI. Yogyakarta					
7	Nangroe Aceh Darussalam					
8	Sumatera Utara					
9	Sumatera Barat	BA.02/PDLKWS/PKLHWS/06/2017	BELUM VALIDASI S.144/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/10/2017			7 Juni 2017
10	Riau					2 Oktober 2017
11	Kepulauan Riau					
12	Jambi					
13	Sumatera Selatan					
14	Bangka Belitung					
15	Bengkulu					
16	Lampung					
17	Bali					
18	Nusa Tenggara Barat	BA.09/PDLKWS/PKLHWS/07/2017,	S.1537/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017			10 Juli 2017
19	Nusa Tenggara Timur		S.1570/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017			06 Nopember 2017
20	Kalimantan Barat					06 Nopember 2017
21	Kalimantan Tengah					
22	Kalimantan Selatan	BA.07/PDLKWS/PKLHWS/07/2017				5 Juli 2017
23	Kalimantan Timur					
24	Kalimantan Utara					
25	Sulawesi Utara					
26	Sulawesi Barat					
27	Sulawesi Tengah	BA.12/PDLKWS/PKLHWS/08/2017	4 Agustus 2017			
28	Sulawesi Tenggara	BA.11/PDLKWS/PKLHWS/07/2017	21 Juli 2017			06 Nopember 2017
29	Sulawesi Selatan					
30	Gorontalo					
31	Maluku					
32	Maluku Utara					
33	Papua Barat					

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d November 2017

TABEL VII.3. STATUS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS (KLHS) PROVINSI (RTR KSP) 2017

No	Nama Provinsi	Judul RTR	Pembahasan & Nomor	Status	Validasi & Nomor	Tanggal BA	Tanggal Surat
1	2	3	4		5	6	7
1	DKI Jakarta	RTR Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta			Validasi ber tahap S.3/17/MENL-HK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2017 Validasi akhir S.1536/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	14 Februari 2017 6 November 2017	
2	Banten						
3	Jawa Barat						
4	Jawa Timur	RTR KSP Pelabuhan Sendang Biru RTR KSP Agropolitan Ijen RTR KSP Agropolitan Wilis	BA.15/PDLKWS/PKLLHWS/11/2017 BA.16/PDLKWS/PKLLHWS/11/2017 BA.17/PDLKWS/PKLLHWS/11/2017			27 November 2017 27 November 2017 27 November 2017	
5	Java Tengah						
6	DI. Yogyakarta						
7	Nangroe Aceh Darussalam						
8	Sumatera Utara						
9	Sumatera Barat						
10	Riau						
11	Kepulauan Riau						
12	Jambi	RTR KSP Pantai Timur		S.19/PDLKWS/PKLLHWS/PLA.3/02/2017			
13	Sumatera Selatan						
14	Bangka Belitung						
15	Bengkulu						
16	Lampung						
17	Bali						
18	Nusa Tenggara Barat						
19	Nusa Tenggara Timur						
20	Kalimantan Barat						
21	Kalimantan Tengah						
22	Kalimantan Selatan						
23	Kalimantan Timur						
24	Kalimantan Utara						
25	Sulawesi Utara						
26	Sulawesi Barat						
27	Sulawesi Tengah						
28	Sulawesi Tenggara						
29	Sulawesi Selatan						
30	Gorontalo	RTR KSP Kota Gorontalo RTR KSP Danau Limboto	BA.03/PDLKWS/PKLLHWS/06/2017 BA.04/PDLKWS/PKLLHWS/06/2017	S.1089/PKTL/PDLKWS/PLA.3/7/2017	13 Juni 2017 13 Juni 2017	13 Juni 2017 28 Juli 2017	
31	Maluku						
32	Maluku Utara						
33	Papua Barat						

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d November 2017

TABEL VII.4. STATUS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) 2017

No	Provinsi	Pembahasan & Nomor	Status	Tanggal BA		Tanggal Surat
				1	2	
1	DKI Jakarta					
2	Banten					
3	Jawa Barat					
4	Jawa Timur					
5	Jawa Tengah					
6	DI. Yogyakarta					
7	Nangroe Aceh Darussalam					
8	Sumatera Utara					
9	Sumatera Barat					
10	Riau					
11	Kepulauan Riau					
12	Jambi					
13	Sumatera Selatan					
14	Bangka Belitung					
15	Bengkulu					
16	Lampung					
17	Bali					
18	Nusa Tenggara Barat					
19	Nusa Tenggara Timur					
20	Kalimantan Barat					
21	Kalimantan Tengah					
22	Kalimantan Selatan					
23	Kalimantan Timur					
24	Kalimantan Utara					
25	Sulawesi Utara					
26	Sulawesi Barat					
27	Sulawesi Tengah					
28	Sulawesi Tenggara					
29	Sulawesi Selatan					
30	Gorontalo					
31	Maluku					
32	Maluku Utara					
33	Papua Barat					

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d November 2017

TABEL VII.5. STATUS KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2017

No	Provinsi	Status	Pembahasan & Nomor		Tanggal BA	Tanggal Surat
			1	2	3	4
1	DKI Jakarta				5	6
2	Banten					
3	Jawa Barat					
4	Jawa Timur					
5	Jawa Tengah					
6	DI. Yogyakarta					
7	Nangroe Aceh Darussalam					
8	Sumatera Utara					
9	Sumatera Barat					
10	Riau					
11	Kepulauan Riau					
12	Jambi					
13	Sumatera Selatan					
14	Bangka Belitung					
15	Bengkulu					
16	Lampung					
17	Bali					
18	Nusa Tenggara Barat					
19	Nusa Tenggara Timur					
20	Kalimantan Barat					
21	Kalimantan Tengah					
22	Kalimantan Selatan					
23	Kalimantan Timur					
24	Kalimantan Utara					
25	Sulawesi Utara					
26	Sulawesi Barat					
27	Sulawesi Tengah					
28	Sulawesi Tenggara					
29	Sulawesi Selatan					
30	Gorontalo					
					Belum Validasi, S.145/PKT/PDLKWS/PLA.3/10/2017	28 September 2017
						2 Oktober 2017
31	Maluku					
32	Maluku Utara					
33	Papua Barat					

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d November 2017

TABEL VII.6. PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL

NO	URAJAN	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH NASIONAL			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PP RPPLH	PP RPPLH
1	2	3	4	5	6
1.	RPPLH Nasional	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor-2017, Data s.d November 2017

Catatan : RPPLH Nasional disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

TABEL VII.7. PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PERTINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

NO	EKOREGION / PROVINSI	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH PROVINSI			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
1	2	3	4	5	6
A. Ekoregion Jawa					
1.	DKI Jakarta	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
2.	Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
3.	Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
4.	Banten	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
5.	Jawa Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
6.	D.I. Yogyakarta	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
B. Ekoregion Sumatera					
1.	Sumatera Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
2.	Bengkulu	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
4.	Riau	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
5.	Sumatera Barat	Sudah dilaksanakan	sudah disusun	Belum disusun	-
6.	Sumatera Utara	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
7.	Aceh	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
8.	Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
9.	Kepulauan Riau	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
10.	Kepulauan Bangka Belitung	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
C. Ekoregion Kalimantan					
1.	Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
2.	Kalimantan Utara	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Kalimantan Barat	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
4.	Kalimantan Timur	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
5.	Kalimantan Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / PROVINSI	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH PROVINSI					
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP		DOKUMEN RPPLH		RANCANGAN PERDA RPPLH	
1	2	3	4	5	6		
D.	Ekoregion Sulawesi						
1.	Sulawesi Utara	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	Belum disusun	-
2.	Gorontalo	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	Belum disusun	-
3.	Sulawesi Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	Belum disusun	-
4.	Sulawesi Tenggara	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	Belum disusun	-
5.	Sulawesi Barat	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	Belum disusun	-
5.	Sulawesi Selatan	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	Belum disusun	-
E.	Ekoregion Bali Nusa Tenggara						
1.	Bali	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	Belum disusun	-
2.	Nusa Tenggara Barat	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	Belum disusun	-
3.	Nusa Tenggara Timur	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	Belum disusun	-
F.	Ekoregion Maluku						
1.	Maluku Utara	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	Belum disusun	-
2.	Maluku	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	Belum disusun	-
G.	Ekoregion Papua						
1.	Papua Barat	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	Belum disusun	-
2.	Papua	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	Belum disusun	-

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor-2017, Data s.d November 2017

Catatan : RPPLH Provinsi disusun oleh Pemerintah Provinsi, KLHK melakukan asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi

TABEL VII.8. PROGRES PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA				PERDA RPPLH
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	5	
1	2	3	4	5	6	
A. Ekoregion Jawa						
1.	Kab. Bandung - Jawa Barat	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
2.	Kab. Sukabumi - Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-	
3.	Kota Depok - Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Sudah ditetapkan	
4.	Kota Bekasi-Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-	
5.	Kota Semarang - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-	
6.	Kab. Pemalang - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-	
7.	Kab. Wonogiri - Jawa Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
8.	Kab. Klaiten - Jawa Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
9.	Kota Yogyakarta - DIY	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
10.	Kota Surabaya - Jawa Timur	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
11.	Kota Blitar - Jawa Timur	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
12.	Kab. Malang - Jawa Timur	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
B. Ekoregion Sumatera						
1.	Kab. Aceh Utara-Aceh	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
2.	Kab. Langkat-Sumut	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
3.	Kota Medan-Sumut	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
4.	Kota Batam-Kep. Riau	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-	
5.	Kab. Bintan-Kep. Riau	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
6.	Kab. Kuantan Singgingi-Riau	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
7.	Kab. Pelelawan-Riau	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
8.	Kab. Kampar-Riau	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	
9.	Kab. Pasaman-Sumbar	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-	
10.	Kab. Lima Puluh Kota-Sumbar	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-	

NO		EKOREGION / KABUPATEN / KOTA		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP		PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA		PERDA RPPLH	
1	2	3	4	5	6				
11.	Kab. Solok-Sumbar	Sedang dilaksanakan	Berlum disusun	Berlum disusun	-				
12.	Kab. Merangin-Jambi	Berlum dilaksanakan	Berlum disusun	Berlum disusun	-				
13.	Kota Jambi-Jambi	Berlum dilaksanakan	Berlum disusun	Berlum disusun	-				
14.	Kab. Muaro Jambi-Jambi	Berlum dilaksanakan	Berlum disusun	Berlum disusun	-				
15.	Kab. Batanghari-Jambi	Berlum dilaksanakan	Berlum disusun	Berlum disusun	-				
16.	Kab. Ogan Komering Ulu-Sumsel	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan	Berlum disusun	-				
17.	Kota Palembang-Sumsel	Berlum dilaksanakan	Berlum disusun	Berlum disusun	-				
18.	Kab. Muara Enim-Sumsel	Sedang dilaksanakan	Berlum disusun	Berlum disusun	-				
19.	Kab. Musi Banyuasin-Sumsel	Berlum dilaksanakan	Berlum disusun	Berlum disusun	-				
20.	Kab. Belitung-Kep. Babel	Sedang dilaksanakan	Berlum disusun	Berlum disusun	-				
21.	Kab. Belitung Timur-Kep. Babel	Berlum dilaksanakan	Berlum disusun	Berlum disusun	-				
22.	Kota Bandar Lampung-Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Berlum disusun	-				
23.	Kab. Lampung Tengah-Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Berlum disusun	-				
C. Ekoregion Kalimantan									
1.	Kab. Nunukan-Kalimantan Utara	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Berlum disusun	-				
D. Ekoregion Sulawesi									
1.	Kab. Banggai Kepulauan-Sulteng	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Berlum disusun	-				
2.	Kab. Tojo Una-Una-Sulteng	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Berlum disusun	-				
E. Ekoregion Bali Nusa Tenggara									
1.	Kab. Sabu Raijua-NTT	Berlum dilaksanakan	Berlum disusun	Berlum disusun	-				
F. Ekoregion Maluku									
1.	-	-	-	-	-				
E. Ekoregion Papua									
1.	Kab. Sorong Selatan-Papua Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Berlum disusun	-				

NO		EKOREGION / KABUPATEN / KOTA				PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA		
1	2	INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP		DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH		
2.	Kab. Manokwari Selatan-Papua Barat	Sudah dilaksanakan		4	5	Belum disusun	-	

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor-2017, Data s.d November 2017

Catatan: RPPLH Kab/Kota disusun oleh Pemerintah Kab/Kota, KLHK melakukan asistensi teknis penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota

TABEL VII.9. DAFTAR KLINIK ASISTENSI-KOORDINASI PENYUSUNAN PETA DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP (D3TLH) TAHUN 2017

No.	INSTANSI	MATERI ASISTENSI	DASAR KLINIK (SURATT/TELP/WA/DLL)	PELAKSANAAN ASISTENSI
1	2	3	4	5
1.	DLH KAB. TANAH BUMBU (KALSEL)	- Penyusunan Daya dukung daya tampung LH	Surat Ka.DLH Kab.Tanah Bumbu No.660/225j/ PPLH/ DLH/2017	15 Maret 2017
2.	BALITBANG DAN INOVASI PUSLITBANG SOSEK KEBUJAKAN PERUBAHAN IKLIM (BOGOR)	- Konsep Daya dukung daya tampung LH Tampung dalam revisi RKTN 2011-2030	Surat Kapus Litbang No.UN.03/PGSEKP/ PDTLP/ Lit.3/04/2017	03 April 2017
3.	BIRO PERENCANAAN - KLHK	- Kebijakan Strategis terkait Daya Dukung dan Daya Berbasis Jasa Ekosistem	Kabirocan. UN.82/ren/RMK/Pla.0/3/2017	05 April 2017
4.	P3E SUMATERA di RIAU	- Sosialisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem	Surat Ka.P3E Sumatera No.UN.11P3E.Sum/Bd1/PPE.0/4/2017	03-04 Mei 2017
5.	DLH – KEHUTANAN JATENG	- Penyusunan Daya dukung daya tampung LH dalam rangka Penyusunan RPPLH Prov., Kabi/Kota dan Instrumen Ekonomi Lingkungan	Surat Ka.DLH dan Kehutanan Prov. Jateng No.005/1348	23-24 Mei 2017
6.	P3E SULAWESI DAN MALUKU	- Penyusunan RPSSDA-LH Berbasis Daya Dukung Daya Tampung LH	Surat Ka.P3E Suma No.S.287/P3E.Su/Peren/PPE.1/05/2017	30 Mei 2017
7.	BADAN GEOLOGI KEMENTERIAN ESDM	- Kajian Komprehensif Hidrogeologi Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Kab. Rembang Prov. Jateng	Surat Ka.Ban. Geologi No.3214/42/BGL/2017	09 Juni 2017
8.	P3E Papua	- Penyusunan RPSSDA-LH Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung	Surat Ka.P3E Papua No.UN.146/P3E.papua/KBTU/PPE.1-2/06/2017	20 Juni 2017
9.	KAB. BEHU, PROVINSI NTT	- Workshop Pengendalian dan Pengelolaan LH	Surat Ka.DLH Kab Belu No.897/Bid.IV/20/V/2017	17-20 Juli 2017
10.	DLH Kota BEKASI	- FGD Penyusunan Eco Region 2 pada 2 BWp dan Pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung LH	Surat Ka.DLH Kota Bekasi No.800/1185-Dinaslh.Taling	25 Juli 2017
11.	SEKDA PROVINSI JATENG	- Rakor daya Dukung daya tampung	Surat As.Ekoda-Setda No.896/0015778	26 Juli 2017
12.	PUSAT INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL – ITB (BANDUNG)	- Asistensi Penyusunan D3TLH SDA-LH	Surat Ka.P3E Bali No.S.307/ P3E.Bali/PPE.0 /08/2017	23-25 Juli 2017
13.	DIT. PENGENDALIAN PENCEMARAN	- Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Nasional	Kordinasi langsung	30 Agustus 2017

No.	INSTANSI	MATERI ASISTENSI	DASAR KLINIK (SURATT/TELP/WA/DLL)	PELAKSANAAN ASISTENSI
1	2	3	4	5
1	DAN KERUSAKAN PESISIR – LAUT	(Wil.laut –Pesisir)		
14.	BADAN RESTORASI GAMBUT	- Kordinasi Ekosistem Gambut (D3TLH)	Kordinasi langsung	31 Agustus 2017
15.	INSTITUT PENELITIAN INOVASI BUMI (INOBU)	- Penentuan Daya dukung dan daya tampung Kab. Seruyan – Prov. Kalimantan	Surat Dir.INOBU No.192/BP/I/X/2017	11 Sept 2017
16.	KAB. RAJA AMPAT	- Bimtek Penyusunan D3TLH SDA-LH	Surat Ka.P3E No. S.225/P3E-Papua/KBTU/UKIPPE/9/2017	12-15 Sept 2017
17.	KAB. BANYU ASIN	- Pembahasan D3TLH Kab. Banyu Asin	Klinik Asistensi langsung	19 Sept 2017
18.	BALITBANG AIR PUPR, BANDUNG	- Penyusunan Peta Daya Dukung Untuk Infrastruktur di Wil. Pesisir/Pulau2 Kecil	Surat Ka.Balitbang Air PUPR No.PD0106-Lp737	
19.	DINAS ESDM PROV. SULUT	- Penyusunan Daya dukung sektor ESDM	Klinik Asistensi langsung	Okttober 2017
20.	DLH PROV. KALIMANTAN TIMUR	- Penyusunan Daya dukung daya tampung	Surat Ka.DLH No.660.2 /302/B1.1/DLH/2017	27 Oktober 2017
21.	DLH KAB. KONAWE SELATAN	- Penentuan Daya dukung dan daya tampung Kab. Konawe Selatan	Surat Tugas Ka. DLH Kab. Konawe Selatan	10 November 2017
22	DLH KAB. TABANAN BALI	- Penentuan Daya dukung dan daya tampung Kab. Tabanan Bali	Surat Tugas Ka. DLH Kab. Tabanan BALI	13 November 2017
23.	DLH KOTA PANGKALPINANG	- Penentuan Daya dukung dan daya tampung Kota PangkalPinang	Surat Tugas Ka. DLH Kota Pangkalpinang	27 November 2017
24.	DLH KAB. MANOKWARI SELATAN	- Penentuan Daya dukung dan daya tampung Kab. Manokwari Selatan	Surat Tugas Ka. DLH Kab. Manokwari Selatan	28 November 2017

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor-2017, Data s.d November 2017

TABEL VII.10. VALUASI EKONOMI BEBERAPA EKOSISTEM DI INDONESIA

NO	SUMBER DAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A EKOSISTEM HUTAN										
1	Taman Hutan Raya (per 22 Ha)	Daun Pakan Temak	Nilai Produksi	3.581.529.620,00	Rp./Tahun	461.418,40	Rp./Ekor/Tahun	Taman Hutan Raya Wan Abu Rachman Propinsi Lampung	Agus Seliawati, 2000, Tesis Program Pascasarjana IPB, Nilai Ekonomi Taman Hutan Raya Wan Abu Rachman Provinsi Lampung	Luas 22.244 Ha
2	Fungsi Hidrologis Hutan Taman Nasional	Nilai Air Rumah Tangga Type A (Musim Hujan)	C/M (WTP)	2.469.012.192,00	Rp./Tahun	3.810.204,00	Rp./KK/Tahun	Desa Cisarua (648 KK)		
		Nilai Air Rumah Tangga Type B (Musim Hujan)	C/M (WTP)	1.986.029.280,00	Rp./Tahun	3.064.860,00	Rp./KK/Tahun	Desa Cisarua (648 KK)		
		Nilai Air Rumah Tangga Type C (Musim Hujan)	C/M (WTP)	1.767.873.600,00	Rp./Tahun	2.728.200,00	Rp./KK/Tahun	Desa Cisarua (648 KK)		
		Nilai Air Rumah Tangga Type A (Musim Kemarau)	C/M (WTP)	3.259.958.400,00	Rp./Tahun	5.030.800,00	Rp./KK/Tahun	Desa Cisarua (648 KK)		
		Nilai Air Rumah Tangga Type B (Musim Kemarau)	C/M (WTP)	2.680.056.248,00	Rp./Tahun	4.135.951,00	Rp./KK/Tahun	Tipe A = Air Mineral		
		Nilai Air Rumah Tangga Type C (Musim Kemarau)	C/M (WTP)	1.856.267.280,00	Rp./Tahun	2.864.610,00	Rp./KK/Tahun	Tipe B = Air Keruh		
		Nilai Air Rumah Tangga Type A (Musim Hujan)	C/M (WTP)	8.251.337.750,00	Rp./Tahun	4.460.215,00	Rp./KK/Tahun	Tipe C = Air Sangat Keruh		
		Nilai Air Rumah Tangga Type B (Musim Hujan)	C/M (WTP)	6.153.895.500,00	Rp./Tahun	3.326.430,00	Rp./KK/Tahun	Desa Cung Bitung (1850 KK)		

NO	SUMBER DAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nilai Air Rumah Tangga Type C (Musim Hujan)	CVM (WTP)	4.241.565.300,00	Rp./Tahun	2.292.738,00	Rp./KK/Tahun				Desa Curing Bitung (1850 KK)
	Nilai Air Rumah Tangga Type A (Musim Kemarau)	CVM (WTP)	1.007.060.265,00	Rp./Tahun	5.443.569,00	Rp./KK/Tahun				Desa Curing Bitung (1850 KK)
	Nilai Air Rumah Tangga Type B (Musim Kemarau)	CVM (WTP)	7.601.681.450,00	Rp./Tahun	4.109.017,00	Rp./KK/Tahun				Desa Curing Bitung (1850 KK)
	Nilai Air Rumah Tangga Type C (Musim Kemarau)	CVM (WTP)	4.475.462.650,00	Rp./Tahun	2.419.169,00	Rp./KK/Tahun				Desa Curing Bitung (1850 KK)
	Nilai Air Pertanian (Musim Hujan)	CVM (WTP)	10.770.914.630,00	Rp./Musim	16.302.762,00	Rp/Petani/Musim				Desa Cisarua
	Nilai Air Pertanian (Musim Kemarau)	CVM (WTP)	11.192.321.090,00	Rp./Musim	17.035.542,00	Rp/Petani/Musim				Desa Cisarua
	Nilai Air Pertanian (Musim Hujan)	CVM (WTP)	4.914.524.860,00	Rp./Musim	6.921.866,00	Rp/Petani/Musim				Desa Curing Bitung
	Nilai Air Pertanian (Musim Kemarau)	CVM (WTP)	5.591.190.360,00	Rp./Musim	7.874.916,00	Rp/Petani/Musim				
	Total Nilai		78.159.250.855,00	Rp./Tahun						
3	Valuasi Ekonomi Satwa Liar di Sekitar Hutan									
	Nilai Babi	CVM (WTP)	9.702.677,00	Rp./Tahun/KK						Dini Rahmarita, 2006 Skripsi Fakultas Kehutanan IPB, Nilai Ekonomi Satwa Liar Berdasarkan Preferensi Masyarakat Di Sekitar Hutan : Studi Kasus di Hutan Produksi PT Sari Bumi Kusuma, Kalimantan Tengah.
	Nilai Kancil	CVM (WTP)	1.029.581,00	Rp./Tahun/KK						
	Nilai Kijang	CVM (WTP)	1.867.297,00	Rp./Tahun/KK						
	Nilai Rusa	CVM (WTP)	8.566.929,00	Rp./Tahun/KK						
	Nilai Trenggiling	CVM (WTP)	11.132.063,00	Rp./Tahun/KK						
	Total Nilai		32.288.547,00	Rp./Tahun/KK						
4	Valuasi Ekonomi Hutan Pendidikan									
	Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	683.338.887,40	Rp./Tahun	1.903.450,94	Rp./Ha/Tahun	Nilai Ekonomi Hutan Pendidikan Gunung Walat	Nilai Ekonomi Hutan Pendidikan Gunung Walat	Emi Roslinda, 2002, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Nilai Ekonomi Hutan Pendidikan Gunung Walat dan Kontribusinya Terhadap Masyarakat Sekitar	
	Nilai Getah Damar	Nilai Produksi	102.000.000,00	Rp./Tahun	816.000,00	Rp./Ha/Tahun				Luas Hutan = 359 Ha
	Nilai Bibit Alami	Nilai Produksi	75.000.000,00	Rp./Tahun	600.000,00	Rp./Ha/Tahun				Luas Damar = 125 Ha
	Nilai Pakan Temak	Nilai Produksi	229.354.144,80	Rp./Tahun	638.869,48	Rp./Ha/Tahun				

NO	SUMBER DAYA ALAM	Variable Ukur	PENGUKURAN	NILAI Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nilai Tanaman Obat	Nilai Produksi	Rp./Tahun	32.000.000,00	Rp./Ha/Tahun	3.200.000,00	Rp./Ha/Tahun			Luas Tanaman Obat = 10 Ha
	Nilai Tanaman Hias	Nilai Produksi	Rp./Tahun	30.000.000,00	Rp./Ha/Tahun	150.000,00	Rp./Ha/Tahun			Luas Tanaman Hias = 200 Ha
	Nilai Tanaman Pangan Liar	Nilai Produksi	Rp./Tahun	10.800.000,00	Rp./Ha/Tahun	43.200,00	Rp./Ha/Tahun			Luas Tanaman Pangan Liar = 250 Ha
	Nilai Air untuk Rumah Tangga	Nilai Produksi	Rp./Tahun	2.084.018.810,00	Rp./Ha/Tahun	5.805.066,32	Rp./Ha/Tahun			
	Nilai Air Untuk Pertanian	Nilai Produksi	Rp./Tahun	190.227,85	Rp./Ha/Tahun	3.111,81	Rp./Ha/Tahun			Luas Sawah 61.131 Ha
	Nilai Perdagangan	Nilai Produksi	Rp./Tahun	1.725.407,95	Rp./Ha/Tahun	21.595,13	Rp./Ha/Tahun			Luas Ladang 79.898 Ha
	Nilai Kesejukan	Nilai Barang Pengganti	Rp./Tahun	581.580.000,00	Rp./Ha/Tahun	1.620.000,00,00	Rp./Ha/Tahun			
	Nilai Serapan Karbon	Nilai Produksi	Rp./Tahun	3.521.014.560,00	Rp./Ha/Tahun	9.807.840,00	Rp./Ha/Tahun			
	Total Nilai			588.349.442.038,00	Rp./Tahun					
5	Valuasi Ekonomi Hutan Kota, Jakarta, Taman Margasatwa Ragunan									
	Nilai Hutan Kota	Nilai Kesehatan	Rp./Tahun	1.519.475.000,00	Rp./Ha/Tahun	11.255.370,37	Rp./Ha/Tahun			Asyrafy, 2008 Skripsi Fakultas Kehutanan IPB, Valuasi Ekonomi Hutan Kota Berdasarkan Pendekatan Biaya Kesehatan (Studi Kasus Taman Margasatwa Ragunan Jakarta)
										Luas = 135 Ha
6	Valuasi Ekonomi Total Hutan Kayu Putih, Provinsi Maluku, Kabupaten Seram Bagian Barat, Desa Piru									
	Nilai Daun Kayu Putih	Nilai Produksi	Rp./Tahun	757.574.000,00	Rp./Ha/Tahun	378.787,00	Rp./Ha/Tahun			Evelin Parera, 2005 Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Nilai Ekonomi Total Hutan Kayu Putih: Kasus Di Desa Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku
	Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	Rp./Tahun	226.730.000,00	Rp./Ha/Tahun	113.365,00	Rp./Ha/Tahun			Luas 2000 Ha
	Nilai Air (Rumah Tangga dan Industri Kayu Putih)	Nilai Produksi	Rp./Tahun	2.076.970.000,00	Rp./Ha/Tahun	1.038.485,00	Rp./Ha/Tahun			
	Nilai Flora	Nilai Barang Pengganti	Rp./Tahun	4.988.000,00	Rp./Ha/Tahun	2.494,00	Rp./Ha/Tahun			
	Nilai Fauna	Nilai Barang Pengganti	Rp./Tahun	47.176.000,00	Rp./Ha/Tahun	23.588,00	Rp./Ha/Tahun			
	Total Nilai			6.152.388.000,00	Rp./Tahun					

NO	SUMBER DAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ekonomi Manfaat Ekosistem Terumbu Karang Di Pulau Temate Provinsi Maluku Utara	Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi	21.027.933.840,00	Rp./Tahun	19.012.598.409,49	Rp/Ha/Tahun		Erni Sisca Dewi, 2006, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Analisis Ekonomi Manfaat Ekosistem Terumbu Karang di Pulau Temate Provinsi Maluku Utara	Luas Terumbu Karang = 1,11 Ha
	Total Nilai Ekonomi Manfaat Ekosistem Terumbu Karang Di Pulau			21.027.933.840,00	Rp./Tahun					
8	Valuasi ekonomi Kawasan Yang Di Rehabilitasi Hutan dan lahan Studi Kasus Projek RHL, Provinsi Di Yogyakarta, Kecamatan Ngilir Kabupaten Gunung Kidul	Nilai Kayu Pertukangan	Nilai Produksi	3.933.234.737,00	Rp./Tahun	3.070.487,69	Rp/Ha/Tahun		Fitri Nurfitriani, 2005, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Nilai ekonomi Kawasan Yang Di Rehabilitasi (Hutan dan Lahan) Studi Kasus Projek RHL Kecamatan Ngilir Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Di Yogyakarta	Luas= 1281 Ha
	Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi		809.745.067,00	Rp./Tahun	632.199,50	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Pakan Temak	Nilai Produksi		13.129.705.023,00	Rp./Tahun	10.249.574,57	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Tanaman Oat	Nilai Produksi		8.779.250,00	Rp./Tahun	2.586,88	Rp/Kg/Tahun			
	Nilai Kayu Putih	Nilai Produksi		734.573.861,00	Rp./Tahun	830.871,92	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Air Rumah Tangga	C/M (WTP)		1.007.463.598,00	Rp./Tahun	28.745,82	Rp/Org/Tahun			
	Nilai Pengarahan Erosi	C/M (WTP)		1.228.786.480,00	Rp./Tahun	959.216,61	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Flora	C/M (WTP)		349.966.923,00	Rp./Tahun	273.190,42	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Fauna	C/M (WTP)		1.619.044.848,00	Rp./Tahun	1.263.891,37	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Keberadaan	C/M (WTP)		73.064.742.642,00	Rp./Tahun	57.037.269,82	Rp/Ha/Tahun			
	Total Nilai			95.886.082.429,00	Rp./Tahun					
9	Valuasi Ekonomi Konservasi Hutan Sekunder Ke Usahaan Lahan Kering di Kecamatan Gelumbang Muara Enim Sumatera Selatan									
	Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi		476.900.000,00	Rp./Tahun	50.000,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Kayu Gelondongan Campuran	Nilai Produksi		749.209.000,00	Rp./Tahun	78.549,91	Rp/Ha/Tahun		Elisa Wildayana, 1999, Tesis Program Pascasarjana, Valuasi Ekonomi Konservasi Hutan Sekunder Ke Usahaan Lahan Kering di Kecamatan Gelumbang Muara Enim Sumatera Selatan	
	Nilai Durian	Nilai Produksi		1.000.000,00	Rp./Tahun	113,23	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Pisang	Nilai Produksi		200.000,00	Rp./Tahun	25,16	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Ikan	Nilai Produksi		1.200.000,00	Rp./Tahun	135,88	Rp/Ha/Tahun			

NO	SUMBER DAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
1	2	Nilai Pencegah Erosi	Nilai Pengantian	234.800.000,00	Rp./Tahun	6	7	8	9	11
		Nilai Penjaga Siklus Makanan	Nilai Barang Pengantian	3.815.200.000,00	Rp./Tahun	400.000,00	Rp./Ha/Tahun		Terukur dari biaya rehabilitasi lahan dengan <i>Mucuna</i> sp yang tererosi sebanyak 15 ton/ha/thn @ Rp.16/1/Ha	
		Nilai Habitat Flora dan Fauna	Nilai Barang Pengantian	7.543.500.000,00	Rp./Tahun	790.889,08	Rp./Ha/Tahun		Terukur dari 20 ton/ha/thn seerasah setara dengan kompos @Rp 200/kg	
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	2.324.900.000,00	Rp./Tahun	243.751,31	Rp./Ha/Tahun		Ministry of State for Population and environmental (1993) US\$ 32,5/Ha/tahun	
		Nilai Manfaat Kebanggaan	Nilai Barang Pengantian	1.125.000.000,00	Rp./Tahun	117.949,26	Rp./Ha/Tahun		Biaya Pembuatan Jalan Sepanjang 75 km	
		Nilai Bibit Tanaman	Nilai Produksi	2.002.980.000,00	Rp./Tahun	210.000,00	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Keberadaan	C/M (WTP)	32.429.200.000,00	Rp./Tahun	3.400.000,00	Rp./Ha/Tahun			
		Total Nilai		50.704.305.000,00						
B EKOSISTEM PESISIR										
1	Valuasi Ekonomi Kawasan Pesisir Dalam Pengembangan Budidaya Iambak Prov Sulawesi Selatan, Kabupaten Sinjai	Nilai Budidaya Udang+Bandeng	Nilai Produksi	2.794.955.612,00	Rp./Tahun	8.078.022,00	Rp./Ha/Tahun		Asbar, 2007, Disertasi Sekolah Pascasarjana IPB, Optimasi Pemanfaatan Kawasan Pesisir Untuk Pengembangan Budidaya Iambak Berkelanjutan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan	
		Nilai Budidaya Rumput Laut	Nilai Produksi	3.929.899.451,40	Rp./Tahun	11.358.090,90	Rp./Ha/Tahun		Luas Mangrove 346 Ha	
		Nilai Penangkapan Kepiting Bakau	Nilai Produksi	4.733.557.167,82	Rp./Tahun	13.680.916,67	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Kelelawar	Nilai Produksi	794.505.960,00	Rp./Tahun	2.296.260,00	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Benur	Nilai Produksi	2.416.334.250,00	Rp./Tahun	6.983.625,00	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Nener	Nilai Produksi	1.978.428.000,00	Rp./Tahun	5.718.000,00	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Bibit Bakau	Nilai Produksi	108.125.000,00	Rp./Tahun	312.500,00	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	49.559.588,00	Rp./Tahun	143.178,00	Rp./Ha/Tahun			
		Nilai Kerang	Nilai Produksi	49.305.000,00	Rp./Tahun	142.500,00	Rp./Ha/Tahun			

NO	SUMBER DAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokasi Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	7.650.000.000,00	Rp./Tahun	22.109.826,59	Rp./Ha/Tahun				PT.DiaGram (1994) dalam Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (1995) menyatakan Pembangunan Break Water = Rp.100000/m ³ , Volume bangunan 180000m ³
	Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	1.169.268,75	Rp./Tahun	3.379,39	Rp./Ha/Tahun				Ruitenberg (1991) = US\$ 15/ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9500/US\$
	Nilai Biodiversitas	Benefit Transfer	49.312.125,00	Rp./Tahun	142.500,00	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Keberadaan	C/M (WTP)	1.009.677.698,00	Rp./Tahun	2.917.722,00	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Kayu	Benefit Transfer	1.368.000,00	Rp./Tahun	150.888,89	Rp./Ha/Tahun	Kajian Ekonomi Ekosistem Mangrove Bagi Perigenbangunan Bandara Ngurah Rai - Bali	Arief Maulido Hadi, 2004, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Kajian Ekonomi Ekosistem Mangrove Bagi Pengembangan Bandara Ngurah Rai - Bali	Luas 9 ha, Santoso Et al (1998) 12,3-26,5 m ³ /ha/tahun atau rata-rata 19,4 m ³ /ha/tahun	
	Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	14.317.500,00	Rp./Tahun	1.590.833,33	Rp./Ha/Tahun				Pengambilan Arang pada Luas Mangrove 4 Ha
	Nilai Arang	Nilai Produksi	15.675.000,00	Rp./Tahun	3.918.750,00	Rp./Ha/Tahun				Pengambilan Daun Nipah pada Luas = 1,5 Ha
	Nilai Daun Nipah	Nilai Produksi	69.534.720,00	Rp./Tahun	46.356.480,00	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi	384.181.714,00	Rp./Tahun	42.686.857,00	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Penangkapan Kapiting	Nilai Produksi	213.480.000,00	Rp./Tahun	23.720.000,00	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Penangkapan Udang	Nilai Produksi	134.736.000,00	Rp./Tahun	14.970.667,00	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Penangkapan Kerang	Nilai Produksi	166.230.000,00	Rp./Tahun	20.778.750,00	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Penangkapan Burung	Nilai Produksi	22.950.000,00	Rp./Tahun	2.550.000,00	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Tambak	Nilai Produksi	32.000.000,00	Rp./Tahun	21.333.333,33	Rp./Ha/Tahun				Luas Tambak 1,5 Ha
	Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	1.374.552.000,00	Rp./Tahun	152.728.000,00	Rp./Ha/Tahun				Dahuri (1995) biaya Rp.30000000 P=1m, I=5m, T=6m, ketahanan 10 tahun
	Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	603.117,00	Rp./Tahun	67.013,00	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Biodiversitas	Benefit Transfer	1.134.000,00	Rp./Tahun	126.000,00	Rp./Ha/Tahun				Ruitenberg (1991) = US\$ 15/ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.8400/US\$
	Nilai Keberadaan	C/M (WTP)	25.627.500,00	Rp./Tahun	2.847.500,00	Rp./Ha/Tahun				
	Total Nilai		2.456.379.551,00	Rp./Tahun	25.364.889.120,97	Rp./Tahun				
	Total Optimasi Pemanfaatan Kawasan Pesisir Untuk Pengembangan Budidaya Tambak Berkelanjutan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan									

NO	SUMBER DAYA ALAM	Variable Ukur	PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C EKOSISTEM MANGROVE SULAWESI										
1	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Sulawesi Utara									
Hutan Mangrove Sulawesi Utara	Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	30.544.200,00 Rp./Tahun	492.648,39	Rp./Ha/Tahun	Hutan Mangrove Di Desa aisse, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara	Adnan Sjaitout Wantasen, 2012, Tesis Program Pascasarjana IPB, Kajian Ekologis-Ekonomi Sumberdaya Hutan Mangrove Di Desa Taie, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara	Luas 62 Ha, Harga Kayu		
Total Nilai Hutan Mangrove			30.544.200,00 Rp./Tahun							
2	Valuasi Ekonomi Mangrove Di Provinsi Sulawesi Selatan									
Budidaya Tanahkit Udang dan Bandeng	Nilai Produksi	292.501.886,80 Rp./Tahun	8.410.060,00	Rp./Ha/Tahun			Rusdianah, 2006 Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Kajian Ekonomi dan Ekologi Penanaman Ekosistem Mangrove di Pesisir Tongke-Tongke Kabupaten Simeulue Provinsi Sulawesi Selatan			
Budidaya Rumput Laut	Nilai Produksi	695.600.000,00 Rp./Tahun	20.000.000,00	Rp./Ha/Tahun				Luas 34,78 Ha		
Perangkapkan Kepiting	Nilai Produksi	486.920.000,00 Rp./Tahun	14.000.000,00	Rp./Ha/Tahun						
Perangkapkan Kelletawar	Nilai Produksi	142.213.363,48 Rp./Tahun	4.090.666,00	Rp./Ha/Tahun						
Kayu Bakar	Nilai Produksi	4.979.730,84 Rp./Tahun	143.178,00	Rp./Ha/Tahun						
Penahan Abrasi Pantai	Biaya Perbaikan	4.434.450.000,00 Rp./Tahun	127.500.000,00	Rp./Ha/Tahun			Harga Break Water Rp.425/000/M3 (L = 5 m, Kedalaman = 6 M, Daya Tahan 10 Tahun)			
Penyedia Pakan	Biaya Barang Pengganti	4.434.8.6.711,00 Rp./Tahun	127.510.543,73	Rp./Ha/Tahun			Harga Pakan Udang Rp. 1500/Kg, Kebutuhan pakan udang per Kg Udang = 1,5 Kg			
Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	4.434.450,00 Rp./Tahun	127.500,00	Rp./Ha/Tahun			Ruitenberg (1991) = 1US\$ 15/ha/tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.8500/US\$			
Nilai Keberadaan	CV/M (WTP)	101.478.371,00 Rp./Tahun	2.917.722,00	Rp./Ha/Tahun						
Nilai Total		10.658.542.913,12 Rp./Tahun								
3	Valuasi ekonomi Hutan Mangrove di Sulawesi Tenggara, Tinanggea									
	Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	9.504.000,00 Rp./Tahun	1.441,00	Rp./Ha/Tahun	Valuasi ekonomi Hutan Mangrove untuk Budidaya Tambak di Kecamatan Tinanggea Sulawesi Tenggara	Muhammad Afian, 2004, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Valuasi ekonomi Konversi Hutan Mangrove Untuk Budidaya Tambak di Kecamatan Tinanggea Sulawesi Tenggara	Luas 6396 Ha		
	Nilai Penangkapan Kepiting	Nilai Produksi	340.988.000,00 Rp./Tahun	51.695,00	Rp./Ha/Tahun					

NO	SUMBER DAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nilai Penangkapan	Nilai Produksi	1.795.377.400,00	Rp./Tahun	272.180,00	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Penangkapan Udang	Nilai Produksi	101.610.000,00	Rp./Tahun	15.409,00	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi	1.747.245.000,00	Rp./Tahun	264.895,00	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Manfaat Hasil Budidaya Tambak ^{Tradisional}	Nilai Produksi	601.118.800,00	Rp./Tahun	2.051.600,00	Rp/Ha/Tahun				Luas 294 Ha Tambak Tradisional
	Nilai Manfaat Hasil Budidaya Tambak ^{Moderna}	Nilai Produksi	1.021.844.460,00	Rp./Tahun	7.298.889,00	Rp/Ha/Tahun				Luas 140 Ha Tambak Tradisional Plus
	Nilai Manfaat Hasil Budidaya Tambak ^{Tradisional Dua}	Nilai Produksi	557.757.084,00	Rp./Tahun	14.677.818,00	Rp/Ha/Tahun				Luas 38 Ha Tambak Semi Intensif
	Nilai Fungsi Pencegahan	Nilai Oportunitas	11.728.219.620,00	Rp./Tahun	1.778.080,60	Rp/Ha/Tahun				
	Interusi Air Laut	Benefit Transfer	5.105.007.722,00	Rp./Tahun	773.955,08	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Peredyia Ursur Hara	Benefit Transfer	973.613.732,40	Rp./Tahun	147.600,00	Rp/Ha/Tahun				Ruitenberg (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp 914.157/US\$
	Nilai Biodiversity									
4	4. Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Sulawesi tenggara, Pangi Mutong									
	Fuel Wood	Production Value	8.733.500,00	Rp./Year	19.971,11	Rp/Ha/Year	Economic Assessment For Mangrove Ecosystem in Malakosa Coastal Zone, Pangi Moutong District, Central Sulawesi Province	Normawati M.Said, 2006, Thesis Post Graduate School IPB, Economic Assessment For Mangrove Ecosystem in Malakosa Coastal Zone, Pangi Moutong District, Central Sulawesi Province	Luas 440.311 Ha	
	House Construction	Production Value	3.035.472,22	Rp./Year	6.893,93	Rp/Ha/Year				
	Nipa-Roof	Production Value	3.079.667,00	Rp./Year	6.994,30	Rp/Ha/Year				
	Fishing material	Production Value	11.663.638,89	Rp./Year	26.534,37	Rp/Ha/Year				
	mollusk collecting	Production Value	25.012.167,00	Rp./Year	56.805,88	Rp/Ha/Year				
	Crab collecting culturing, and seeds	Production Value	230.237.833,33	Rp./Year	522.943,63	Rp/Ha/Year				
	Shrimp ponds	Production Value	1.382.741.526,33	Rp./Year	3.140.374,70	Rp/Ha/Year				
	Milkfish ponds	Production Value	3.113.128,53	Rp./Year	7.070,29	Rp/Ha/Year				
	Milkfish and shrimp ponds	Production Value	1.409.809.667,92	Rp./Year	3.201.849,76	Rp/Ha/Year				
	Bait	Production Value	708.827.500,00	Rp./Year	1.608.833,73	Rp/Ha/Year				
	Birds	Production Value	2.233.000,00	Rp./Year	5.071,42	Rp/Ha/Year				

NO	SUMBER DAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
1	2	Breakwater	3	4	5	6	7	8	9	10
		Replacement Cost	Replecement Cost	30.870.873.596,00	Rp./Year	70.111.520,26	Rp/Ha/Year			Aprilwati (2001) cost Rp. 4.153.880 L = 1m W= 11m, H=2,5m, resistance= 10 tahun
	Biodiversity Value	Benefit Transfer	Benefit Transfer	61.555.477,80	Rp./Year	139.800,00	Rp/Ha/Year			Ruitenberg (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp. 9320/US\$
	Existence Value	CVM (WTP/WTA)	CVM (WTP/WTA)	7.923.840.370,95	Rp./Year	17.996.008,21	Rp/Ha/Year			
	Nilai Total			42.644.886.545,97	Rp./Year					
5 Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Sulawesi Tenggara, Donggala										
	Nilai Potensi Kayu	Nilai Produksi	Nilai Produksi	268.234.050,00	Rp./Tahun	1.207.500,00	Rp/Ha/Tahun		Arman Lalo, 2003, Tesis Program Pascasarjana IPB, Kajian Ekologi-Ekonomi Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Lestari di Kawasan Pasisir Banawa Selatan Kabupaten Donggala	
	Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	Nilai Produksi	238.578.360,00	Rp./Tahun	1.074.000,00	Rp/Ha/Tahun		Luas Mangrove 222,14 Ha	
	Nilai Ikan	Nilai Produksi	Nilai Produksi	177.712.000,00	Rp./Tahun	800.000,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Kapiting	Nilai Produksi	Nilai Produksi	595.335.200,00	Rp./Tahun	2.680.000,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Tambak	Nilai Produksi	Nilai Produksi	2.913.844.000,00	Rp./Tahun	7.450.000,00	Rp/Ha/Tahun		Luas Tambak 391,12 Ha	
	Nilai Penahan Abrasi	Benefit Transfer	Benefit Transfer	28.322.850.000,00	Rp./Tahun	127.500.000,00	Rp/Ha/Tahun		PT. Diagram (1994) dalam Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (1995) biaya Pembangunan Break Water = Rp.100000/m ³ , asumsi inflasi 4,25%	
	Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	Nilai Barang Pengganti	306.835,31	Rp./Tahun	1.381,27	Rp/Ha/Tahun		Nilai Pakan Udang	
	Nilai Biodiversitas	Benefit Transfer	Benefit Transfer	28.322.850,00	Rp./Tahun	127.500,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	CVM (WTP)	211.321.289,61	Rp./Tahun	951.612,00	Rp/Ha/Tahun			
	Total Nilai Ekonomi Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara			32.756.574.584,92	Rp./Tahun					
D EKOSISTEM HUTAN MANGROVE JAWA										
1 Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Jawa Barat, Subang										
	Nilai Kayu	Nilai Produksi	Nilai Produksi	385.952.364,00	Rp./Tahun	1.711.920,00	Rp/Ha/Tahun		Djoko Santoso, 2005, Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove di Kawasan Pondok Bali Desa Legonyetan Kecamatan Legonkuion Kabupaten Subang, Jawa Barat	

NO	SUMBER DAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	Rp./Tahun	106.362.350,10	Rp./Tahun	471.778,00	Rp./Ha/Tahun			Luas Hutan Mangrove 25,45 Ha
	Nilai Penangkapan Udang	Nilai Produksi	Rp./Tahun	948.234.583,80	Rp./Tahun	4.205.964,00	Rp./Ha/Tahun			
	Nilai Penangkapan Kepling	Nilai Produksi	Rp./Tahun	356.583.894,30	Rp./Tahun	1.581.654,00	Rp./Ha/Tahun			
	Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi	Rp./Tahun	191.331.749,70	Rp./Tahun	848.666,00	Rp./Ha/Tahun			
	Nilai Penangkapan Ular	Nilai Produksi	Rp./Tahun	160.781.020,20	Rp./Tahun	713.156,00	Rp./Ha/Tahun			
	Nilai Lahan Pertambakan Pola Empang Partit	Nilai Produksi	Rp./Tahun	174.904.239,30	Rp./Tahun	1.159.458,00	Rp./Ha/Tahun			Luas Tambak Pola Empang Partit = 150,45 Ha
	Nilai Lahan Pertambakan Pola Tradisional	Nilai Produksi	Rp./Tahun	454.801.888,80	Rp./Tahun	7.034.832,00	Rp./Ha/Tahun			IUas Tambak Pola Tradisional = 64,65 Ha
	Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	Rp./Tahun	423.891.330,00	Rp./Tahun	4.153.880,00	Rp./27,5m3/tahun			Apilwati (2001) biaya Rp.4.153.880 P = 1m, L= 11m, T=2,5m, kerahanan= 10 tahun
	Nilai Penyedia Pakan Alami	Biaya Barang	Rp./Tahun	129.137.760,00	Rp./Tahun	572.800,00	Rp./Ha/Tahun			Luas Hutan Mangrove 25,45 Ha
	Nilai Biodiversitas	Benefit Transfer	Rp./Tahun	36.789.156,00	Rp./Tahun	144.000,00	Rp./Ha/Tahun			Ruitenberg (1991) = US\$ 15/ha/tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9600/US\$
	Nilai Keberadaan CVM (WTP)		Rp./Tahun	980.707.500,00	Rp./Tahun	4.350.000,00	Rp./Ha/Tahun			
	Nilai Total Ekonomi		Rp./Tahun	4.349.477.836,20	Rp./Tahun					
2	Kajian Ekonomi Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kawasan Segara Anakan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah									
	Nilai Potensi Kayu	Nilai Produksi	Rp./Tahun	7.666.783.000,00	Rp./Tahun	970.000,00	Rp./Ha/Tahun			Trie Joko Parmono, 1999 Tesis Program Pascasarjana IPB, Kajian Ekonomi Pengelolaan Ecosistem Mangrove di Kawasan Segara Anakan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
	Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	Rp./Tahun	339.807.947,00	Rp./Tahun	42.992,44	Rp./Ha/Tahun			Luas Hutan Mangrove 7903,9 Ha
	Nilai Arang	Nilai Produksi	Rp./Tahun	81.270.000,00	Rp./Tahun	10.282,27	Rp./Ha/Tahun			
	Nilai Daun Nipah	Nilai Produksi	Rp./Tahun	63.140.000,00	Rp./Tahun	9.665,70	Rp./Ha/Tahun			Luas Nipah 6532,38 Ha
	Nilai Bibit Mangrove	Nilai Produksi	Rp./Tahun	7.884.859.024,40	Rp./Tahun	997.596,00	Rp./Ha/Tahun			
	Nilai Penangkapan Kepling	Nilai Produksi	Rp./Tahun	213.512.760,00	Rp./Tahun	27.013,60	Rp./Ha/Tahun			
	Nilai Pemanfaatan Udang	Nilai Produksi	Rp./Tahun	1.943.223.291,00	Rp./Tahun	245.856,26	Rp./Ha/Tahun			
	Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi	Rp./Tahun	2.029.646.220,00	Rp./Tahun	256.790,47	Rp./Ha/Tahun			
	Nilai Penangkapan Kerang	Nilai Produksi	Rp./Tahun	510.078.000,00	Rp./Tahun	64.534,98	Rp./Ha/Tahun			
	Nilai Penangkapan Burung	Nilai Produksi	Rp./Tahun	40.400.000,00	Rp./Tahun	6.184,58	Rp./Ha/Tahun			
	Nilai Penangkapan Biawak	Nilai Produksi	Rp./Tahun	20.854.167,00	Rp./Tahun	3.192,43	Rp./Ha/Tahun			
	Nilai Penangkapan Kera	Nilai Produksi	Rp./Tahun	8.100.000,00	Rp./Tahun	1.239,98	Rp./Ha/Tahun			

NO	SUMBER DAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nilai Pengambilan Koto	Nilai Produksi	89.464.000,00 Rp./Tahun	13.693,94	Rp/Ha/Tahun					
	Nilai Wisata	Pengeluaran Wisatawan di Tempat	223.766.400,00 Rp./Tahun	18.508,40	Rp/Ha/Tahun					
	Nilai Pemecah Gelombang	Nilai Pengantian	38.628.739.140,00 Rp./Tahun	3.195.101,00	Rp/Ha/Tahun					
	Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Barang Penganti	903.956.462,00 Rp./Tahun	74.769,00	Rp/Ha/Tahun					
	Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	1.773.601.533,00 Rp./Tahun	146.700,00	Rp/Ha/Tahun					
	Nilai Keberadaan	C/M (WTP)	43.338.056.220,00 Rp./Tahun	3.584.623,00	Rp/Ha/Tahun					
	Total Nilai		105.759.288.164,40 Rp./Tahun							
3	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Jawa Barat, Indramayu									
	Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	27.470.000.000,00 Rp./Tahun	3.423.672,00	Rp/Ha/Tahun	Nilai Ekonomi Hutan Mangro di Muara Cimanuk Indramayu				
	Nilai Tambak Tumpangsari	Nilai Produksi	10.610.000.000,00 Rp./Tahun	1.322.357,00	Rp/Ha/Tahun					
	Nilai Pemburuan dan Pemancingan	Nilai Produksi	2.440.000.000,00 Rp./Tahun	304.105,00	Rp/Ha/Tahun					
	Nilai Penangkapan Udang	Nilai Produksi	71.740.000.000,00 Rp./Tahun	8.941.180,00	Rp/Ha/Tahun					
	Nilai Penahan Abrasi	Benefit Transfer	5.030.000.000,00 Rp./Tahun	626.904,00	Rp/Ha/Tahun					
	Total Nilai		117.290.000.000,00 Rp./Tahun							
4	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Jawa Barat, Karawang									
	Nilai Potensi Kayu	Nilai Produksi	3.554.040.000,00 Rp./Tahun	2.100.000,00	Rp/Ha/Tahun	Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove di Karawang Jawa Barat				
	Nilai Ranting kayu	Nilai Produksi	220.012.000,00 Rp./Tahun	130.000,00	Rp/Ha/Tahun					
	Nilai Tambak	Nilai Produksi	5.793.056.200,00 Rp./Tahun	3.423.000,00	Rp/Ha/Tahun					
	Nilai Udang Alam	Nilai Produksi	1.931.451.500,00 Rp./Tahun	1.141.250,00	Rp/Ha/Tahun					
	Nilai Kepiting	Nilai Produksi	220.012.000,00 Rp./Tahun	130.000,00	Rp/Ha/Tahun					
	Nilai Belut	Nilai Produksi	132.007.200,00 Rp./Tahun	78.000,00	Rp/Ha/Tahun					
	Nilai Ikan Lainnya	Nilai Produksi	686.437.440,00 Rp./Tahun	405.600,00	Rp/Ha/Tahun					

NO	SUMBER DAYA ALAM	Variable Ukur	PENGUKURAN	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Nilai Burung	Nilai Produski	32.155.600,00	Rp./Ha/Tahun	19.000,00	Rp./Ha/Tahun					Panjang Pantai Baru 16000 m, Apriwali (2001) biaya Rp.4.153.880 P = 1m, L= 1m, T=2.5m, ketahanan= 10 tahun
	Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	6.646.208.000,00	Rp./Ha/Tahun	3.927.090,52	Rp./Ha/Tahun					Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9017,5/US\$
	Nilai Pakan Alami	Nilai Barang	111.207.197,82	Rp./Tahun	65.709,76	Rp./Ha/Tahun					
	Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	228.918.255,00	Rp./Tahun	135.262,50	Rp./Ha/Tahun					
	Nilai Keberadaan	C/M (WTP)	205.203.500,00	Rp./Tahun	121.250,00	Rp./Ha/Tahun					
	Nilai Pewarsian	Nilai Barang Pengganti	101.544.000,00	Rp./Tahun	60.000,00	Rp./Ha/Tahun					Nilai Benih Bakau
	Total Nilai		19.362.281.892,82	Rp./Tahun							
	5	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Kabupaten Subang Desa Muara Kecamatan Bianakan (dari satuan ukur Tambak Tumpangsa)									
	Nilai Potensi Kayu	Nilai Produski	384.459.075,00	Rp./Tahun	1.072.500,00	Rp./Ha/Tahun					Luas Mangrove 358,47 Ha
	Nilai Ranting Kayu	Nilai Produski	407.002.759,32	Rp./Tahun	1.135.556,00	Rp./Ha/Tahun					Yuana Dwi Handayani, 2004 Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Analisis Ekonomi Pemanfaatan Hutan Mangrove Merjadi Tambak Tumpangsa (studi Kasus: Desa Muara Kecamatan Bianakan Kabupaten Subang
	Nilai Tambak Udang Windu	Nilai Produski	3.548.853.000,00	Rp./Tahun	9.900.000,00	Rp./Ha/Tahun					
	Nilai Tambak Udang Bandeng	Nilai Produski	1.461.213.337,50	Rp./Tahun	4.076.250,00	Rp./Ha/Tahun					
	Nilai Penangkapan Udang	Nilai Produski	1.157.947.717,50	Rp./Tahun	3.230.250,00	Rp./Ha/Tahun					
	Nilai Benur	Nilai Produski	228.524.625,00	Rp./Tahun	637.500,00	Rp./Ha/Tahun					
	Nilai Nener	Nilai Produski	141.555.650,00	Rp./Tahun	395.000,00	Rp./Ha/Tahun					
	Nilai Kepiting	Nilai Produski	172.025.600,00	Rp./Tahun	480.000,00	Rp./Ha/Tahun					
	Nilai Ular	Nilai Produski	23.659.020,00	Rp./Tahun	66.000,00	Rp./Ha/Tahun					
	Nilai Belut	Nilai Produski	91.284.385,50	Rp./Tahun	254.650,00	Rp./Ha/Tahun					
	Nilai Ikan	Nilai Produski	1.177.573.950,00	Rp./Tahun	3.285.000,00	Rp./Ha/Tahun					

NO		SUMBER DAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	2.081.940.000,00	Rp./Tahun	5.807.850,03	Rp/Ha/Tahun			Panjang Pantai Baru 5000 m, Aprilwati (2001) biaya Rp.4.153.880 P = 1m, L= 1m, T=2.5m, ketahanan= 10 tahun	
		Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	2.082.005.145,40	Rp./Tahun	5.808.031,76	Rp/Ha/Tahun			Nilai Pakan Udang Rp 2000/kg	
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	45.570.499,00	Rp./Tahun	127.125,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenberg (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.8450/US\$	
		Nilai Keberadaan	C/M (WTP)	571.786.147,00	Rp./Tahun	1.595.073,92	Rp/Ha/Tahun				
		Nilai Pewarisian	Nilai Barang Pengganti	1.344.262,50	Rp./Tahun	3.750,00	Rp/Ha/Tahun			Pemberitanan baku	
		Total Nilai		13.576.885.173,72	Rp./Tahun						
6 Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Jawa Barat, Ciamis											
		Nilai Penggarap Nipah	Nilai Produksi	70.000.000,00	Rp./Tahun	10.000.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Mangrove 7 Ha	
										Dian Sukmanawati, 2004, Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Penilaian Ekonomi Manfaat Hutan Mangrove di Desa Karangjajadi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat	
		Nilai Pemancingan Ikan	Nilai Produksi	80.640.000,00	Rp./Tahun	11.520.000,00	Rp/Ha/Tahun				
		Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi	26.880.000,00	Rp./Tahun	3.840.000,00	Rp/Ha/Tahun				
		Nilai Tambak Udang Vaname	Nilai Produksi	2.400.000.000,00	Rp./Tahun	800.000.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tambak Udang Vaname 3 Ha	
		Nilai Tambak Udang Windu	Nilai Produksi	2.000.000.000,00	Rp./Tahun	1.000.000.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tambak Udang Windu 2 Ha	
		Nilai Tambak Kepiting	Nilai Produksi	45.000.000,00	Rp./Tahun	22.500.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tambak Kepiting 2 Ha	
		Nilai Sawah	Nilai Produksi	30.780.000,00	Rp./Tahun	12.312.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Sawah 2,5 Ha	
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	41.638.800,00	Rp./Tahun	5.948.400,00	Rp/Ha/Tahun			Panjang Pantai Baru 100 m, Aprilwati (2002) biaya Rp 4.163.880 P = 1m, L= 1m, T=2.5m, ketahanan= 10 tahun	
		Nilai Pakan Alami	Nilai Barang	293.211,65	Rp./Tahun	41.887,38	Rp/Ha/Tahun				
		Nilai Penyedia Atap Rumah	Nilai Produksi	910.000,00	Rp./Tahun	130.000,00	Rp/Ha/Tahun				
		Nilai Penerimaan Sewa Lahan Nipah	Nilai Produksi	15.434.300,00	Rp./Tahun	2.204.900,00	Rp/Ha/Tahun				

NO	SUMBER DAYA ALAM	Variable Ukur	PENGUKURAN	NILAI Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	947.625,00	Rp./Tahun	135.375,00	Rp./Ha/Tahun				Ruitenberg (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9025/US\$
	Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	41.800.500,00	Rp./Tahun	5.971.500,00	Rp./Ha/Tahun				
Total Nilai			4.754.324.426,65	Rp./Tahun						
7	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Muara Angke, Jakarta									
	Nilai Ikan Bandeng	Nilai Produksi	488.000.000,00	Rp./Tahun	7.450.382,00	Rp./Ha/Tahun				Teguh Suryono, 2006, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Penilaian Ekonomi Lingkungan Terhadap Konversi Hutan Mangrove Menjadi Tambak dan Pemukiman (Studi kasus di Hutan Angke Kapuk Jakarta Utara)
	Nilai Ikan Mujair	Nilai Produksi	5.600.000,00	Rp./Tahun	89.600,00	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Benih Bandeng	Nilai Produksi	133.330.000,00	Rp./Tahun	2.978.776,00	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Cacing Laut	Nilai Produksi	87.600.000,00	Rp./Tahun	1.957.105,00	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Pemanfaatan	Nilai Produksi	4.324.000,00	Rp./Tahun	97.051,00	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	136.353.200,00	Rp./Tahun	2.605.965,00	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	2.277.857.294,00	Rp./Tahun	50.891.137,00	Rp./Ha/Tahun				Panjang Pantai 5000 m, Aprilivati (2001) biaya Rp.4.153,880 P=1m, L=11m, T=2,5m, ketahanan= 10 tahun
	Nilai Penyerap Carbon	Benefit Transfer	103.722.011,00	Rp./Tahun	1.486.415,00	Rp./Ha/Tahun				Hilmi (2003) potensi karbon untuk Rhizophora muconata = 3258,34 kg/ha-3957,44kg/ha
	Nilai Penjaga Siklus Makanan	Nilai Barang Pengganti	8.164.026,00	Rp./Tahun	45.328,00	Rp./Ha/Tahun				Ruitenberg (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9300/US\$
	Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	115.744.089,00	Rp./Tahun	642.630,00	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Pewarsitan	Nilai Produksi	35.000.000,00	Rp./Tahun	780.500,00	Rp./Ha/Tahun				Nilai dari Produksi Pembibitan Mangrove
Total Nilai		CVM (WTP)	791.314.148,20	Rp./Tahun	4.333.489,00	Rp./Ha/Tahun				
			4.187.066.038,20	Rp./Tahun						

NO	SUMBER DAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8 Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove dalam Perubahan institusi untuk mengatasi kerusakan, Prov Jawa Barat, Kabupaten Bekasi										
	Nilai Tambak	Nilai Produksi	212.230.835,00	Rp./Tahun	1.199.157,26	Rp/Ha/Tahun			Suhæri, 2005, Disertasi Sekolah Pascasarjana, Perubahan Institusi untuk Mengatasi Kerusakan Hutan Mangrove Studi Kasus Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Luas Tambak 177 Ha
	Nilai Tempat Penyijahan	Nilai Produksi	1.474.215.672,00	Rp./Tahun	140.654,00	Rp/Ha/Tahun				Luas Mangrove 10481,15 Ha
	Nilai Kayu	Nilai Produksi	5.111.033.888,00	Rp./Tahun	487.646,29	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Pengendali Banjir dan Badai	Nilai Kerugian Akibat Banjir	66.019.883.902,00	Rp./Tahun	6.298.917,48	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Air	Nilai Produksi	13.519.417.500,00	Rp./Tahun	1.289.879,21	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Karbon	Benefit Transfer	153.679.861.875,00	Rp./Tahun	14.662.500,00	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	64.702.339.991,00	Rp./Tahun	6.173.210,00	Rp/Ha/Tahun			Dahuri (1995) Penahan Abrasi Rp. US\$ 726,26 Ha/Tahun (setara Rp. 617320/Ha/Tahun)	
	Nilai Konservasi	C/M (WTA)	220.256.063.307,00	Rp./Tahun	21.014.493,00	Rp/Ha/Tahun			Kesedian Masyarakat menjual tambaknya	
	Total Nilai		524.975.131.980,00	Rp./Tahun						
E EKOSISTEM HUTAN MANGROVE KALIMANTAN										
1 Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Kalimantan Barat, Batu Ampar Pontianak										
	Nilai Kayu	Nilai Produksi	42.481.912.300,00	Rp./Tahun	3.056.252,98	Rp/Ha/Tahun			Salmah Apriwati, 2001, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Analisis Ekonomi Pemanfaatan Ekosistem Mangrove di Kawasan Batu Ampar Kabupaten Pontianak	Luas = 13900 Ha
	Nilai Arang	Nilai Produksi	855.141.900,00	Rp./Tahun	61.521,00	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Daun Nipah	Nilai Produksi	81.330.832,00	Rp./Tahun	5.851,14	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Bibit Mangrove	Nilai Produksi	79.655.300,00	Rp./Tahun	5.733,47	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Ikan	Nilai Produksi	1.036.288.900,00	Rp./Tahun	74.551,00	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Uang	Nilai Produksi	7.701.906.600,00	Rp./Tahun	554.094,00	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Kepiting	Nilai Produksi	2.091.449.600,00	Rp./Tahun	150.464,00	Rp/Ha/Tahun				

No	SUMBER DAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Nilai Penahan Abrasi	Biaya Pertambakan	56.812.885.800,00	Rp./Ha/Tahun	4.087.257,97	Rp./Ha/Tahun					
	Nilai Pakan Alami	Biaya Produksi	69.269.283.228,00	Rp./Ha/Tahun	4.983.401,67	Rp./Ha/Tahun					Pendekatan menggunakan produk ikanpit dan pakan kepit secara alami
	Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	1.720.125.000,00	Rp./Ha/Tahun	123.750,00	Rp./Ha/Tahun					Ruitenberg (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.8250/US\$
	Nilai Keberadaaan	CVM (WTP)	83.068.717.803,00	Rp./Ha/Tahun	5.976.166,75	Rp./Ha/Tahun					
	Total Nilai		265.198.707.263,00	Rp./Ha/Tahun							
2	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Kabupaten Barru										
	Nilai Tambak Ikan Bandeng	Nilai Produksi	433.337.249,90	Rp./Ha/Tahun	69.556.540,91	Rp./Ha/Tahun	Nilai Ekonomi Ekosistem Mangrove Kecamatan Baru Kabupaten Barru				Luas Hutan Mangrove = 6.23 Ha
	Nilai Kayu Bangunan	Nilai Produksi	313.185,98	Rp./Ha/Tahun	50.270,62	Rp./Ha/Tahun					
	Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	975.004,16	Rp./Ha/Tahun	156.501,47	Rp./Ha/Tahun					
	Nilai bibit alam (Nener)	Nilai Produksi	1.032.004,02	Rp./Ha/Tahun	165.650,73	Rp./Ha/Tahun					
	Nilai Kepiting	Nilai Produksi	121.899.578,40	Rp./Ha/Tahun	19.566.545,49	Rp./Ha/Tahun					
	Nilai Kerang	Nilai Produksi	2.460.850,00	Rp./Ha/Tahun	395.000,00	Rp./Ha/Tahun					
	Bibit Bakau	Nilai Produksi	1.889.247,50	Rp./Ha/Tahun	303.250,00	Rp./Ha/Tahun					
	Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	8.955.785.280,00	Rp./Ha/Tahun	143.762.251,00	Rp./Ha/Tahun	Panjang Pantai Barru 2156 m, Aprilwati (2001) biaya Rp. 4.153.880 P = 1m, L= 11m, T=2,5m, ketahanan= 10 tahun				
	Nilai Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	7.916.290.882,00	Rp./Ha/Tahun	23.097.576,00	Rp./Ha/Tahun					
	Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	870.486,75	Rp./Ha/Tahun	139.725,00	Rp./Ha/Tahun					Ruitenberg (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9315/US\$
	Nilai Keberadaaan	CVM (WTP/WTA)	21.805.000,00	Rp./Ha/Tahun	3.500.000,00	Rp./Ha/Tahun					
	Total Nilai		17.456.638.738,71	Rp./Ha/Tahun							

NO	SUMBER DAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F	HUTAN MANGROVE SUMATERA									
1 Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Kabupaten Bangka, Kecamatan Merawang										
	Nilai Bibit Bakau	Nilai Produksi	14.512.095,26	Rp./Tahun	1.160.967,62	Rp/Ha/Tahun				Ferawati Maedar, 2008, Tesis Sekolah Pascasarjana, Analisis Ekonomi Pengelolaan Mangrove di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka
	Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	28.699.499,17	Rp./Tahun	2.295.959,93	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Kepiting	Nilai Produksi	226.530.887,13	Rp./Tahun	18.122.470,97	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Tambak Udang	Nilai Produksi	343.962,77	Rp./Tahun	25.478,72	Rp/Ha/Tahun				Luas= 13,5 Ha
	Nilai Tambak Ikan Bandeng+Udang	Nilai Produksi	9.273.166,37	Rp./Tahun	441.579,35	Rp/Ha/Tahun				Luas= 21 Ha
	Nilai Tambak Ikan Bandeng	Nilai Produksi	285.889.510,79	Rp./Tahun	2.552.584,92	Rp/Ha/Tahun				Luas= 112 Ha
	Nilai Pameah Gelombang	Benefit Transfer	97.624.404.682,00	Rp./Tahun	804.419.946,30	Rp/Ha/Tahun				Panjang Pantai Barru 23501,98 m, Aprilwati (2001) biaya Rp.4.153.880 P = 1m, L= 1m, T=2,5m, ketahanan= 10 tahun
	Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Produksi	3.031.000.000,00	Rp./Tahun	242.480.000,00	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	1.736.125,00	Rp./Tahun	140.490,00	Rp/Ha/Tahun				Ruijenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9366/US\$
	Nilai Keberadaan CVM (WTP)		109.667.500,00	Rp./Tahun	8.775.000,00	Rp/Ha/Tahun				
Total Nai			101.332.097,428,49	Rp./Tahun						
2 Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Lampung, Kabupaten Lampung Timur										
	Nilai Kayu Log	Nilai Produksi	9.934.521,00	Rp./Tahun	136.900,00	Rp/Ha/Tahun				Rahadi Ariyanto, 2007, Tesis Sekolah Pascasarjana, Model Ekonomi Sumberdaya Hutan Mangrove di Kabupaten Lampung Timur
	Nilai Kayu Bakar (Ranting)	Nilai Produksi	193.066.268,00	Rp./Tahun	2.644.799,99	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Ikan	Nilai Produksi	543.602.676,00	Rp./Tahun	7.446.000,00	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Udang	Nilai Produksi	431.684.478,00	Rp./Tahun	5.913.000,00	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Kepiting	Nilai Produksi	465.299.937,00	Rp./Tahun	6.372.899,99	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Kerang	Nilai Produksi	207.848.082,00	Rp./Tahun	2.847.000,00	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Belut	Nilai Produksi	274.999.000,00	Rp./Tahun	3.766.799,99	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Ular	Nilai Produksi	399.707.850,00	Rp./Tahun	5.475.000,00	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Burung	Nilai Produksi	97.759.635,00	Rp./Tahun	1.339.200,00	Rp/Ha/Tahun				
	Nilai Sayuran	Nilai Produksi	56.759.446,00	Rp./Tahun	777.599,73	Rp/Ha/Tahun				

NO	SUMBER DAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nilai Bahan Obat/Makanan	Nilai Produksi	525.906.021,00	Rp./Tahun	7.203.599,99	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Fungi Biologi	Nilai Barang Pengantin	1.093.018.376,00	Rp./Tahun	14.971.623,32	Rp./Ha/Tahun				Hasil Tangkapan Ikan
	Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	5.999.999.600,00	Rp./Tahun	82.185.020,41	Rp./Ha/Tahun				Dahuri (1995) biaya Rp. 3000000 P=1m, L=5m, T=6m, ketahanan 10 tahun kurs Rupiah Rp.2800, saat penelitian Kurs Rupiah 10000 jadi biaya sebesar Rp.107.14285, Panjang Pantai 5600 m
	Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	10.950.900,00	Rp./Tahun	150.000,00	Rp./Ha/Tahun				Ruitenbergk (1992)= US\$ 1500/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp 10000
	Nilai Keberadaan	C/M (WTP)	459.927.800,00	Rp./Tahun	6.300.000,00	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Pewarisian	C/M (WTP)	735.900.480,00	Rp./Tahun	10.080.000,00	Rp./Ha/Tahun				
	Total Nilai		11.506.435.070,00	Rp./Tahun						
	3 Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Sumatera Selatan, Kecamatan Tulung Selatan									
	Nilai Kayu Arang	Nilai Produksi	2.015.000,00	Rp./Tahun	244,78	Rp./Ha/Tahun				Manyadi, 1988, Tesis Program Pascasarjana IPB, Analisis Ekonomi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Mangrove Untuk Berbagai Macam Kegiatan Pertanian di Pesisir Pantai Timur Kecamatan Tulung Selatan Provinsi Sumatera Selatan
	Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	1.273.800.000,00	Rp./Tahun	154.737,61	Rp./Ha/Tahun				Luas Mangrove 8232 Ha
	Nilai Nipah	Nilai Produksi	2.738.000,00	Rp./Tahun	339,89	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Udang	Nilai Produksi	1.868.750.000,00	Rp./Tahun	227.010,45	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Kepiting	Nilai Produksi	10.050.000,00	Rp./Tahun	1.224,49	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Penjaga Siklus Makanan	Nilai Barang Pengantin	28.252.224.000,00	Rp./Tahun	3.432.000,00	Rp./Ha/Tahun				Nilai Kompos
	Nilai Flora dan Fauna Langka	Nilai Barang Pengantin	52.000.000,00	Rp./Tahun	6.316,00	Rp./Ha/Tahun				Nilai Kunjungan wisatawan
	Nilai Manfaat Operasional (Option Values)	Nilai Produksi	250.000.000,00	Rp./Tahun	6.316,00	Rp./Ha/Tahun				Nilai Produksi Bibit Bakau
	Nilai Kebanggaan (Bequest Values)	Nilai Barang Pengantin	800.000.000,00	Rp./Tahun	6.316,00	Rp./Ha/Tahun				Biaya Pembuatan Jalan Sepanjang 80 km
	Manfaat Keberadaan	C/M (WTP)	33.996.000,00	Rp./Tahun	6.316,00	Rp./Ha/Tahun				
	Total Nilai		32.545.623.000,00	Rp./Tahun						

NO	SUMBER DAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove terhadap Nilai udang di Kepulauan Riau, Pulau Belakang Kota Batam										
	Nilai Tegakan Pohon	Market Price	433.160.000,00	Rp./Tahun	3.920.000,00	Rp./Ha/Tahun			Peggy Ratna Marifaningrum, 2007, Tesis Sekolah Pascasarjana, Analisis Ekonomi Keterikatan Sumberdaya Mangrove dan Udang di Pulau Belakang Padang Kota Batam Kepulauan Riau	Luas Mangrove 110,5 Ha
	Nilai Arang Kayu	Market Price	500.000.000,00	Rp./Tahun	4.524.886,98	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Kayu Bakar	Market Price	696.150.000,00	Rp./Tahun	6.300.000,00	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Perikanan Mangrove (peryediaan umpan)	Market Price	3.488.010.000,00	Rp./Tahun	31.565.701,36	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Pendidikan	Surrogate Market Price	10.860.000,00	Rp./Tahun	98.280,54	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Rekreasi	Surrogate Market Price	81.000.000,00	Rp./Tahun	733.031,67	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Pemecah Gelombang	Replacement Cost	861.000.000,00	Rp./Tahun	7.791.855,20	Rp./Ha/Tahun			1 m x 10 m x 2,5 m/daya/tahun 10 tahun biaya Rp.4.100.000, panjang pantai 6,3 kilometer	
	Nilai Tempat Penijahan	Production Function Approach	318.650.000,00	Rp./Tahun	2.883.529,41	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Penyimpan Karbon	Damage Avoided Cost	221.000.000,00	Rp./Tahun	2.000.000,00	Rp./Ha/Tahun				
	Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	16.575.000,00	Rp./Tahun	150.000,00	Rp./Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/1/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.10000/US\$	
	Total nilai		6.626.385.000,00	Rp./Tahun						

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d November 2017

TABEL VII.11. PROPORSI INDIKASI DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA LINGKUNGAN

A. FUNGSI: JASA PENYEDIA (PROVISIONING)

Pulau	Provinsi	Jasa Lingkungan Penyedia Bahan Pangan (%)										Jasa Lingkungan Penyedia Air (%)										Jasa Lingkungan Penyedia Serat, Bahan Bakar dan Material Lain (%)													
		R	SR	ST	S	T	ND	R	SR	ST	S	T	ND	R	SR	ST	S	T	ND	R	SR	ST	S	T	ND	R	SR	ST	S	T	ND				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
BANTEN	24	6	38	27	5	0	45	1	0	54	0	0	67	28	0	4	0	0	60	8	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	27	21	25	21	7	0	57	1	0	41	0	0	65	31	0	3	0	0	54	18	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Jawa																																			
DKI JAKARTA	36	0	57	3	2	0	36	0	1	63	0	0	7	92	0	1	0	0	76	23	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
JAWA BARAT	23	14	21	37	5	0	60	0	0	39	0	0	80	15	0	4	0	0	45	8	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
JAWA TENGAH	24	16	24	29	7	0	55	1	0	43	0	0	75	20	0	4	0	0	51	8	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
JAWA TIMUR	24	13	30	26	6	0	50	1	0	48	0	0	76	17	0	7	0	0	66	3	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ACEH	10	3	55	30	1	49	6	1	43	0	1	20	1	0	23	55	1	18	3	14	43	22	1												
BENGKULU	4	1	2	58	34	1	41	3	0	55	0	1	16	1	0	14	68	1	13	1	20	47	19	1											
JAMBI	12	3	1	58	27	0	44	8	1	47	1	0	15	1	0	27	57	0	19	1	12	54	14	0											
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	21	13	0	45	16	5	37	24	0	32	3	5	30	4	0	38	23	5	35	3	1	49	6	5											
KEPULAUAN RIAU	6	7	0	59	5	23	42	16	0	18	1	23	24	1	0	16	36	23	7	0	0	51	19	23											
LAMPUNG	5	1	3	63	27	1	35	2	1	61	0	1	16	1	0	24	58	1	14	1	8	64	12	1											
RIAU	25	4	1	42	27	1	48	18	1	31	2	1	18	2	0	46	33	1	37	3	2	50	8	1											
SUMATERA BARAT	5	2	2	66	25	0	44	4	0	51	0	0	14	1	0	18	66	0	10	1	16	51	22	0											
SUMATERA SELATAN	11	2	2	59	26	0	41	6	1	51	1	0	15	1	0	32	51	0	19	2	8	61	11	0											
SUMATERA UTARA	8	2	3	59	27	1	53	6	1	39	0	1	22	2	0	29	47	1	17	2	11	51	19	1											
KALIMANTAN BARAT	12	0	2	50	35	1	32	6	0	47	14	1	5	0	0	44	27	23	1	7	0	45	16	31	1										
KALIMANTAN SELATAN	8	0	3	51	37	1	32	4	0	50	13	1	6	0	0	48	24	22	1	7	0	47	12	34	1										
KALIMANTAN TENGAH	12	0	1	52	33	1	37	9	0	41	12	1	4	0	0	42	29	24	1	6	0	42	18	33	1										
KALIMANTAN TIMUR	7	0	2	53	38	1	32	5	0	49	13	1	3	0	0	50	22	24	1	4	0	50	10	34	1										
KALIMANTAN UTARA	9	0	1	50	37	3	29	5	0	47	15	3	1	0	0	51	19	25	3	4	0	51	12	30	3										
GORONTALO	6	1	84	7	1	47	3	1	48	0	1	19	1	0	10	70	1	5	1	16	6	71	1												
SULAWESI BARAT	2	1	3	85	8	1	48	4	0	47	0	1	21	1	0	10	68	1	7	1	14	12	66	1											
SULAWESI SELATAN	10	1	4	74	11	1	53	3	0	43	0	1	23	1	0	11	65	1	10	0	8	14	67	1											
SULAWESI TENGAH	13	1	2	78	6	1	58	3	0	38	0	1	18	1	0	10	70	1	6	1	11	9	74	1											
SULAWESI TENGGARA	20	1	2	70	6	1	65	4	0	29	0	1	20	1	0	12	67	1	6	1	7	11	75	1											
SULAWESI UTARA	5	1	1	82	10	1	51	2	1	45	0	1	16	1	0	11	71	1	4	0	8	10	77	1											

Pulau	Provinsi	Jasa Lingkungan Penyedia Bahan Pangan (%)						Jasa Lingkungan Penyedia Air (%)						Jasa Lingkungan Penyedia Serat, Bahan Bakar dan Material Lain (%)						Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik (%)					
		R	SR	ST	S	T	ND	R	SR	ST	S	T	ND	R	SR	ST	S	T	ND	R	SR	ST	S	T	ND
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
BALI	BALI	4	0	27	15	52	1	33	2	0	61	3	1	5	0	5	31	57	1	1	0	21	26	50	1
Bali Nusra	NUSA TENGGARA BARAT	3	0	17	40	38	1	42	11	0	44	2	1	9	0	8	40	41	1	2	0	19	37	41	1
	NUSA TENGGARA TIMUR	13	0	9	43	33	1	41	24	0	32	2	1	9	0	4	48	38	1	1	0	19	35	45	1
Maluku	MALUKU	39	0	5	41	13	3	46	7	0	39	6	3	1	0	39	10	47	3	1	0	44	7	45	3
	MALUKU UTARA	51	0	5	26	15	3	39	7	0	46	6	3	1	0	34	11	51	3	1	0	39	8	48	3
Papua	PAPUA	10	1	10	27	45	7	13	2	0	46	30	7	1	1	35	8	48	7	2	0	71	4	16	7
	PAPUA BARAT	14	0	5	28	40	14	15	3	0	45	24	14	0	0	22	2	62	14	0	0	70	2	15	14

Sumber Data : Penutupan Lahan (PKTL)
Ekoregion (Direktorat PDLKWS hasil interpretasi peta BiG)
Tipe Vegetasi (Direktorat PDLKWS Hasil interpretasi peta Ekoregion)

Ket
SR = Sangat Rendah
R = Rendah
S = Sedang
T = Sangat Tinggi
ST = Sangat Tinggi
ND = No Data

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d November 2017

TABEL VII.11. PROPORSI INDIKASI DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA LINGKUNGAN

B. FUNGSI: JASA PENGATUR (REGULATING)

Pulau	Provinsi	Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara (%)										Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim (%)										Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Bencana Alam (%)									
		R	SR	ST	S	T	ND	R	SR	ST	S	T	ND	R	SR	ST	S	T	ND	R	SR	ST	S	T	ND	R	SR	ST	S	T	ND
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
Jawa	BANTEN	62	8	0	30	0	0	61	8	0	31	0	0	60	1	0	25	15	0	19	0	0	0	0	64	16	0	0	0	0	
	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	36	16	0	47	0	0	33	18	0	49	0	0	47	0	0	33	19	0	18	0	0	0	67	14	0	0	0	0		
	DKI JAKARTA	73	23	0	3	1	0	73	23	0	3	1	0	96	0	1	3	0	0	39	0	1	60	0	0	0	0	0	0		
	JAWA BARAT	46	7	0	46	0	0	44	8	0	48	0	0	39	1	0	35	25	0	14	0	1	66	19	0	0	0	0	0		
	JAWA TENGAH	46	8	0	45	0	0	45	8	0	47	0	0	42	1	0	35	22	0	15	0	0	64	20	0	0	0	0	0		
	JAWA TIMUR	57	2	0	40	0	0	55	3	0	42	0	0	50	1	0	35	15	0	14	1	1	64	20	0	0	0	0	0		
	ACEH	26	2	15	35	21	1	17	4	14	42	21	1	9	2	15	66	8	1	19	0	18	57	5	1	0	0	0	0		
	BENGKULU	21	1	21	39	18	1	11	2	20	48	18	1	5	1	21	69	4	1	18	0	20	59	2	1	0	0	0	0		
Sumatera	JAMBI	23	2	12	49	14	0	17	2	12	56	13	0	7	2	13	71	8	0	24	0	15	55	5	0	0	0	0	0		
	KEPUALUAN BANGKA BELITUNG	40	12	0	36	7	5	32	13	0	48	2	5	13	6	3	29	43	5	18	13	11	35	17	5	0	0	0	0		
	KEPUALUAN RIAU	24	3	0	31	18	23	7	4	0	53	13	23	11	0	1	47	18	23	20	11	1	43	2	23	0	0	0	0		
	LAMPUNG	23	1	8	55	12	1	16	1	8	62	11	1	8	0	8	77	6	1	24	0	9	64	2	1	0	0	0	0		
	RIAU	35	4	2	51	8	1	31	5	2	55	6	1	8	4	3	66	19	1	22	0	10	57	11	1	0	0	0	0		
	SUMATERA BARAT	18	1	16	43	22	0	9	1	16	52	21	0	5	1	16	74	3	0	21	1	17	59	2	0	0	0	0	0		
	SUMATERA SELATAN	26	1	8	54	10	0	19	2	8	62	10	0	8	1	8	74	8	0	26	0	10	58	6	0	0	0	0	0		
	SUMATERA UTARA	26	2	11	42	19	1	16	3	11	52	18	1	10	2	11	71	6	1	29	1	13	53	3	1	0	0	0	0		
Kalimantan	KALIMANTAN BARAT	8	0	45	21	25	1	13	1	30	8	48	1	12	1	18	17	52	1	24	2	18	22	33	1	0	0	0	0		
	KALIMANTAN SELATAN	9	0	48	21	21	1	13	1	28	4	54	1	13	1	17	18	50	1	27	2	18	20	32	1	0	0	0	0		
	KALIMANTAN TENGAH	8	0	43	23	25	1	11	1	25	9	53	1	11	1	15	20	53	1	25	4	15	21	35	1	0	0	0	0		
	KALIMANTAN TIMUR	7	0	52	21	20	1	10	0	33	4	53	1	9	0	19	18	52	1	24	2	19	20	34	1	0	0	0	0		
	KALIMANTAN UTARA	6	0	53	18	19	3	9	0	33	6	49	3	8	0	19	17	52	3	20	1	20	19	37	3	0	0	0	0		
	GORONTALO	20	0	12	28	39	1	5	1	0	74	19	1	5	1	16	77	1	1	16	11	1	56	16	1	0	0	0	0		
	SULAWESI BARAT	22	1	10	28	38	1	6	1	0	74	18	1	6	1	14	78	0	1	18	10	0	57	14	1	0	0	0	0		
	SULAWESI SELATAN	23	1	5	34	36	1	9	1	0	75	14	1	5	1	9	84	1	1	18	10	1	63	9	1	0	0	0	0		
Sulawesi	SULAWESI TENGAH	19	1	9	24	47	1	5	1	71	1	21	1	5	1	13	81	1	1	16	9	1	61	12	1	0	0	0	0		
	SULAWESI TENGGARA	22	1	5	24	47	1	6	1	68	23	1	6	1	10	82	1	1	20	7	2	62	9	1	0	0	0	0			
	SULAWESI UTARA	17	0	4	38	38	1	3	1	0	83	11	1	4	0	8	86	1	1	15	10	1	65	8	1	0	0	0	0		

Pulau	Provinsi	Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara (%)						Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim (%)						Jasa Lingkungan Pengaturan Air (%)											
		R	SR	ST	S	T	ND	R	SR	ST	S	T	ND	R	SR	ST	S	T	ND	R	SR	ST	S	T	ND
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Bali Nusra	BALI	5	0	20	40	33	1	5	0	21	23	51	1	17	1	5	41	34	1	34	1	6	41	17	1
	NUSA TENGGARA BARAT	17	0	19	37	26	1	3	0	20	33	42	1	35	1	8	31	24	1	40	2	17	18	22	1
	NUSA TENGGARA TIMUR	10	0	19	42	28	1	2	0	19	32	46	1	30	3	4	35	27	1	33	4	13	32	18	1
Maluku	MALUKU	2	0	44	20	32	3	1	0	51	8	38	3	3	0	8	30	56	3	17	1	8	24	47	3
	MALUKU UTARA	4	0	36	17	40	3	1	0	45	11	41	3	2	0	10	34	50	3	14	0	11	21	51	3
	PAPUA	2	0	78	5	8	7	2	0	73	6	13	7	2	0	63	8	20	7	3	0	66	8	15	7
Papua	PAPUA BARAT	0	0	77	3	6	14	0	0	71	2	13	14	0	0	58	7	21	14	2	0	59	9	15	14

Sumber Data :

Penutupan Lahan (PKTL)
Ekoregion (Direktorat PDLKWS hasil interpretasi pada BIG)
Tipe Vegetasi (Direktorat PDLKWS Hasil interpretasi pada Ekoregion)

Ket
 SR = Sangat Rendah
 R = Rendah
 S = Sedang
 T = Sangat Tinggi
 ST = Sangat Tinggi
 ND = No Data

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d November 2017

TABEL VII.11. PROPORSI INDIKASI DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA LINGKUNGAN

B. FUNGSI: JASA PENGATUR (REGULATING) Lanjutan

Pulau	Provinsi	Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah (%)										Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami (%)										Jasa Lingkungan Pengaturan Pengendalian Hama (%)			
		R	SR	ST	S	T	ND	R	SR	ST	S	T	ND	R	SR	ST	S	T	ND	R	SR	ST	S	T	ND
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
Jawa	BANTEN	87	7	0	5	0	0	49	8	2	30	11	0	50	8	4	26	12	0						
	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	93	2	0	4	0	0	27	18	1	40	13	0	28	18	3	29	22	0						
	DKI JAKARTA	99	0	1	0	0	0	73	23	0	3	1	0	75	23	0	0	0	1						
	JAWA BARAT	89	4	0	6	0	0	28	8	2	46	16	0	29	8	4	41	18	0						
	JAWA TENGAH	90	4	0	6	0	0	32	8	1	44	14	0	33	8	4	39	16	0						
	JAWA TIMUR	83	9	0	7	0	0	43	3	2	42	10	0	43	3	3	7	36	12	0					
	ACEH	40	2	0	54	3	1	10	0	15	74	0	1	36	10	14	19	19	20	1					
	BENGKULU	39	1	0	58	2	1	9	0	21	70	0	1	43	6	20	12	18	1						
	JAMBI	54	1	0	42	2	0	14	0	12	73	0	0	44	6	12	25	12	0						
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	56	5	0	30	3	5	17	1	0	76	1	5	37	30	0	26	2	5						
Sumatera	KEPULAUAN RIAU	36	6	0	35	0	23	7	0	0	69	0	23	31	14	0	23	8	23						
	LAMPUNG	56	0	0	41	3	1	10	0	8	81	0	1	60	8	8	11	11	1						
	RIAU	60	3	0	33	4	1	24	0	2	73	0	1	45	11	2	36	5	1						
	SUMATERA BARAT	46	1	0	51	1	0	7	0	16	76	0	0	45	4	16	15	20	0						
	SUMATERA SELATAN	59	1	0	37	3	0	13	0	8	78	0	0	54	8	8	21	10	0						
	SUMATERA UTARA	46	2	0	49	3	1	13	0	11	75	0	1	42	7	11	23	17	1						
	KALIMANTAN BARAT	9	0	17	25	49	1	12	2	17	8	60	1	59	16	0	7	17	1						
Kalimantan	KALIMANTAN SELATAN	8	0	17	57	1	13	3	17	6	61	1	60	16	1	6	17	1							
	KALIMANTAN TENGAH	8	0	14	26	50	1	12	1	14	9	63	1	64	13	0	9	14	1						
	KALIMANTAN TIMUR	5	0	19	60	1	11	1	19	6	62	1	61	14	0	6	18	1							
	KALIMANTAN UTARA	3	0	19	57	3	10	0	19	4	63	3	60	13	0	5	19	3							
	GORONTALO	10	6	0	68	16	1	5	2	16	76	0	1	35	0	16	48	0	1						
	SULAWESI BARAT	17	1	0	68	14	1	7	1	14	77	0	1	36	0	14	50	0	1						
	SULAWESI SELATAN	15	8	0	68	9	1	10	1	8	80	1	1	44	0	9	47	0	1						
Sulawesi	SULAWESI TENGAH	14	11	0	63	11	1	6	1	11	80	2	1	30	0	13	56	0	1						

Pulau	Provinsi	Jasa Lingkungan Pengaturan Penyebutan Air dan Pengolahan Limbah (%)					Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbutan Alami (%)					Jasa Lingkungan Pengaturan Pengendalian Hama (%)							
		R	SR	ST	S	T	ND	R	SR	ST	S	T	ND	R	SR	ST	S	T	ND
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sulawesi	SULAWESI TENGGARA	23	17	0	51	8	1	6	1	7	82	3	1	32	0	10	58	0	1
	SULAWESI UTARA	11	4	0	76	8	1	4	1	8	86	0	1	45	0	8	46	0	1
	BALI	10	0	2	77	9	1	22	0	5	51	21	1	40	43	0	10	5	1
Bali Nusra	NUSA TENGGARA BARAT	22	0	2	56	18	1	18	0	14	40	27	1	33	19	6	32	8	1
	NUSA TENGGARA TIMUR	29	0	4	54	12	1	13	0	5	52	29	1	36	20	1	38	4	1
	MALUKU	0	0	27	16	54	3	2	0	7	46	42	3	34	19	0	38	6	3
	MALUKU UTARA	1	0	27	25	44	3	2	0	9	35	50	3	33	20	0	36	8	3
Papua	PAPUA	2	0	57	8	26	7	2	0	60	7	24	7	11	3	13	17	48	7
	PAPUA BARAT	1	0	54	7	24	14	0	0	55	7	24	14	11	1	14	19	41	14

Sumber Data :

Penutupan Lahan (PKTL)
Ekoregion (Direktorat PDLKWS hasil interpretasi peta BIG)
Tipe Vegetasi (Direktorat PDLKWS Hasil interpretasi peta Ekoregion)

Ket
 SR = Sangat Rendah
 R = Rendah
 S = Sedang
 T = Sangat Tinggi
 ST = Sangat Tinggi
 ND = No Data

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d November 2017

TABEL VII.11. PROPORSI INDIKASI DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA LINGKUNGAN

C. FUNGSI: JASA PENDUKUNG (SUPPORTING)

Pulau	Provinsi	Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman hayati (%)						Jasa Lingkungan Pembentukan dan Regenerasi Tanah (%)					
		Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Tinggi	Tinggi	No Data	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	No Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jawa	BANTEN	22	40	0	34	4	0	34	0	0	58	7	0
	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	20	32	0	41	8	0	37	0	0	57	6	0
	DKI JAKARTA	5	92	0	3	1	0	50	0	0	49	0	0
	JAWA BARAT	23	19	0	52	6	0	34	0	0	57	9	0
	JAWA TENGAH	24	24	0	47	5	0	30	0	0	60	10	0
	JAWA TIMUR	24	34	0	33	9	0	31	0	0	56	13	0
Sumatera	ACEH	12	3	15	47	21	1	21	5	15	36	21	1
	BENGKULU	9	4	21	48	18	1	14	2	21	39	22	1
	JAMBI	22	2	13	49	14	0	23	3	13	47	14	0
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	22	1	2	62	8	5	47	14	1	27	6	5
	KEPULAUAN RIAU	6	0	1	51	19	23	13	3	5	36	19	23
	LAMPUNG	11	2	8	65	12	1	18	2	9	39	30	1
Kalimantan	RIAU	34	5	2	49	8	1	45	6	2	40	6	1
	SUMATERA BARAT	11	1	16	50	22	0	11	2	18	41	27	0
	SUMATERA SELATAN	20	2	8	59	11	0	24	3	9	42	22	0
	SUMATERA UTARA	17	5	11	47	19	1	22	4	12	39	24	1
	KALIMANTAN BARAT	10	0	18	23	48	1	15	2	17	29	36	1
	KALIMANTAN SELATAN	10	0	19	14	56	1	8	3	17	30	42	1
Sulawesi	KALIMANTAN TENGAH	11	0	15	26	48	1	17	3	14	28	38	1
	KALIMANTAN TIMUR	10	0	20	12	57	1	9	1	18	26	44	1
	KALIMANTAN UTARA	7	0	20	14	56	3	11	1	19	23	44	3
	GORONTALO	3	3	1	42	50	1	14	3	10	25	47	1
	SULAWESI BARAT	3	5	0	43	48	1	18	5	6	23	48	1
	SULAWESI SELATAN	3	7	1	47	41	1	16	8	3	27	46	1
Bali Nusra	SULAWESI TENGAH	2	4	1	37	54	1	13	4	6	25	52	1
	SULAWESI TENGGARA	3	4	2	40	51	1	11	5	2	27	53	1
	SULAWESI UTARA	2	2	1	51	42	1	11	2	4	31	50	1
Bali Nusra	BALI	13	6	17	22	42	1	19	7	5	27	40	1

Pulau	Provinsi	Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman hayati (%)						Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah (%)					
		Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	No Data	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	No Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bali Nusra	NUSA TENGGARA BARAT	7	4	20	31	37	1	24	6	8	31	31	1
	NUSA TENGGARA TIMUR	5	3	8	49	34	1	32	6	4	33	25	1
Maluku	MALUKU	1	0	46	9	41	3	6	0	7	20	64	3
	MALUKU UTARA	1	0	42	9	45	3	4	0	8	19	66	3
Papua	PAPUA	1	0	66	4	22	7	3	0	60	11	19	7
	PAPUA BARAT	0	0	62	2	23	14	1	0	56	7	23	14

Sumber Data :

Penutupan Lahan (PKTL)

Ekoregion (Direktorat PDLKWS hasil Interpretasi peta BKG)

Tipe Vegetas (Direktorat PDLKWS Hasil interpretasi peta Ekoregion)

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d November 2017

DUKUNGAN MANAJEMEN

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2017



TABEL VIII.1. KEGIATAN POKOK DAN INDIKATOR PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PLANologi KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2015-2019

NO	KEGIATAN PRIORITAS	
1	2	
A	Kegiatan Pokok	
1.	Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan	
2.	Inventarisasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	
3.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	
4.	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
5.	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
7.	Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan	
B	Indikator Program	
1.	• Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	
	• Jumlah konflik di dalam kawasan hutan turun setiap tahun	
2.	Sistem data dan informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi	
3.	Persentase optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air 100%	
4.	Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan terlaksana	

Sumber : Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019

TABEL VIII.2. ALOKASI DAN SERAPAN ANGGARAN DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2016-2017

NO	PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2016			TAHUN ANGGARAN 2017		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	PROGRAM PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN	323.973.949.000	247.336.091.973	83,43	317.024.768.000	225.704.622.312	71,19

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s.d Oktober 2017

TABEL VIII.3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2017

NO	JENIS PERATURAN	NOMOR PERATURAN	NOMOR PERATURAN	TENTANG	
1	2	3	4		
1	Undang-undang				
1		Nomor 5 Tahun 1960 Nomor 5 Tahun 1990 Nomor 41 Tahun 1999 Nomor 25 Tahun 2000 Nomor 19 Tahun 2004 Nomor 25 Tahun 2004 Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 26 Tahun 2007 Nomor 32 Tahun 2009 Nomor 41 Tahun 2009 Nomor 18 Tahun 2013 Nomor 1 Tahun 2014 Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 18 Tahun 1994 Nomor 10 Tahun 2000 Nomor 35 Tahun 2002 Nomor 44 Tahun 2004 Nomor 45 Tahun 2004 Nomor 38 Tahun 2007 Nomor 6 Tahun 2007 Nomor 26 Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Nomor 11 Tahun 2010 Nomor 15 Tahun 2010 Nomor 24 Tahun 2010 Nomor 72 Tahun 2010 Nomor 41 Tahun 2004 Nomor 28 Tahun 2011 Nomor 61 Tahun 2012 Nomor 27 Tahun 2012 Nomor 12 Tahun 2014 Nomor 33 Tahun 2014 Nomor 43 Tahun 2014		Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Kehutanan Program Pembangunan Nasional Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintahan Daerah Perataan Ruang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pengusahaan Pariwisata Alam Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam sebagaimana telah diubah dengan PP No 36 Tahun 2010 Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah Dana Rehabisasi sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 58 Tahun 2007 Perencanaan Kehutanan Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 60 Th 2009 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan Peneritian dan pendayagunaan tanah terlantar Penyelenggaraan penataan ruang Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan Penggunaan Kawasan Hutan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Nasional Perijinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan Izin Lingkungan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	

NO	JENIS PERATURAN	NOMOR PERATURAN	TENTANG
1	2	3	4
1	Peraturan Pemerintah	Nomor 104 tahun 2015 Nomor 105 tahun 2015 Nomor 46 Tahun 2016 Nomor 46 Tahun 2017	Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Perubahan Kedua atas PP nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Tata Cara Penyelegaraan Kalian Lingkungan Hidup Strategis Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
3	Peraturan/Keputusan/ Instruksi Presiden	Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017	Penyelesaian Penggunaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
4	Keputusan/Peraturan Menteri	Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Institusi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 Institusi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 Institusi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 Institusi Presiden Nomor 6 Tahun 2017	Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
			Ketentuan tentang Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan
		Permenhut Nomor P.36/Menhut-II/2010 Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2011 Permenhut Nomor P.44/Menhut-II/2012 Permenhut Nomor P.62/Menhut-II/2013 Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2013	Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan dan Fungsii Kawasan Hutan. Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan Pengukuran Kawasan Hutan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 44/Menlht-II/2012 Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persejukan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persejukan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus
			Ketentuan tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan
		PermenLHK Nomor P.93/MENLHK/SET/JEN/KUM. I/12/2016 Perdijen Planhut No. P.9/VII-SET/2012 Perdijen Planhut No. P.4/VII-SET/2012 Perdijen Planhut No.P.2/VII-SET/2013 Perdijen Planhut No.P.3/VII-SET/2013 Perdijen Planhut No.P.4/PKTL-SET/2015	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Batas Kawasan Hutan dengan menggunakan GPS Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemasangan Tanda Batas dan Pengukuran Batas Kawasan Hutan Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Tata Batas/Penetapan Kawasan Hutan Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Permasalahan Tenujil Kawasan Hutan Penggantian Biaya Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan
		Permenhut Nomor P.32/Menhut-II/2010 Permenhut Nomor P.4/I/Menhut-II/2012 Permenhut Nomor P.27/Menhut-II/2014	Tukar Menukar Kawasan Hutan Perubahan atas Permenhut nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang tukar menukar kawasan hutan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan
			Ketentuan tentang Perpetaan
		Permenhut Nomor P.32/Menhut-II/2011 Permenhut Nomor P.48/Menhut-II/2009 Permenhut Nomor P.02/Menhut-II/2010 Permenhut Nomor P.10/Menhut-II/2010 SK Menhut Nomor 323/Menhut-II/2011 SK Menhut Nomor 7416/Menhut-VIII/PSDH/2011 SK.16/VII-SET/2012 Perdijen P.10/VII-SET/2012	Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250,000 Sistem Informasi Kehutanan Mekanisme dan Tata Cara Audit Kawasan Hutan Penetapan Peta indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Penanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Penetapan Peta indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Penanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Peta Kawasan Hutan Skala Minimal 1:50.000 di Kabupaten Model Petunjuk Teknis Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota

NO	JENIS PERATURAN	NOMOR PERATURAN	TENTANG	
			3	4
1	Keputusan Peraturan Menteri	SK.63/Menhut-VII/PSDH/2012 SK. 2771/Menhut-VIII/PSDH/2012 SK. 2796/Menhut-VIII/PSDH/2013 SK. 6018/Menhut-VIII/PSDH/2013 SK. 3706/Menhut-VIII/PSDH/2014 SK.6982/Menhut/VII/PSDH/2014 SK.2312/menLHK-VII/PSDH/2015 SK. 5385/MenLHK-PKTL/PSDH/2015 SK. 2300/MenLHK -PKTL/PSDH/PLA.1/11/2016 SK. 6347/MenLHK -PKTL/PSDH/PLA.1/11/2016 SK. 357/MenLHK /SET JEN/PLA.17/2017 Perdijien Nomor P.3/VI-PSDH/2014 Permenhut Nomor P.10/Menhut/II/2006 Permenhut Nomor P.677/Menhut/II/2006 Permenhut Nomor P.49/Menhut/II/2011 Permenhut Nomor P.42/Menhut-II/2010 Permenhut Nomor P.02/Menhut/II/2010 P.50/MenLHK/Sejen/KUM.1/6/2016 P.29/Menhut/II/2014 P.16/mengl.HK/II/2015 P.51/MenLHK/Sejen/KUM.1/6/2016	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi III) Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi II) Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi IV) Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi V) Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi VI) Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi VII) Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi VIII) Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi IX) Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi X) Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi XI) Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi XII) Petunjuk Teknis Penggarbaran Dan Penyajian Peta Kehutanan Ketentuan tentang Inventarisasi Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan Ketentuan tentang Perencanaan Kehutanan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2010-2030 Sistem Perencanaan Kehutanan Sistem Informasi Kehutanan Ketentuan tentang Penggunaan Kawasan Hutan Tata Cara Penetitian Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Petunjuk Pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan Kehutanan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Penetitian Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan Pedoman Pinjaman Pakai Kawasan Hutan Ketentuan tentang Perubahan Fungsi dan Pelepasan Kawasan Hutan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Perubahan Kedua Atas Permenhut No P.34/menhut/II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi III) Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi II) Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi IV) Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi V) Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi VI) Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi VII) Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi VIII) Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi IX) Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi X) Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi XI) Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Permanfaatan Hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain. (Revisi XII) Petunjuk Teknis Penggarbaran Dan Penyajian Peta Kehutanan Ketentuan tentang Inventarisasi Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan Ketentuan tentang Perencanaan Kehutanan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2010-2030 Sistem Perencanaan Kehutanan Sistem Informasi Kehutanan Ketentuan tentang Penggunaan Kawasan Hutan Tata Cara Penetitian Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Petunjuk Pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan Kehutanan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Penetitian Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan Pedoman Pinjaman Pakai Kawasan Hutan Ketentuan tentang Perubahan Fungsi dan Pelepasan Kawasan Hutan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Perubahan Kedua Atas Permenhut No P.34/menhut/II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi

NO	JENIS PERATURAN	NOMOR PERATURAN	TENTANG		
			2	3	4
1	Keputusan Peraturan Menteri				
					Ketentuan tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan
					Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
		Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2009			Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPH-L) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
		Permenhut Nomor P.6-Menhut II/2010			Produksi (KPHP)
		SK.509/Menhut-II/2010			Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Tasik Besar Serikap Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten
		P.41/Menhut-II/2011			Siau Provinsi Riau
		P.54/Menhut-II/2011			Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model
		Permenhut Nomor P.46/Menhut-II/2013			Perubahan Atas Permenhut Nomor P.41/MENHUT-II/2011 tentang standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan
		Permenhut Nomor P.47/Menhut-II/2013			Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model
					Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
					Produksi
					Pedoman Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan
					Hutan Produksi

Sumber : Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data S/D November 2017

TABEL VIII.4. PROYEK BANTUAN LUAR NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PLANologi KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2017

NO	NAMA PROYEK/KODE PROYEK/WAKTU	LOKASI	TOTAL		TUJUAN PELAKSANAAN		KEGIATAN POKOK		IMPLEMENTATING AGENCY	TAHUN
			BLN (Sumber Dana)	GOL	1	6	1	7		
1	Implementation Agreement Programme, Phase III (2013-2018)	Indonesia	55.250.000 DKK (DANIDA-Denmark)	3	4	5	1	KLHK secara efektif mengelola portfolionya untuk hasil lingkungan yang positif	Direktorat Kebijakan Wilayah dan Sektor Lingkungan Wilayah dan Sektor	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah sampai Desember 2017 akan diperpanjang sampai Desember 2018
2	A Joint Cooperation for Strengthening the Capacity of the Forest Management Unit Including Preparation for REDD+ Implementation at Task Besar Serikap (April 2013 – Desember 2015)	Indonesia	USD 3.000.000 (KFS)	1	Memperkuat kapasitas KPH dalam menerapkan praktik terbaik pengelolaan hutan dan mempersiapkan pelaksanaan REDD+ di hutan gambut.	1	1	Melakukan survei sosial ekonomi, survei biofisik, penginderaan jauh dan GIS, pemodelan, pemetaan empiris perubahan lahan di Semenanjung Kampar. Mefasilitasi penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan Jangka Pendek KPH Task Besar Serikap dan memformulasikan rencana bisnis untuk KPH Task Besar Serikap.	Direktorat Wilayah Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Areal Hutan	25 Januari 2012 – 31 Desember 2015
3	FIP-II Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and	Indonesia	USD 17.350.000 (DANIDA & World Bank)	1	Mendukung perluruan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan stok karbon	1	1	Penguatan Peraturan, kebijakan serta administrasi kelembagaan dan kapasitas teknis pada tingkat nasional dan sub nasional dalam desentralisasi	Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah	5 tahun (2016-2021)

NO	NAMA PROYEK/KODE PROYEK/JANGKA WAKTU	LOKASI	TOTAL		TUJUAN PELAKSANAAN	KEGIATAN POKOK	PELAKSANA		TAHUN
			BLN / Sumber Dana)	GOL			Executing Agency	Implementing Agency	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Institutional Development				serta memberikan manfaat lanjutan untuk peringkatan mata pencarian masyarakat sekitar hutan pada tingkat tapak (KPH).	1 pengelolaan hutan 2 Pembangunan portal (Platform) pengetahuan 3 Meningkatkan praktik pengelolaan hutan pada 10 KPH	Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Hutan, Pusat Data dan Informasi, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Prodksi, Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan	

Sumber : Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s.d November 2017

TABEL VIII.5. REKAPITULASI SEBARAN PNS DAN CPNS BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

No.	UNIT KERJA	GOLONGAN												KET	
		IV			III			II			I				
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	
I	Sekretariat Ditjen. Planologi Kehutanan	9	4	13	33	29	62	4	2	6	1	0	1	47	
II	Dit. Rencanaan Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	8	4	12	45	35	80	2	3	5	0	0	0	55	
III	Dit. Inventarisasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	6	5	11	29	15	44	5	3	8	0	0	0	40	
IV	Dit. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	8	4	12	42	30	72	6	3	9	2	0	2	58	
V	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	5	8	13	15	5	20	3	1	4	0	0	0	23	
VI	Dit. Wil. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	4	3	7	17	10	27	2	2	4	0	0	0	14	
	JUMLAH	40	28	68	181	124	305	22	14	36	3	0	3	246	
														412	

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s.d November 2017

Keeterangan:

- IV L = Gol. IV Laki-laki
- IV P = Gol. IV Perempuan
- III L = Gol. III Laki-laki
- III P = Gol. III Perempuan
- II L = Gol. II Laki-laki
- II P = Gol. II Perempuan
- I L = Gol. I Laki-laki
- I P = Gol. I Perempuan

TABEL VIII.6. REKAPITULASI SEBARAN PNS DAN CPNS BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN (BPKH)

No.	Unit Kerja	GOLONGAN										KET					
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	BPKH Wil. I Medan	1	0	1	37	12	49	14	6	20	0	0	0	52	18	70	
2.	BPKH Wil. II Palembang	2	0	2	33	13	46	10	5	15	0	0	0	45	18	63	
3.	BPKH Wil. III Pontianak	1	0	1	35	14	49	2	2	4	1	0	1	39	16	55	
4.	BPKH Wil. IV Samarinda	1	1	2	38	14	52	10	3	13	1	0	1	50	18	68	
5.	BPKH Wil. V Banjarmasin	1	1	2	37	16	53	8	5	13	1	0	1	47	22	69	
6.	BPKH Wil. VI Manado	2	0	2	28	11	39	9	1	10	0	0	0	39	12	51	
7.	BPKH Wil. VII Makassar	2	1	3	32	20	52	6	6	12	0	0	0	40	27	67	
8.	BPKH Wil. VIII Denpasar	2	0	2	29	12	41	12	5	17	0	0	0	43	17	60	
9.	BPKH Wil. IX Ambon	2	0	2	26	6	32	15	2	17	0	0	0	43	8	51	
10.	BPKH Wil. X Irian Jaya	1	0	1	28	10	38	12	1	13	0	0	0	41	11	52	
11.	BPKH Wil. XI Yogyakarta	4	6	10	26	28	54	8	4	12	1	0	1	39	38	77	
12.	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	1	0	1	11	7	18	8	4	12	0	0	0	20	11	31	
13.	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	1	0	1	12	3	15	6	8	14	0	0	0	19	11	30	
14.	BPKH Wil. XIV Kupang	1	0	1	18	8	26	5	3	8	0	0	0	24	11	35	
15.	BPKH Wil. XV Gorontalo	4	1	5	10	3	13	7	0	7	0	0	0	21	4	25	
16.	BPKH Wil. XVI Palu	1	1	2	16	7	23	8	2	10	0	0	0	25	10	35	
17.	BPKH Wil. XVII Manokwari	2	0	2	20	1	21	11	1	12	0	0	0	33	2	35	
18.	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	1	0	1	10	5	15	1	2	3	0	0	0	12	7	19	
19.	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	1	0	1	20	2	22	4	2	6	0	0	0	25	4	29	
20.	BPKH Wil. XX Bandar	2	0	2	26	10	36	3	1	4	1	0	1	32	11	43	
21.	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	2	0	2	21	3	24	2	1	3	0	0	0	25	4	29	
22.	BPKH Wil. XXII Kendari	2	0	2	13	5	18	2	1	3	0	0	0	17	6	23	
	Jumlah	37	11	48	526	210	736	163	65	228	5	0	5	731	286	1017	

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s.d November 2017

TABEL VIII.7. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

No.	UNIT KERJA	Status Pegawai	S3			S2			SARJANA (S1)			SARJANA MUDA			SLTA			SLTP			SD			TOTAL			JENIS KELAMIN			KET.	
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25						
I	Sekretariat Direktorat Jenderal					PNS	2	0	2	11	7	18	17	21	38	3	4	7	13	2	15	1	1	1	82	47	35				
	Direktorat Rencana Penggunaan Wilayah dan Pengelolaan Hutan					Upah	0	0	0	0	0	5	0	5	1	0	1	8	0	8	0	1	15	14	1						
	Direktorat Inventarisasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan					PNS	0	0	0	0	1	5	2	7	0	1	1	3	1	4	0	0	13	8	5						
	Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan					Upah	0	0	0	0	0	2	4	6	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor					PNS	0	0	0	0	0	6	14	20	11	31	4	6	10	23	14	37	1	2	95	57	38				
	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan					Upah	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	4	12	0	12	0	0	0	26	23	3				
	JUMLAH					PNS	5	2	7	55	38	93	89	75	164	16	20	36	74	30	104	4	4	412	243	169					
	TOTAL					Upahmagang	0	0	1	2	3	19	12	31	6	2	8	28	1	28	0	1	74	55	19						

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s.d November 2017

**TABEL VIII.8. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN PEMANTAPAN
KAWASAN HUTAN DIREKTORAT JENDERAL PLANLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

No.	UNIT KERJA	Status Pegawai		S3			S2			SARJANA (S1)			SARJANA MUDA			D2/DIII SLTA			SLTP			SD			TOTAL			JENIS KELAMIN		KET.
		L	P	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	L	P	JML	19	20	21	22	
I	BPKH Wil. I Medan	PNS	0	0	5	1	6	13	0	13	4	5	9	28	12	40	2	0	70	50	20									
		Upah	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6	0	6	0	4	11	9	2								
II	BPKH Wil. II Palembang	PNS	2	0	2	1	0	1	8	4	12	6	5	11	27	9	36	1	0	63	44	21								
		Upah	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	7	0	7	0	1	10	9	1								
III	BPKH Wil. III Pontianak	PNS	0	0	6	3	9	8	5	13	2	2	4	21	6	27	1	1	55	37	18									
		Upah	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	1	11	2	13	1	0	18	14	4									
IV	BPKH Wil. IV Samarinda	PNS	0	0	5	1	6	16	10	26	4	2	6	24	5	29	0	1	68	49	19									
		Upah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	13	3	16	0	0	18	15	3								
V	BPKH Wil. V Banjarbaru	PNS	0	0	5	2	7	10	4	14	1	2	3	30	14	44	0	1	69	46	23									
		Upah	0	0	1	0	1	3	1	4	1	1	2	9	1	10	1	2	20	17	3									
VI	BPKH Wil. VI Manado	PNS	0	0	6	0	6	10	7	17	0	0	0	23	5	28	0	0	51	39	12									
		Upah	0	0	0	0	0	4	3	7	0	0	0	6	3	9	0	0	16	10	6									
VII	BPKH Wil. VII Makasar	PNS	0	0	3	3	6	18	9	27	3	2	5	15	13	28	1	1	67	39	28									
		Upah	0	0	0	0	0	2	3	5	0	0	0	8	2	10	0	0	15	10	5									
VIII	BPKH Wil. VIII Denpasar	PNS	0	0	4	2	6	10	4	14	4	3	7	25	8	33	0	0	60	43	17									
		Upah	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	6	1	7	1	0	11	10	1									
IX	BPKH Wil. IX Ambon	PNS	0	0	2	0	2	12	4	16	3	1	4	26	3	29	0	0	51	43	8									
		Upah	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	11	3	14	0	0	17	14	3								
X	BPKH Wil. X Irian Jaya	PNS	0	0	1	2	3	16	5	21	6	1	7	18	3	21	0	0	52	41	11									
		Upah	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	10	2	12	0	0	15	10	5									
XI	BPKH Wil. XI Yogyakarta	PNS	0	0	6	8	14	13	18	31	5	6	11	14	6	20	1	0	77	38	39									
		Upah	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	10	1	11	1	0	13	12	1									
XII	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	PNS	0	0	3	0	3	5	3	8	3	8	11	9	0	9	0	0	31	20	11									
		Upah	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	10	1	11	0	0	14	12	2									
XIII	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	PNS	0	0	3	1	4	8	1	9	5	7	12	3	2	5	0	0	30	19	11									
		Upah	0	0	0	0	0	2	4	6	3	1	4	10	2	12	0	0	22	15	7									

No.	UNIT KERJA	Status Pegawai	S3			S2			SARJANA (S1)			SARJANA MUDA			D2/DIII SLTA			SLTP			TOTAL			JENIS KELAMIN		KET.
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	20	21	22	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
XIV	BPKH Wil. XIV Kupang	PNS	0	0	0	4	0	4	10	4	14	3	4	7	7	3	10	0	0	0	35	24	11			
	Upah	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	2	0	2	10	0	10	0	0	0	18	16	2			
XV	BPKH Wil. XV Gorontalo	PNS	0	0	0	4	1	5	6	2	8	5	1	6	6	0	6	0	0	0	25	21	4			
	Upah	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	0	0	0	15	2	17	0	0	0	25	18	7			
XVI	BPKH Wil. XVI Palu	PNS	0	0	0	5	2	7	11	3	14	3	5	8	6	0	6	0	0	0	35	25	10			
	Upah	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	0	1	14	2	16	0	0	0	21	17	4			
XVII	BPKH Wil. XVII Manokwari	PNS	0	0	0	5	0	5	11	1	12	3	1	4	13	0	13	0	1	0	35	32	3			
	Upah	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	0	1	1	7	4	11	2	1	22	12	10				
XVIII	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	PNS	0	0	0	4	1	5	6	4	10	0	1	1	2	1	3	0	0	0	19	12	7			
	Upah	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	0	0	0	9	2	11	0	0	0	17	14	3			
XIX	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	PNS	0	0	0	4	0	4	14	2	16	2	1	3	5	1	6	0	0	0	29	25	4			
	Upah	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	2	0	2	9	3	12	0	0	0	20	14	6			
XX	BPKH Wil. XX Bandar lampung	PNS	0	0	0	3	3	6	15	4	19	0	0	0	14	4	18	0	0	0	43	32	11			
	Upah	0	0	0	0	0	0	1	4	5	2	1	3	6	1	7	0	0	0	15	9	6				
XXI	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	PNS	0	0	0	5	1	6	15	1	16	0	0	0	5	2	7	0	0	0	29	25	4			
	Upah	0	0	0	0	0	0	0	5	2	7	1	0	1	10	5	15	2	0	0	25	18	7			
XXII	BPKH Wil. XXII Kendari	PNS	0	0	0	2	0	2	14	5	19	0	0	0	1	1	2	0	0	0	23	17	6			
	Upah	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	1	1	2	10	0	10	0	0	0	20	13	7			
	JUMLAH		PNS	2	0	65	26	91	188	88	276	57	54	111	283	90	373	5	4	1017	721	296				
	Upah		0	0	1	1	2	32	31	63	13	4	17	166	25	191	4	7	383	288	95					
	TOTAL PNS + UPAH		2		66		220	119	339	70	58	128	449	115	564	9	11	1400	1009	391						

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan, Data s.d November 2017

Keterangan:

Sudah termasuk CPNS dan Tengaga Kontrak

Laki = 1046 orang

Perempuan = 446 orang

TABEL VIII.9. SARANA DAN PRASARANA

NO	INSTANSI	KELOMPOK ASET (DALAM NILAI RUPIAH)						TOTAL ASET		
		TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP DALAM RENOVASI	KDP	ASET TAK BERWUJUD	ASET YANG TIDAK DIGUNAKAN	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	KANTOR PUSAT (KP)	14.119.210.000	72.205.539.448	3.398.283.650	143.931.285	498.800.000	32.354.882.878	-	11.678.156.613	1.565.380.000
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	14.119.210.000	15.393.278.973	3.244.033.650	6.981.285	-	-	89.525.000	1.565.380.000	34.418.108.908
2	Dit. Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	-	19.812.779.199	116.000.000	87.750.000	-	515.000.000	-	2.504.420.530	-
3	Dit Pengukuran dan Penataan Gunan Kawasan Hutan	-	18.452.512.358	38.230.000	49.500.000	184.800.000	-	-	2.028.049.000	-
4	Dit Inventarisasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	-	15.798.117.239	-	-	-	31.849.862.878	-	7.028.442.083	-
5	Dit. Pembentukan Dampak Lingkungan Kehijakan Wilayah dan Sektor Usaha dan Kegiatan	-	1.554.029.042	-	-	314.000.000	-	-	-	1.863.029.042
6	Dit. Pembentukan Dampak Lingkungan	-	1.194.822.637	-	-	-	-	27.720.000	-	1.222.542.637
II	KANTOR DAERAH (KD)	109.339.809.605	204.616.075.119	104.418.565.680	3.252.905.750	-	499.615.564	-	8.229.858.145	90.156.530.527
1	BPKH Wilayah I Medan	4.155.925.800	12.160.193.871	2.288.448.846	-	-	-	823.361.553	6.990.404.261	26.428.334.331
2	BPKH Wilayah II Palembang	9.165.113.094	11.111.428.749	4.329.232.000	85.125.000	-	-	328.908.000	10.612.260.150	35.632.066.993
3	BPKH Wilayah III Pontianak	25.950.010.000	9.803.670.329	8.429.599.479	-	-	-	18.475.000	1.476.059.675	45.677.814.483
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	2.754.451.107	10.397.706.561	5.799.241.450	260.416.700	-	39.600.000	-	171.465.000	10.292.151.012
5	BPKH Wilayah V Bitarjarbaru	2.062.626.000	10.769.934.086	6.087.515.331	186.270.000	-	12.795.500	-	26.125.000	1.445.652.117
6	BPKH Wilayah VI Manado	3.989.336.000	12.287.078.434	7.207.925.200	-	-	5.200.000	-	609.239.000	2.876.220.508
7	BPKH Wilayah VII Makassar	5.635.944.000	10.790.150.229	6.086.616.000	50.000.000	-	-	-	421.034.000	18.075.812.184
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	23.898.650.000	10.008.993.005	7.208.195.947	251.352.500	-	-	-	1.849.341.900	3.534.662.994
9	BPKH Wilayah IX Ambon	1.137.500.000	12.988.356.075	3.238.816.375	260.545.000	-	48.312.000	-	439.653.000	4.237.758.762
10	BPKH Wilayah X Jayapura	1.030.000.000	9.603.716.273	4.172.476.150	126.430.200	-	148.278.300	-	68.942.000	6.664.711.815
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	3.626.796.520	10.749.113.992	4.034.571.986	-	-	16.575.300	-	352.806.400	1.340.697.240
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	1.282.722.000	7.611.845.515	5.315.017.624	-	-	21.770.000	-	345.637.032	6.240.000
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	980.483.629	9.488.656.220	4.837.408.278	469.943.550	-	-	-	-	6.264.900.046
	BPKH Wilayah XIV Kupang	1.222.380.000	11.072.561.697	4.632.109.833	199.821.000	-	27.071.000	-	250.025.000	4.376.177.000
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	979.330.000	10.495.676.249	5.998.813.398	49.760.000	-	-	-	346.100.000	9.929.700
16	BPKH Wilayah XVI Palu	1.602.400.000	10.821.025.071	4.849.111.755	41.900.000	-	180.013.464	-	432.515.000	404.295.000
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	1.468.417.855	11.873.743.999	10.649.076.894	1.232.555.344	-	-	-	482.032.500	1.535.189.184

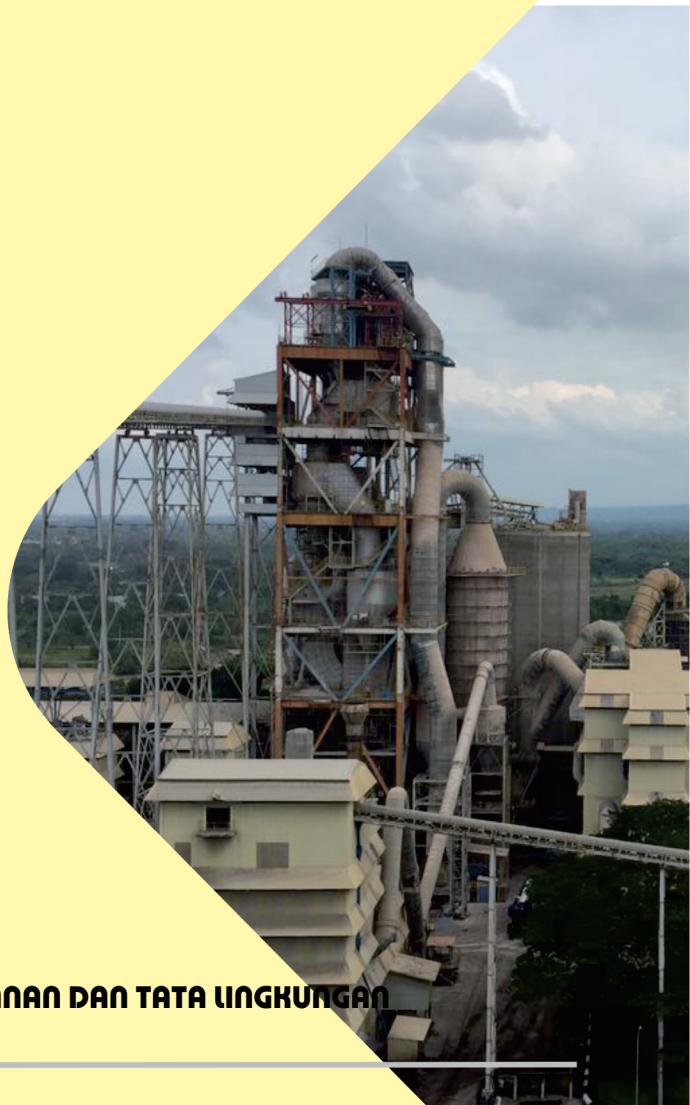
NO	INSTANSI	KELOMPOK ASET (DALAM NILAI RUPIAH)								TOTAL ASET
		TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP DALAM RENOVASI	ASET TETAP LAINNYA	KDP	ASET TAK BERWUJUD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	7.561.454.400	4.793.742.617	1.970.751.824	-	-	-	153.499.500	-	14.479.448.341
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	4.761.374.400	5.094.296.148	2.645.982.100	-	-	-	650.199.860	35.694.750	13.187.547.058
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	3.228.768.000	3.284.504.640	1.040.915.798	38.786.156	-	-	153.499.500	3.213.001.581	10.959.475.675
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	873.526.800	5.702.055.737	1.503.570.000	-	-	-	153.499.500	6.764.712.548	14.997.364.585
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	1.972.600.000	3.707.625.602	2.083.169.400	-	-	-	153.499.500	-	7.916.894.502
JUMLAH I + II		123.459.019.605	276.821.614.567	107.816.829.330	3.396.837.035	498.800.000	32.864.478.442	-	19.908.014.758	91.721.910.527
JUMLAH I + II										656.487.504.264

Sumbar: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s.d Semester I (Juni 2017)

Ket : Nila Aset per 30 Juni 2017



DIREKTORAT JENDERAL PLANologi KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2017



**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANologi KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto
PO. Box 6506, Jakarta 10270, Telp. (021) 5730289, Fax. (021) 5734632